

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahunan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

RPJMD ini disusun berdasarkan azas:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan negara
- c. Keterpaduan
- d. kepentingan umum
- e. keterbukaan
- f. proporsionalitas
- g. profesionalitas
- h. akuntabilitas

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan program Gubernur terpilih hasil Pilkada 2018 dengan memperhatikan RPJPD.

Pasal 4

(1) RPJMD ini disusun dengan sistematika terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

(2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD;
- b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tugas dan fungsi kabupaten/kota dalam mencapai sasaran provinsi yang termuat dalam RPJMD
- c. Pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPd;
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 6

RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah sebagai Berikut :

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 76,87;
- 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,70 persen;
- 3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,5±1 persen;
 - Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara sebesar 6±1 persen;
- 4. Indeks Gini pada skala 0,326;
- 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada skala 76.15; dan
- 6. Indeks Persepsi Korupsi pada skala 7,45.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra PD.
- (2) Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Dalam menyusun Renstra PD dan RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7, Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda.

Pasal 9

- (1) Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD periode tahun 2023-2028.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPDP Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. rekomendasi dari evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 2019-2023;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 periode kelima;
 - c. RPJMN 2020-2024;
 - d. program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan 2024;
 - e. program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - f. memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMD periode tahun 2023-2028.

Pasal 12

Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MEILIANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (2-98/2019)

DAFTAR ISI

	Hal.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019	
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penyusunan	I-10
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-13
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-14
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-19
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-25
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-26
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-69
2.3.3 Fokus Urusan Penunjang	II-82
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-90
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-91
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-93
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-95
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-97
BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah	
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah	III-7
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-12
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-13
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-14
3.3 Kerangka Pendanaan	III-18
3.3.1 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III-19
3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-23
BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Permasalahan Tingkat Daerah	IV-1
4.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Per-Urusan Pemerintahan	IV-10
4.2 Isu-Isu Strategis	IV-26
4.2.1 Isu Internasional	IV-27
4.2.2 Isu Nasional	IV-31
4.2.3 Isu Strategis Kewilayahan	IV-32
4.3 Rumusan Isu Strategis	IV-36

BAB 5	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1	
	A Visi Daerah	V-3	
	B Misi Daerah	V-4	
	C Tujuan dan Sasaran	V-12	
BAB 6	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1	
	6.1 Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1	IV-25
	6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	VI-8	
	6.3 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (<i>Dedicated Program</i>)	VI-9	
	6.4 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan	VI-11	
	6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif	VI-17	
BAB 7	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1	
	7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1	
	7.2 Program Perangkat Daerah	VII-2	
BAB 8	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1	
	8.1 Kinerja Utama (IKU)	VIII-2	
	8.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)	VIII-2	
BAB 9	PENUTUP	IX-1	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 2.1	Kode Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur	II-1
Tabel 2.2	Capaian Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Timur 2013-2017	II-15
Tabel 2.3	Capaian Kesejahteraan Sosial Kalimantan Timur 2013-2017	II-20
Tabel 2.4	Jumlah Desa dan Penduduk Miskin dalam Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Tahun 2017	II-24
Tabel 2.5	Kondisi Olahraga dan Seni Budaya di Kalimantan Timur	II-26
Tabel 2.6	Capaian Pembangunan Kesehatan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.7	Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.8	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi (Km) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-33
Tabel 2.9	Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim	II-35
Tabel 2.10	Kondisi Daerah Irigasi di Kaltim	II-36
Tabel 2.11	Defisit Kebutuhan Air Baku	II-36
Tabel 2.12	Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan	II-37
Tabel 2.13	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama di Kalimantan Timur Tahun 2015-2017 (%)	II-38
Tabel 2.14	Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017	II-39
Tabel 2.15	Penanganan Sampah dan Sampah Terangkut Per Hari	II-40
Tabel 2.16	Sebaran Lokasi TPA dan Sistem Operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur	II-40
Tabel 2.17	Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur	II-42
Tabel 2.18	Data Progress Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	II-45
Tabel 2.19	Data Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi Prov. Kaltim Tahun 2017	II-46
Tabel 2.20	Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian LPJ Kalimantan Timur Tahun 2017	II-47
Tabel 2.21	Luas Kawasan Pemukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ha)	II-48
Tabel 2.22	Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun Awal Rencana	II-48
Tabel 2.23	Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	II-49
Tabel 2.24	Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun Awal Rencana	II-50
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.26	Perkembangan Koperasi Tahun 2013 s.d 2017	II-54
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-55
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kalimantan Timur, 2012-2017	II-55
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	II-57

	Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	
Tabel 2.30	Rasio Pemenuhan Beras/Kebutuhan Konsumsi Beras Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-61
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-64
Tabel 2.33	Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	II-64
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-80
Tabel 2.42	Komoditas Produk Unggulan Industri Pengolahan di Kalimantan Timur	II-82
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.45	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.47	Uraian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	II-88
Tabel 2.48	Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018	II-90
Tabel 2.49	Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.50	Indikator Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 3.1	Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.2	Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-3
Tabel 3.3	Perkembangan Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-5
Tabel 3.5	Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-8
Tabel 3.6	Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-9

Tahun 2013-2017

Tabel 3.7	Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-9
Tabel 3.8	Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-10
Tabel 3.9	Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-11
Tabel 3.10	Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-11
Tabel 3.11	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017	III-13
Tabel 3.12	Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-13
Tabel 3.13	Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-15
Tabel 3.14	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	III-17
Tabel 3.15	Proyeksi Pengeluaran Wajib Mengikat Tahun 2019-2023	III-18
Tabel 3.16	Proyeksi Kapasitas Riil Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	III-19
Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2019-2023	III-22
Tabel 3.18	Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	III-25
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	IV-11
Tabel 4.2	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar	IV-15
Tabel 4.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pilihan	IV-22
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Penunjang Urusan Pemerintahan	IV-24
Tabel 4.5	Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025	IV-32
Tabel 4.6	Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	IV-29
Tabel 5.1	Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur	V-2
Tabel 5.2	Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	V-3
Tabel 5.3	Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	V-4
Tabel 5.4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Visi : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	V-12
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	VI-1
Tabel 6.2	Arah Tematik Tahunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	VI-8
Tabel 6.3	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota	VI-12
Tabel 6.4	Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi	VI-16
Tabel 6.5	Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI-18
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
Tabel 7.2	Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1	Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 1.2	Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD	I-8
Gambar 2.1	Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur	II-2
Gambar 2.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	II-2
Gambar 2.3	Peta Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur 2000-2017	II-5
Gambar 2.4	Peta Rencana Pola Ruang dalam RTRWP Kaltim 2016-2036	II-7
Gambar 2.5	Peta Struktur Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Kaltim 2016-2036	II-8
Gambar 2.6	Peta Kawasan Pertambangan Migas dan Batu Bara	II-11
Gambar 2.7	Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017	II-14
Gambar 2.8	Struktur Perekonomian (%) dan PDRB Kalimantan Timur (Juta Rp) Tahun 2013-2017	II-16
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (persen) Tahun 2013-2017	II-17
Gambar 2.10	Laju Inflasi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.11	Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-18
Gambar 2.12	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Secara Nasional Tahun 2017	II-19
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-20
Gambar 2.14	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur 2013-2017	II-21
Gambar 2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2018	II-22
Gambar 2.16	Peta Sebaran Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2017	II-23
Gambar 2.17	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017	II-23
Gambar 2.18	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017	II-25
Gambar 2.19	Rasio Guru-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-28
Gambar 2.20	Rasio Sekolah-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-29
Gambar 2.21	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-39
Gambar 2.22	Jumlah Kejadian Kriminal di Kalimantan Timur	II-51
Gambar 2.23	Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-51
Gambar 2.24	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017	II-51
Gambar 2.25	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017	II-52
Gambar 2.26	Jumlah UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-54
Gambar 2.27	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)	II-56
Gambar 2.28	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Dengan Daerah Lainnya Tahun 2012-2017 (%)	II-56
Gambar 2.29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)	II-58

Gambar 2.30	Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2017	II-58
Gambar 2.31	Ketersediaan Pangan di Provinsi Kalimantan TImur Tahun 2013-2017	II-60
Gambar 2.32	Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur	II-62
Gambar 2.33	Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Timur	II-65
Gambar 2.34	Realisasi PMDN dan PMA per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-68
Gambar 2.35	Daya Serap Tenaga Kerja Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-68
Gambar 2.36	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-69
Gambar 2.37	Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-70
Gambar 2.38	Kontribusi Pertanian (Dalam Arti Luas) Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-71
Gambar 2.39	Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)	II-72
Gambar 2.40	Produksi Daging Komoditas Peternakan Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-73
Gambar 2.41	Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur	II-78
Gambar 2.42	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kalimantan Timur (%)	II-78
Gambar 2.43	Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-79
Gambar 2.44	Persentase Area Direhabilitasi dari Lahan Terganggu	II-79
Gambar 2.45	Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-80
Gambar 2.46	Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (Juta US)	II-81
Gambar 2.47	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perindustrian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-81
Gambar 2.48	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)	II-84
Gambar 2.49	Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-89
Gambar 2.50	Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-92
Gambar 2.51	Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur	II-92
Gambar 2.52	Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, dan Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	II-94
Gambar 2.53	Kapasitas Pelayanan Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-94
Gambar 2.54	Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)	II-95
Gambar 2.55	Perkembangan Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017	II-95
Gambar 2.56	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017	II-96
Gambar 2.57	Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	II-97
Gambar 2.58	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan	II-98

	yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	
Gambar 2.59	Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017	II-98
Gambar 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (juta rupiah)	III-4
Gambar 3.2	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (persen)	III-4
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016 (persen)	III-5
Gambar 3.4	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (persen)	III-9
Gambar 3.5	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2016 (persen)	III-11
Gambar 3.6	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2016 (jiwa)	III-11
Gambar 4.1	Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018	IV-2
Gambar 4.2	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran RKP Tahun 2018 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	IV-12
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, RKPD Tahun 2019-2023	VI-9

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dalam penyusunan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Pemukiman.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;serta
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
25. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya harmonisasi

antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional.

a. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPN dan RPJMN

RPJMD memedomani RPJMN untuk sinergitas dan sinkronisasi kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPJMD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

b. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 tahap keempat. Secara substantif, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Berbagai evaluasi RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Gubernur dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya.

c. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi acuan bagi Organisasi

Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dituangkan didalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Gubernur bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD, yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Gubernur yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

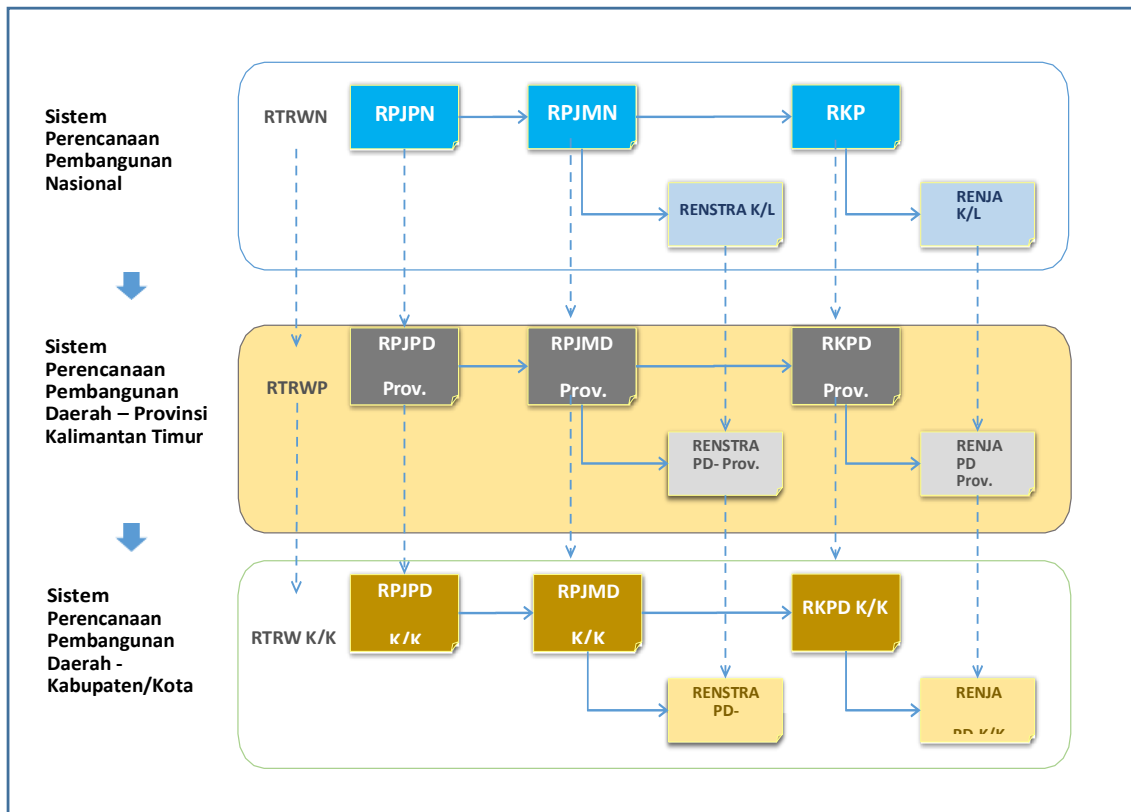
d. Hubungan Antara RPJMD Provinsi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dan atau perubahan dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota. Keberhasilan Kabupaten/Kota dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam RPJMD dan RKPD, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian target kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi.

Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, setiap tahun diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan antar para pemangku kepentingan.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

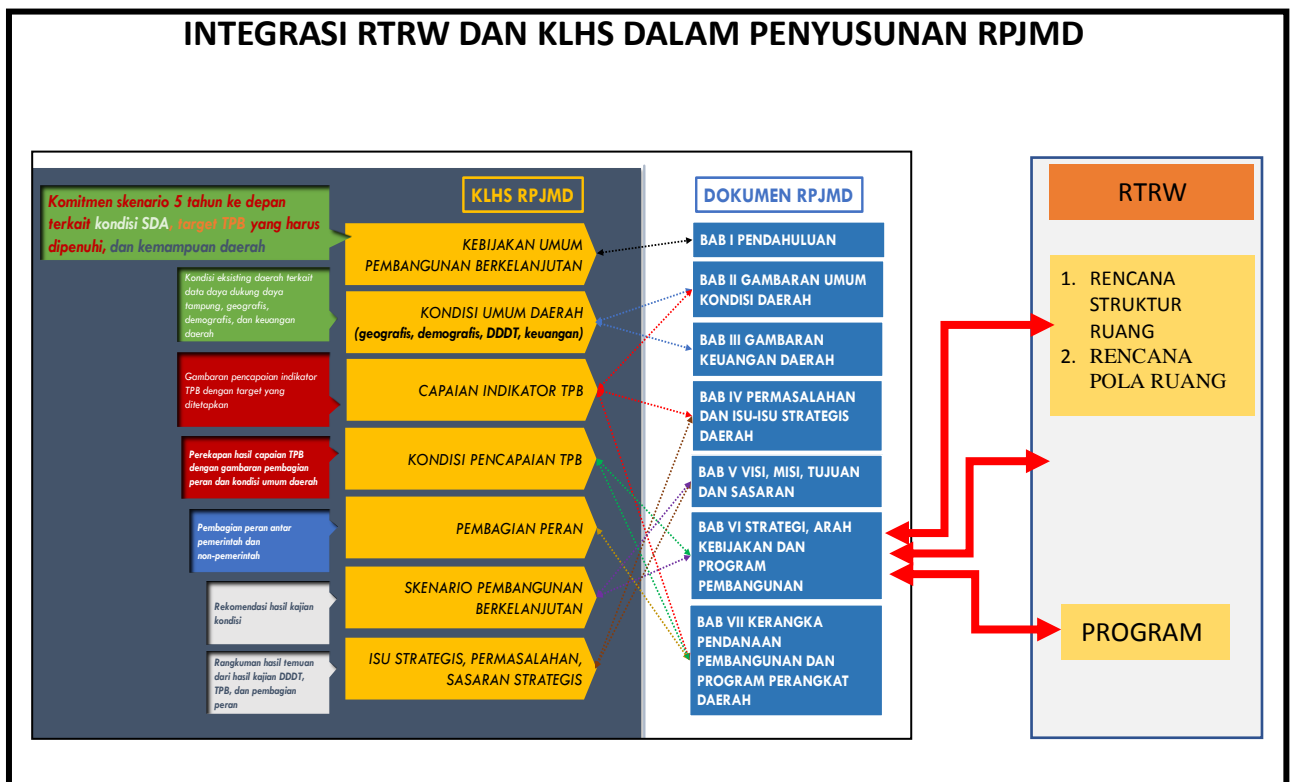


Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Strategi dan kebijakan pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRWP dan KLHS. RPJMD, RTRWP dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan kewilayahan sebagaimana di atur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis secara terpadu yang mengedepankan kondisi daya dukung lingkungan atau ruang wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Provinsi Kalimantan Timur ke depan dibangun dengan kerangka konsep pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) yang terdiri dari empat pilar yaitu; mulai dari aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender (Pilar Sosial); energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi (Pilar Ekonomi); isu terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim (Pilar Lingkungan Hidup); dan langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan (Pilar Hukum dan Tata Kelola).

Gambar 1.2
Integrasi RTRW dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah selama 5 tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan serta penentuan program prioritas pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PRGORAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.1 Aspek Geografi

a. Kondisi Geografi

1. Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113°35'31"-119°12'48" Bujur Timur dan 2°34'23" Lintang Utara - 2°44'17" Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 16.732.065 ha terdiri dari daratan seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dan perairan laut seluas 3,3 juta Ha (2,59 %). Secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu seperti tabel berikut :

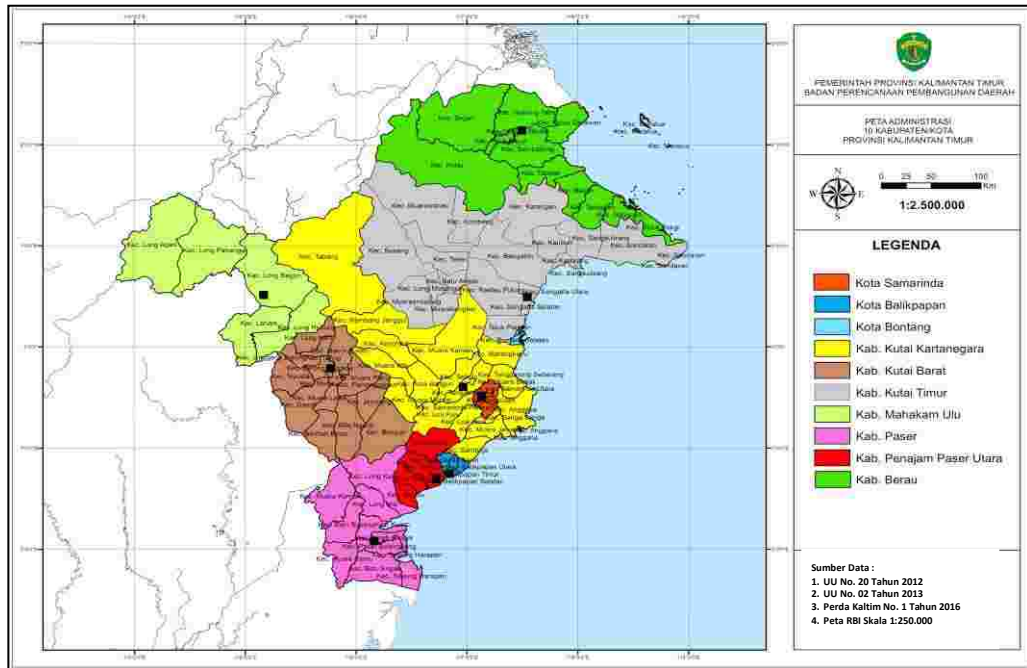
Tabel 2.1
Kode Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur

Kode Wilayah	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
64	Kalimantan Timur
64.01	Kabupaten Paser
64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara
64.03	Kabupaten Berau
64.07	Kabupaten Kutai Barat
64.08	Kabupaten Kutai Timur
64.09	Kabupaten Penajam Paser Utara
64.11	Kabupaten Mahakam Ulu
64.12	Kota Balikpapan
64.72	Kota Samarinda
64.74	Kota Bontang

Sumber : Ditjen Kependudukan dan catatan Sipil Kemendagri

Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Gambar 2. 1
Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, 2016)

Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur memiliki potensi dalam perdagangan internasional berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Gambar 2. 2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim

2. Kondisi Fisik Wilayah

Karakteristik topografi wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 15 persen. Kondisi demikian mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan kegiatan budidaya. Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500 mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

Jenis tanah di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran, dan hutan.

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km². Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha.

Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang. Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Mahakam (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; SWS Berau-Kelay (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; SWS Karang (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karang, Sangatta, Bengalon, dan Santan.

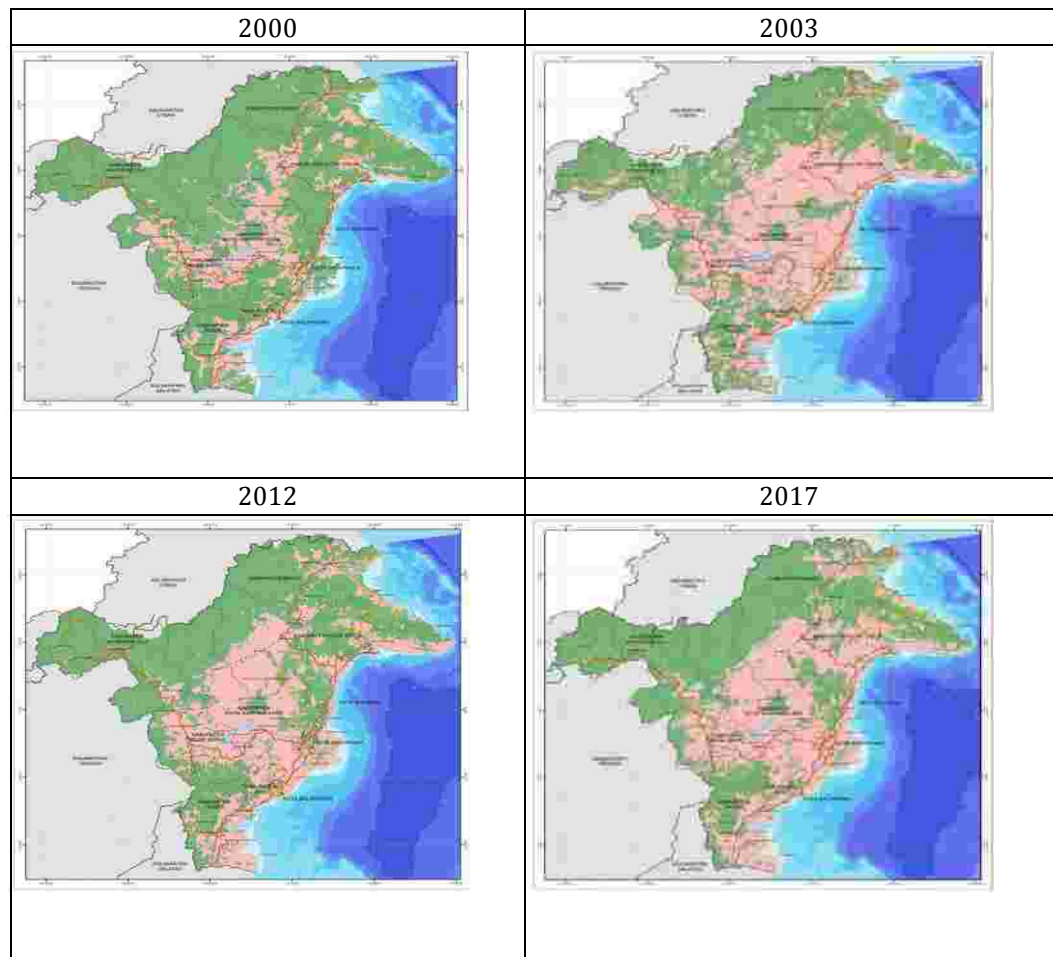
Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropis dengan suhu udara berkisar dari 20,8°C sampai dengan 35,6°C, dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 83-87 persen dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3-4 knot.

3. Kondisi Tutupan Lahan

Kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 (diolah berdasarkan data citra satelit) telah terjadi deforestasi yang sangat luas hingga mencapai lebih dari 176 ribu Ha per tahun. Deforestasi menjadi salah satu isu degradasi lingkungan di Kalimantan Timur. Kondisi tutupan hutan di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, dimana luas tutupan hutan di tahun 2000 adalah seluas ± 9,28 Juta Hektare, kemudian turun di tahun 2003 menjadi ± 7,21 Juta Hektare. Selanjutnya di tahun 2012 tutupan hutan

di Kalimantan Timur kembali turun menjadi seluas ± 7,19 Juta Hektare, dan terus menurun menjadi seluas ± 6,28 Juta Hektare di tahun 2017. Wilayah yang paling luas deforestasinya sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2017 adalah di Kabupaten Kutai Timur (± 911 ribu Ha) dan Kutai Kartanegara (± 797 ribu Ha).

Gambar 2. 3
Peta Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur 2000-2017



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

Saat ini kondisi tutupan lahan didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 2,17 Juta Ha, Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luasan 3,89 Juta Ha dan Semak Belukar dengan luasan 2,71 Juta Ha, yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, dan Kabupaten Paser. Kondisi lahan terbuka untuk kegiatan pertambangan seluas 130.789 Ha, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur. Sementara untuk tutupan lahan yang telah ditanami komoditi perkebunan teridentifikasi seluas 1,33 Juta Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk kelas

tutupan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran hanya seluas 494.293 Ha.

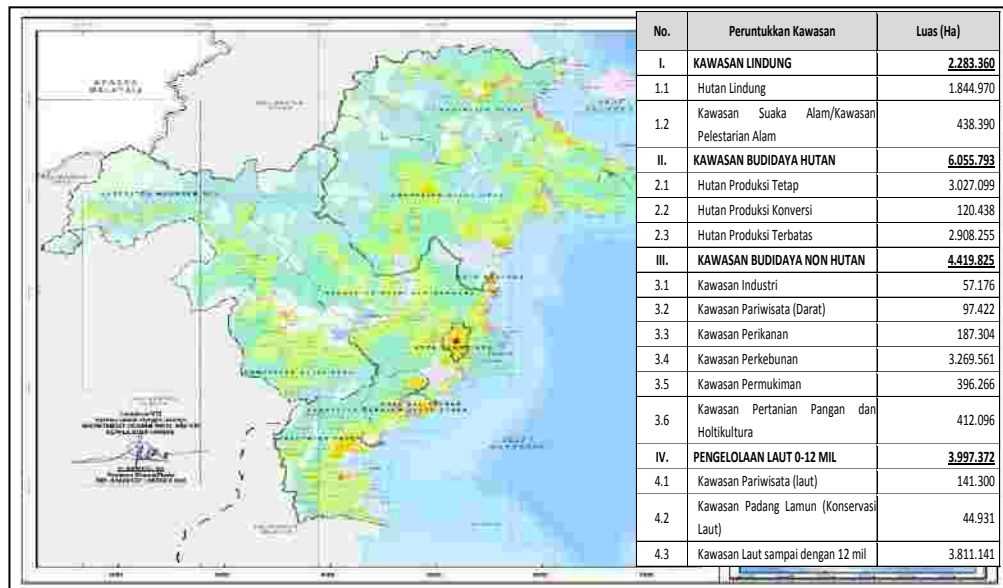
Ketersediaan sumber daya lahan yang produktif menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan komoditas pertanian di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki lahan dengan kategori Kritis seluas ± 820 ribu Ha (6,50 %), lahan kategori Agak Kritis seluas 6,95 Juta Ha (55,15 %), kategori lahan Potensial Kritis seluas ± 3,1 Juta Ha (25,18 %). Sementara itu lahan dengan kategori Sangat Kritis di Kalimantan Timur seluas ± 36.500 Ha (0,29 %), sedangkan lahan yang masuk kategori Tidak Kritis adalah seluas ±1,62 Juta Ha (12,88 %). Lahan kategori Sangat Kritis tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dan areal yang paling luas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Berau, dan Kabupaten Paser.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Kawasan non hutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 4
Peta Rencana Pola Ruang dalam RTRWP Kaltim 2016-2036



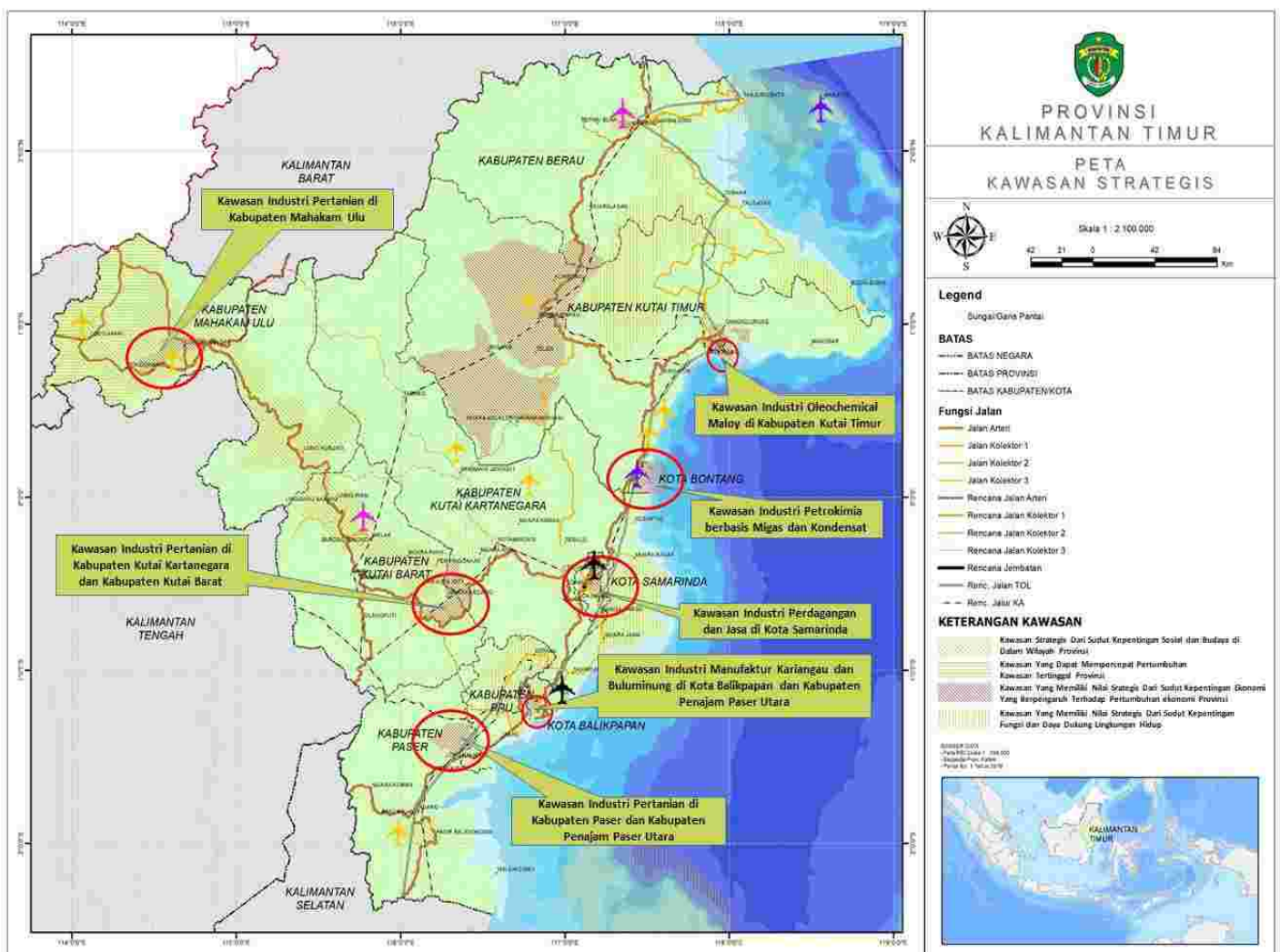
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Disamping itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 telah dikembangkan struktur ruang yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 - Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
 - Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
 - Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- 2) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:

- Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
 - Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
- 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
- Kawasan Delta Mahakam;
 - Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
 - Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
 - Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

Gambar 2.5
Peta Struktur Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Kaltim 2016-2036



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

2. Potensi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas $\pm 5,6$ Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas $\pm 4,8$ Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas $\pm 2,4$ Juta Ha. Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Total luas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan Timur adalah $\pm 3,79$ Juta Ha, dimana seluas $\pm 2,9$ Juta Ha kondisinya masih berupa hutan (hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa primer dan sekunder) dan masih memiliki potensi kayu alam, sedangkan seluas ± 892 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan dan tidak memiliki potensi kayu alam (berupa belukar rawa, semak belukar, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, dan lain-lain).

Sementara total luasan untuk IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kalimantan Timur adalah seluas $\pm 1,57$ juta Ha, dimana seluas ± 638 ribu Ha kondisi tutupan lahannya masih berupa hutan, sedangkan seluas ± 940 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan. IUPHHK-HA paling luas berada di Kabupaten Berau seluas ± 848 ribu Ha, sedangkan IUPHHK-HT paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 508 ribu Ha.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,76$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di

Kalimantan Timur, baru sekitar \pm 1,32 Juta Ha atau 48% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada \pm 52 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2018 terdapat \pm 2,76 Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas \pm 1,02 Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah diidentifikasi melalui citra satelit, baru \pm 650 Ribu Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya dibawah HGU, luasan yang teridentifikasi adalah \pm 1,74 Juta Ha, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas \pm 461 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

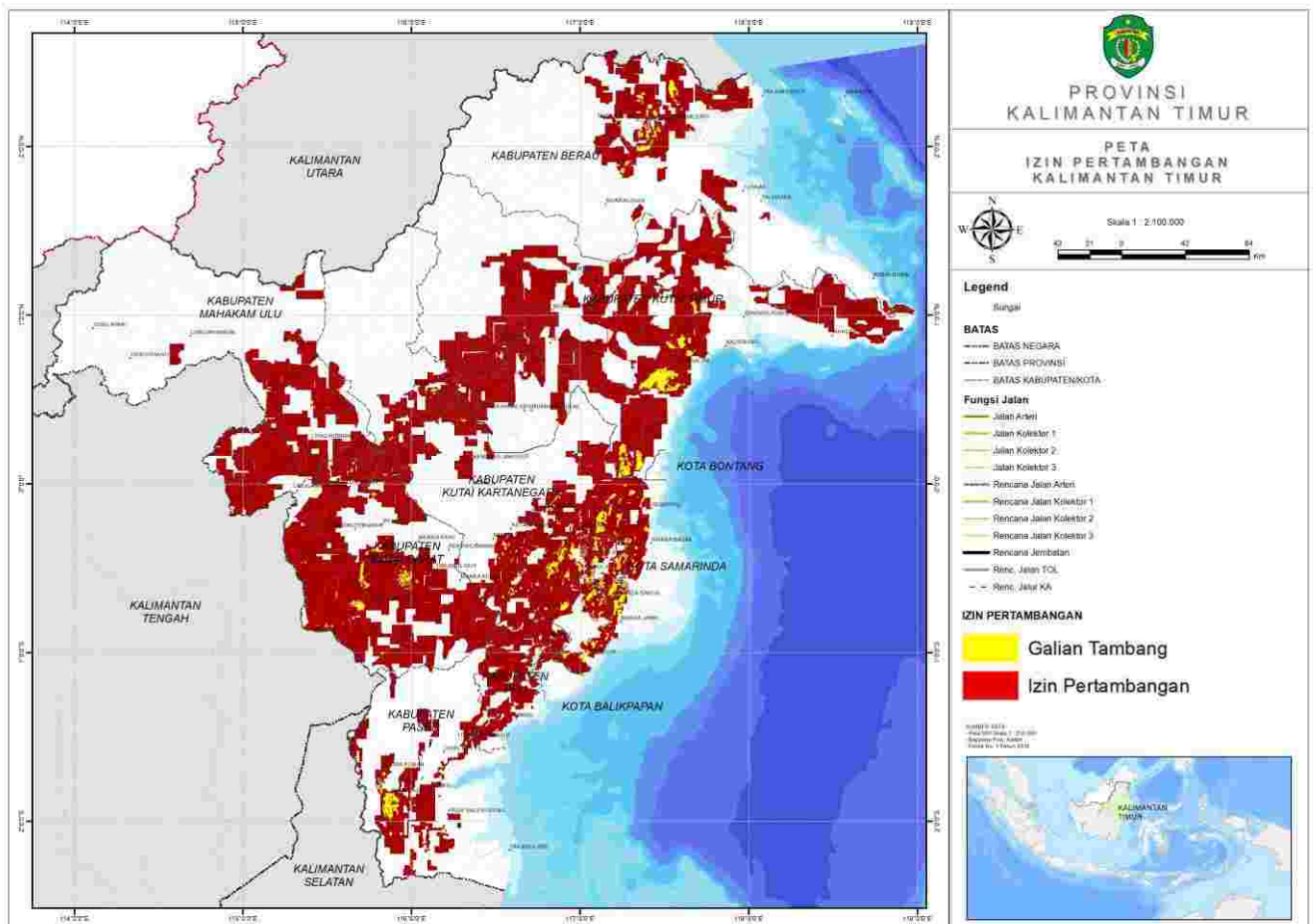
Upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 412.016 Ha, namun hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian \pm 42.546 Ha atau 10,3 % yang kondisi eksistingnya berupa sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran. Masih terdapat lahan seluas \pm 369.470 Ha yang belum dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Areal ini selanjutnya menjadi lahan potensial untuk dikembangkan sesuai dengan arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Oleh karena itu, dibutuhkan insentif program/kegiatan agar potensi ruang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan khususnya batubara, menjadi sektor ekonomi utama pembentuk struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Luas izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur yang memiliki status CnC (clean and clear) mencapai \pm 4,6 Juta Ha. Luas izin usaha pertambangan (IUP) terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 1,4 Juta Ha, selanjutnya di Kabupaten

Kutai Barat seluas ± 957 ribu Ha dan Kutai Kartanegara seluas ± 937 ribu Ha. Luasan IUP ini letaknya tersebar baik di dalam kawasan hutan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, maupun yang berada di areal peruntukan lain. Kawasan pertambangan ini masih menyisakan persoalan semakin meluasnya lubang bekas galian tambang. Dari hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2017, diketahui bahwa bukaan lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur telah mencapai ± 130 ribu Ha atau hanya 2,7 % dari total luas IUP yang diberikan.

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor potensial yang akan dikembangkan untuk mempercepat upaya transformasi ekonomi daerah, terlebih dengan adanya keunggulan komparatif berupa luasnya wilayah kewenangan wilayah laut dan pesisir sejauh 0 sampai dengan 12 mil dengan luas ± 4 Juta Ha.

Gambar 2. 6
Peta Kawasan Pertambangan Migas dan Batu Bara



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

Wilayah pesisir laut Kaltim sepanjang 1.583 km telah direncanakan alokasi ruang untuk perikanan tangkap pelagis seluas $\pm 1,5$ Juta Ha, ikan pelagis dan demersal seluas ± 605 ribu Ha, ikan demersal seluas ± 8 ribu Ha, dan untuk budidaya laut seluas ± 13 ribu Ha. Sedangkan untuk wisata alam bawah laut dan pantai pesisir tersedia alokasi ruang seluas ± 3 ribu Ha. Disamping itu, Kalimantan Timur memiliki Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yakni Pulau Maratua dan sekitarnya, wilayah tersebut sebagian besar telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi laut oleh pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan kebijakan daerah yang menetapkan Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Disamping perikanan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam mendukung upaya transformasi ekonomi. Kalimantan Timur memiliki 406 titik obyek wisata alam dan budaya potensial yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Titik obyek wisata terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 76 obyek wisata (18,72 %), Kota Samarinda dan Paser yang masing-masing memiliki 51 obyek wisata. Sedangkan Kabupaten Berau yang terkenal dengan wisata alam Kepulauan Derawan, memiliki 35 obyek wisata. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki titik obyek wisata paling sedikit yaitu 18 obyek wisata (4,43 %). Sebagian besar obyek wisata tersebut belum dikelola secara optimal.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan dan banjir, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi:

- **Gempa Bumi**

Daerah rawan gempa bumi terdapat di Kabupaten Paser, Tanjung Mangkaliat di Kutai Timur dan Teluk Sulaiman di Berau.

- **Banjir**

Daerah rawan banjir terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan kawasan yang sering dilanda banjir adalah kawasan perkotaan dan pemukiman di Bontang, Samarinda dan Balikpapan. Di wilayah

Kalimantan Timur terdapat ± 2,9 Juta Ha (23,18 %) yang merupakan wilayah rawan banjir dengan kriteria rawan tinggi seluas 350.460 Ha (2,78%) dan kategori rawan seluas 2.575.933 Ha (20,40 %). Wilayah lainnya merupakan wilayah dengan kategori kurang rawan seluas 8.611.705 Ha (68,21 %) dan tidak rawan seluas 1.087.525 Ha (8,61 %). Wilayah yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi bencana banjir yang sangat luas terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kabupaten Paser, dimana sebagian besar morfologi wilayah dimaksud merupakan daerah dataran rendah, rawa, daerah yang dekat dengan danau-danau alam dan muara-muara sungai.

- **Tanah Longsor**

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Bontang dan Samarinda.

- **Tsunami**

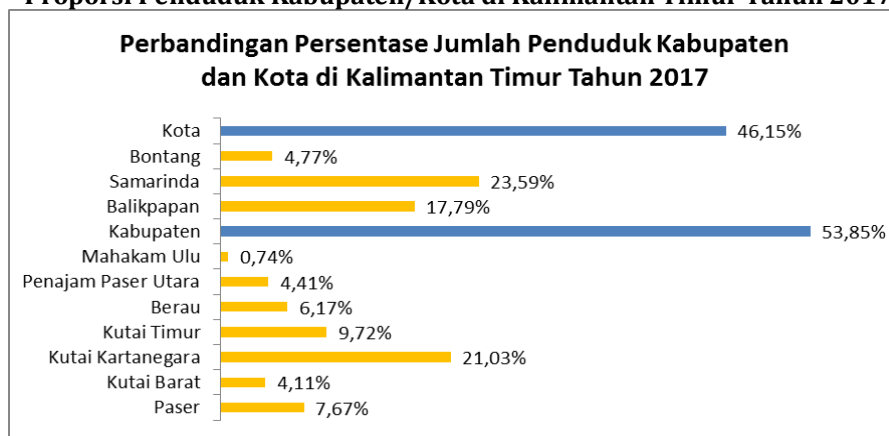
Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

2.1.2 Aspek Demografi

Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.505.161 jiwa yang tersebar 53,85 % di 7 kabupaten dan 46,15 di 3 kota, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun dan kepadatan rendah 27,26 jiwa per Km². Ketimpangan Distribusi penduduk yang tidak merata ini memiliki konsekuensi kebutuhan biaya infrastruktur yang sangat besar untuk meningkatkan akses pelayanan. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pemerataan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Kaltim didominasi oleh kelompok usia 5-39 tahun dengan proporsi masing-masing sekitar 8-9 persen sedangkan penduduk di atas usia 70 tahun menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah kurang dari 1 %. Struktur penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim memiliki proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Gambar 2. 7
Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan indikator kesejahteraan lainnya.

Perekonomian Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan sumber daya alam tak terbarui cukup tinggi, sehingga analisis pada PDRB baik secara total (dengan migas+batubara) maupun partial tanpa adanya migas maupun batubara (non migas dan non batubara) akan memberikan gambaran lebih proporsional jika dihubungkan dengan analisis mikro kesejahteraan masyarakat. Lapangan Usaha Pertambangan dan

Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara masih memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur.

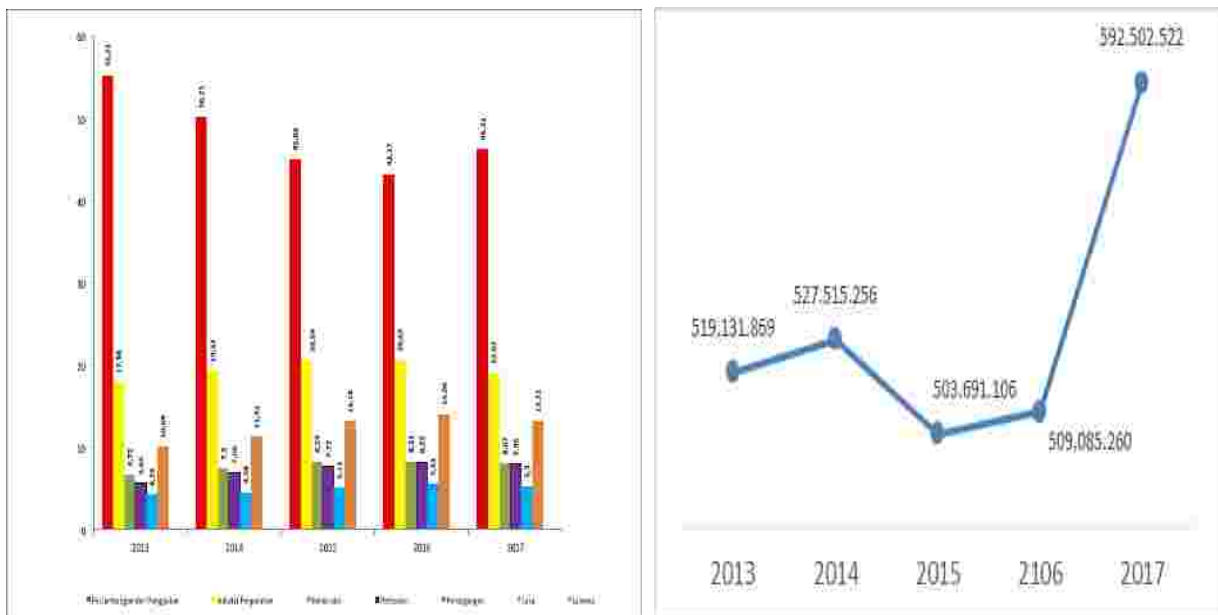
Tabel 2. 2
Capaian Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Timur 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,38	3,13	II.8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	%	5,99	5,87	3,60	1,57	5,24	II.8
3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	II.10
4	PDRB per kapita	Juta Rp	158,47	157,40	147,41	145,40	165,71	II.8
5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	II.10
6	Pemerataan versi World Bank :							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		II.10
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,6	41,06		II.10
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,57	0,53	0,48	0,49	0,51	II.10
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			1,71	1,2	0,36	3,13	II.8
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,65	7,00	7,72	8,22	7,96	II.8
10	Produksi sektor pertanian	ton	76.653	84.516	76.100	89.083	105.669	II.8
11	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,59	3,75	3,98	4,43	4,49	II.8
12	Produksi sektor perkebunan	ton	6.988.344	9.717.275	10.902.358	11.499.164	13.249.959	II.8
13	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15	II.8
14	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,21	50,21	45,03	43,17	46,31	II.8
15	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,73	0,86	0,95	0,93	II.8
16	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46	II.8
17	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,12	5,53	5,30	II.8
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,98	19,32	20,59	20,62	19,07	II.8

Sumber : BPS Kaltim

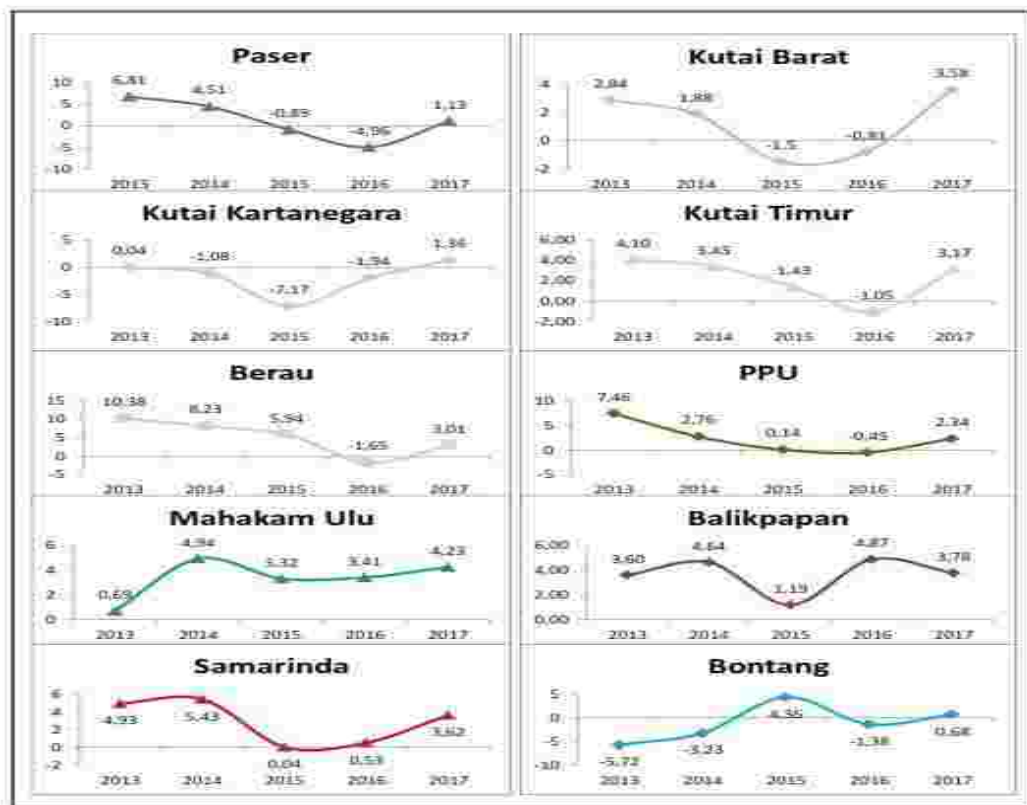
Besarnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDB Nasional tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba dan CPO Sawit di pasar internasional. Pada saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen. Seiring membaiknya harga komoditas minerba dan CPO Sawit, perekonomian Kaltim mulai merangkak naik di tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen, dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten/Kota, hanya Mahakam Ulu, Balikpapan dan Samarinda yang mengalami pertumbuhan ekonomi relatif stabil.

Gambar 2. 8
Struktur Perekonomian (%) dan PDRB Kalimantan Timur (Juta Rp) Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Prov. Kaltim

Gambar 2. 9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (persen) Tahun 2013-2017



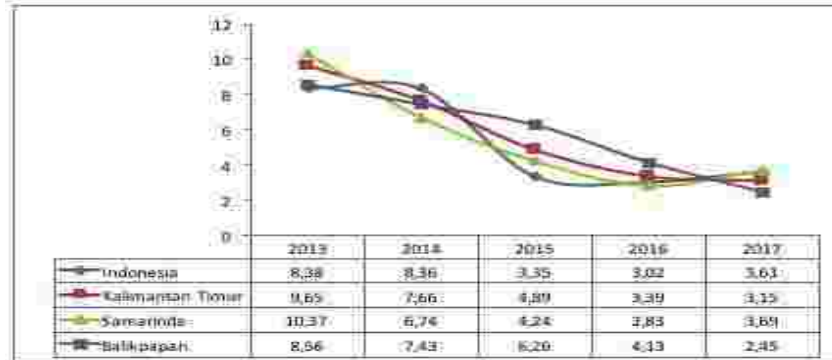
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lapangan usaha konstruksi dan pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat perannya terhadap PDRB Kalimantan Timur, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian cenderung menurun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi ekonomi Kaltim ke arah sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*) sudah berjalan. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) menjadi harapan dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi Kaltim kedepan. Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif dan terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil yaitu 5,30 persen.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di

hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Laju inflasi pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,02 %.

Gambar 2. 10
Laju Inflasi Kalimantan Timur,
Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Indeks Gini Kaltim selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,330. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Williamson selama 2013-2017 juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan ketimpangan menjadi sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kaltim masih relatif tinggi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut.

Gambar 2. 11
Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



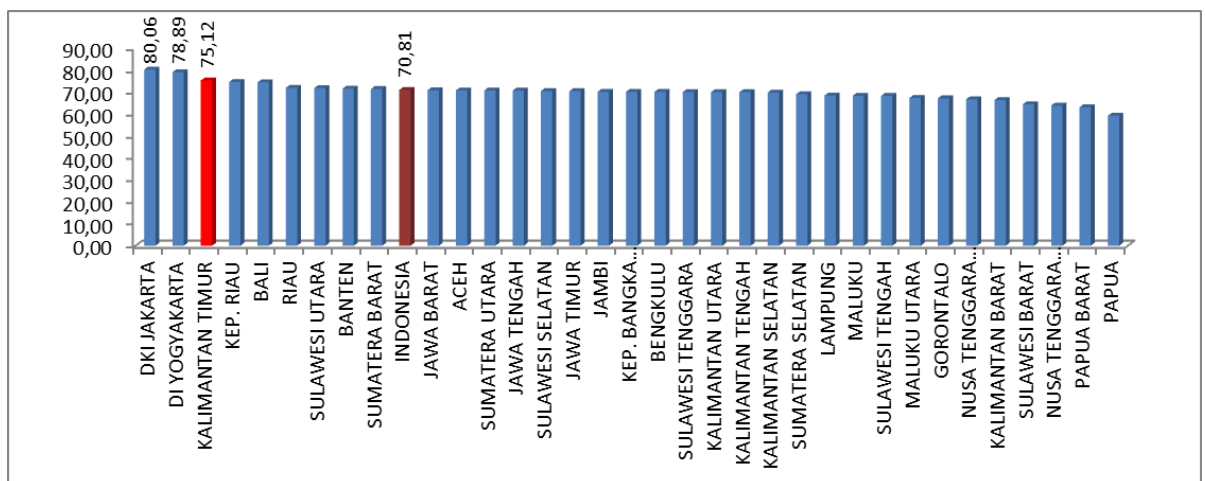
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh 2 (dua) kabupaten yaitu Kutai Timur (Rp. 117.816.986.000.000) dan Kutai Kartanegara (Rp. 148.336.960.000.000), sedangkan besar PDRB kabupaten/kota lainnya tidak sampai 50% dari nilai PDRB kedua kabupaten tersebut. Hanya Kota Balikpapan yang berada di urutan ketiga dengan nilai Rp. 86.732.396.000.000.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan adanya ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota, tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan selama periode 2013-2017, sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan IPM Nasional.

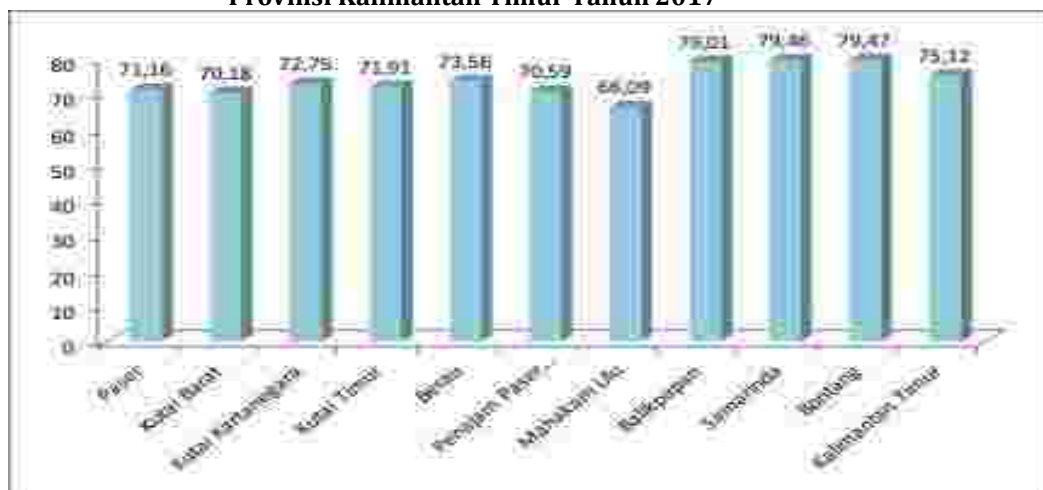
Gambar 2. 12
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi secara nasional Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jika dilihat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, ketujuh kabupaten memiliki nilai IPM dibawah IPM Provinsi. Hanya wilayah kota yang memiliki nilai IPM di atas IPM Provinsi. Pemerataan pembangunan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup di wilayah kabupaten perlu ditingkatkan terutama pada daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 2. 13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

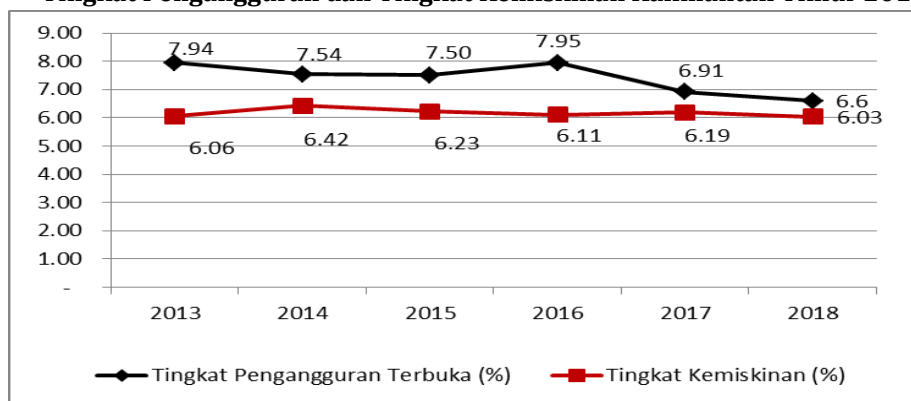
Tabel 2. 3
Capaian Kesejahteraan Sosial Kalimantan Timur 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		II.10
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,6	41,06		II.10
2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,94	93,58	93,77	93,89	93,09	I.1
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,06	6,42	6,23	6,11	6,19	I.1
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	I.1
5	Indeks Desa Membangun (Permendes 2/2016)				0,525	0,525	0,525	II.10
6	Angka Melek Huruf	%	97,95	98,59	98,69	98,81	98,96	I.4
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	11	9,24	I.4
8	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	I.3
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,9	3,7	3,7	0,1		I.3
10	Prevalensi balita gizi kurang		17,1	17,3	19,1	19,8		I.3
11	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	70	63,98	78	79		I.3
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	II.8
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,94	7,54	7,5	7,95	6,91	II.8
14	Rasio penduduk yang bekerja		102,09	102,21	57,71	62,4	59,35	II.8
15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22,81	24,02	65,35	64,44	60,86	I.1
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92,53	97,75	97,74	97,26	98,16	I.2

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada aspek kesejahteraan masyarakat lainnya, Kaltim masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Selama periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Timur berfluktuasi dan cenderung meningkat walaupun disisi lain tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Kondisi tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh migrasi penduduk miskin dari luar daerah yang menambah jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur.

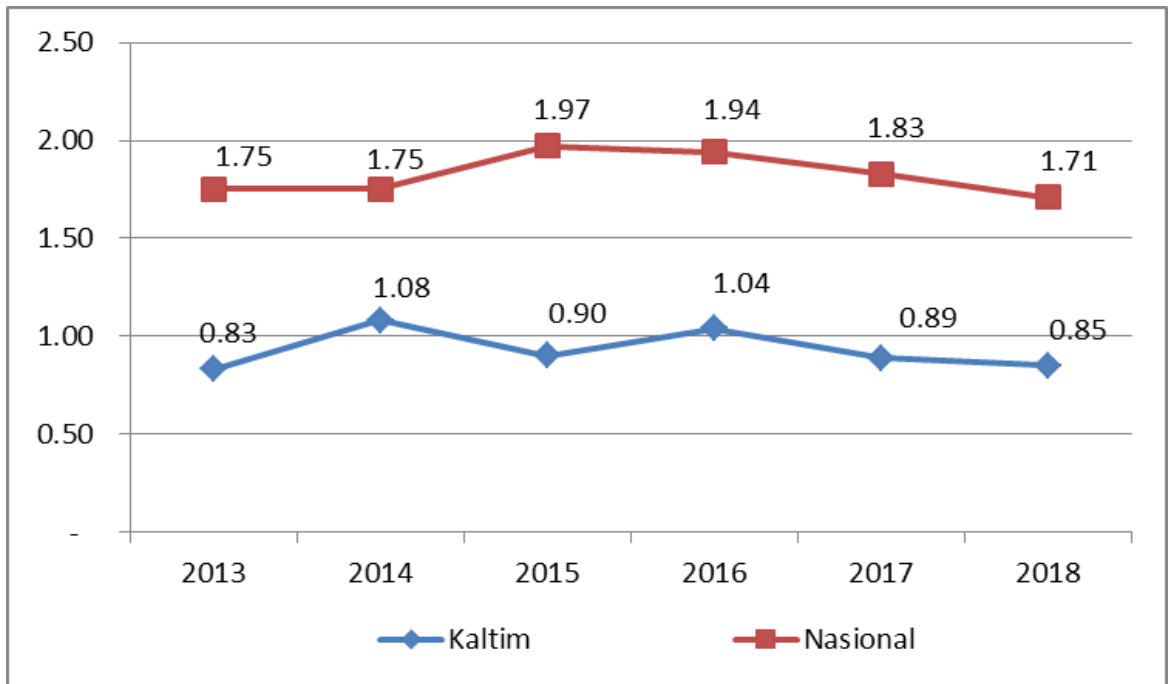
Gambar 2. 14
Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Angka kemiskinan terkait dengan pengeluaran, sementara pengeluaran masyarakat terkait dengan pendapatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Kaltim sangat fluktuatif dan selalu berada di bawah nasional, serta cenderung menurun menunjukkan bahwa semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Strategi penurunan kemiskinan di beberapa daerah dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengembangan ekonomi Kaltim kedepan harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 2. 15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2018

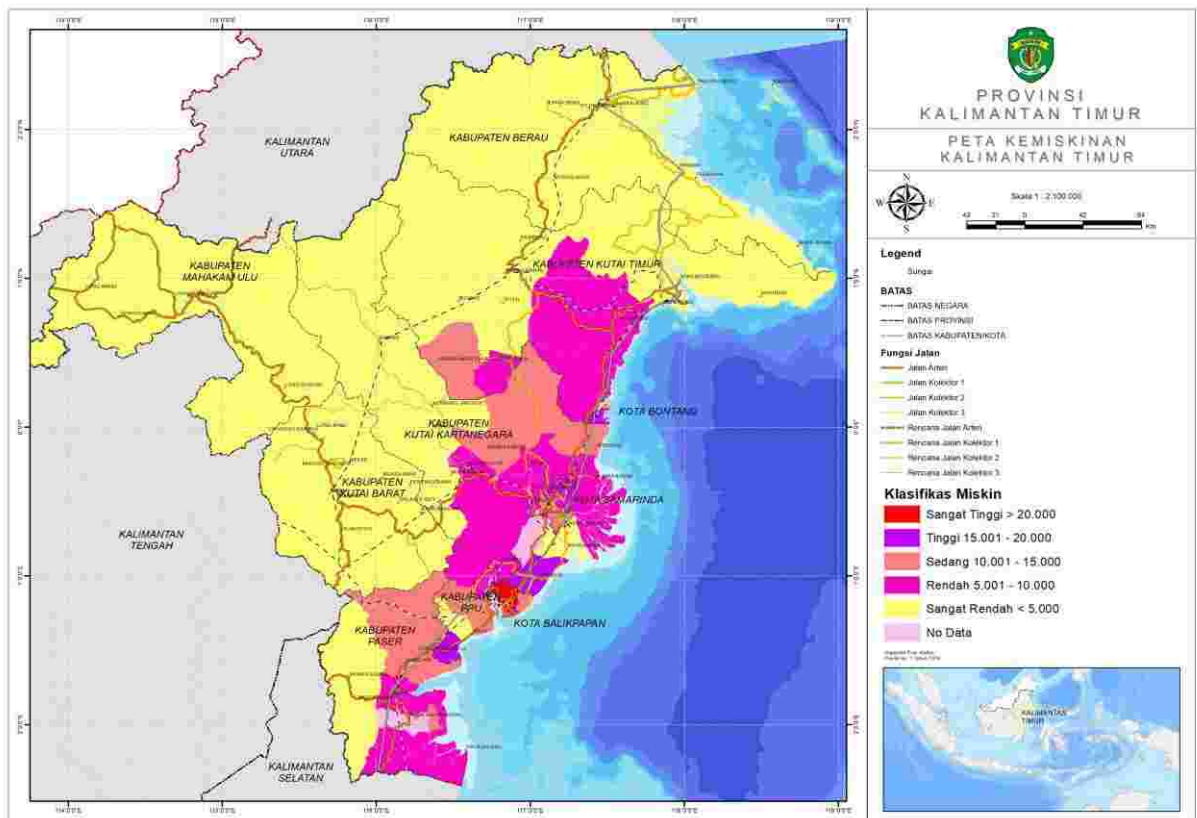


Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Timur sebagian besar berada di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Diperlukan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin pada daerah-daerah ini.

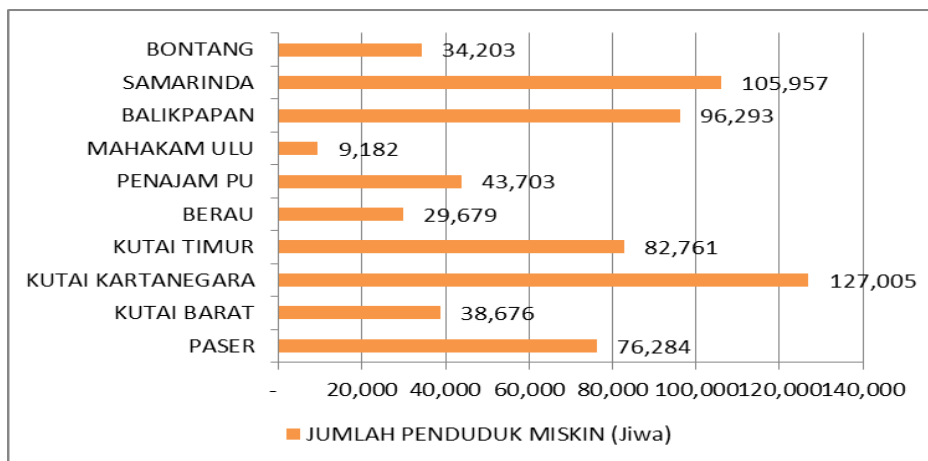
Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur diharapkan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat yang berada di desa-desa sekitarnya. Namun sampai saat ini sebagian penduduk belum mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut, masih terdapat banyak penduduk miskin di sekitar kawasan lindung dan kawasan konsesi hutan produksi, pertambangan, dan perkebunan sejumlah 341.114 jiwa atau 53% dari total 643.743 jiwa penduduk miskin di Kalimantan Timur.

Gambar 2. 16
Peta Sebaran Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

Gambar 2. 17
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K

Kabupaten Paser memiliki jumlah desa terbanyak (22 desa) yang berada pada kawasan Hutan Lindung, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 16.865

jiwa. Di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk miskin 30.309 jiwa pada Kawasan Hutan Produksi dan pada kawasan Perkebunan sebanyak 62.815 jiwa.

Tabel 2. 4
Jumlah Desa dan Penduduk Miskin dalam Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Tahun 2017

No	Kota/Kabupaten	Kawasan								Total	
		Hutan Lindung		Hutan Produksi		Perkebunan		Pertambangan		Jumlah Desa	Penduduk Miskin
		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin		
1	Balikpapan	2	10.706					0	14.883	2	25.589
2	Berau	9	839	46	12.051	30	9.210	49	19.365	134	41.465
3	Bontang	1	1.870			1	2.464	-	-	2	4.334
4	Kutai Barat	4	691	21	4.640	81	14.198	144	29.095	250	48.624
5	Kutai Kartanegara	11	9.549	57	30.309	120	62.815	139	101.075	327	203.748
6	Kutai Timur	11	13.816	41	22.460	76	37.520	108	76.215	236	150.011
7	Mahakam Ulu	14	2.362	20	3.614	16	3.206	30	7.151	80	16.333
8	Paser	22	16.865	23	7.896	69	34.198	69	36.059	183	95.018
9	Penajam Paser Utara	4	5.020	10	6.368	15	12.591	26	35.189	55	59.168
10	Samarinda	7	15.856					0	56.380	7	72.236
Jumlah		85	77.574	218	87.338	408	176.202	565	375.412	1.276	716.526

Terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat, Kaltim memiliki tingkat literasi masyarakat yang sangat baik dengan angka melek huruf di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin dan telah melampaui capaian provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Selain Harapan Lama Sekolah (HLS) indikator penting untuk melihat keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan RLS Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena hanya naik sebesar 0,49 tahun. Jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia sekolah di Kaltim rata-rata pada jenjang pendidikan SMP.

Disamping pendidikan, kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, perkembangan rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan secara perlahan. Dalam kurun waktu lima tahun UHH Provinsi Kalimantan Timur telah meningkat dari 73,32 tahun di tahun 2012 menjadi 73,70 tahun di tahun 2017. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat dapat terlihat melalui jumlah kepesertaan

jaminan kesehatan baik melalui Jamkesda (untuk penduduk miskin) dan BPJS (berbayar) di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 18
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2017



Sumber : SIDATA, Bappeda Provinsi Kaltim

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang seni budaya dan keolahragaan juga menjadi aspek penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya keolahragaan di Kalimantan Timur dapat dilihat dari capaian prestasi olahraga Kaltim dalam kejuaraan tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016 dimana Kaltim menempati posisi ke lima dari 34 provinsi. Peringkat Kaltim di PON 2016 tidak jauh berbeda dengan PON 2012 di Bengkulu yang juga menempati posisi kelima. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keolahragaan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kaltim. Selain itu, capaian prestasi olahraga tersebut juga ditopang oleh adanya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai.

Secara umum, jenis olahraga yang paling populer adalah olahraga terukur seperti lari, renang, angkat besi, lompat tinggi, dan sebagainya. Olahraga ini paling banyak memiliki klub olahraga dan atlet dengan jumlah sarana dan prasarana sekitar 24 buah. Sedangkan olahraga lain yang juga populer di Kalimantan Timur adalah olahraga beladiri seperti taekwondo, silat, dan lain-lain dengan jumlah atlet profesional lebih dari 260 orang dan terdapat 11 klub. Di samping itu, olahraga lain seperti permainan dan olahraga beregu juga tetap menjadi minat yang populer.

Aktifitas seni dan budaya di Kalimantan Timur meliputi grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater masih

belum berkembang optimal. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar-sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih belum aktif. Disamping itu, event seni budaya Kalimantan Timur hanya diselenggarakan setahun sekali diantaranya Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Budaya Dayak Kenyah.

Tabel 2. 5
Kondisi Olahraga dan Seni Budaya di Kalimantan Timur

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Klub Olahraga	1.045	1.045	1.050	1.050	1.050
Jumlah Gedung Olahraga	47	55	97	97	101
Jumlah Event Budaya	56	55	60	60	60
Jumlah Group Kesenian	676	735	861	861	861

Sumber : Sidata Kaltim

Kinerja pembangunan pemuda di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu satu tahun 2015-2016 mampu meningkatkan capaian IPP nya dari sebesar 50,83 menjadi 56,33 dan berhasil menempati posisi ketiga secara nasional dibawah DI Jogjakarta dan Bali. Dimana peningkatan angka indeks ini dominan dipengaruhi oleh perbaikan kinerja pemuda dari sisi lapangan dan kesempatan kerja. Indikator pendukung pemuda wirausaha (*white collar*) dan tingkat pengangguran menunjukkan kinerja yang baik.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur telah berkembang dan menjadi perhatian Pemerintah, dimana sampai dengan tahun 2018 jumlah sekolah yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebanyak 6.916 sekolah, terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 2.895 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.895 sekolah, Sekolah Menengah

Pertama (SMP) sebanyak 648 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 221, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 222 sekolah. Sementara itu untuk pendidikan khusus telah dikembangkan sekolah luar biasa sebanyak 9 sekolah tersebar di 9 kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk pengembangan pendidikan sekolah menengah yang diarahkan untuk sekolah vokasi telah dikembangkan sebanyak 147 jurusan/program keahlian. Dalam rangka mendukung kawasan industry yang akan dikembangkan, maka pemerintah akan melakukan revitalisasi sekolah vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah.

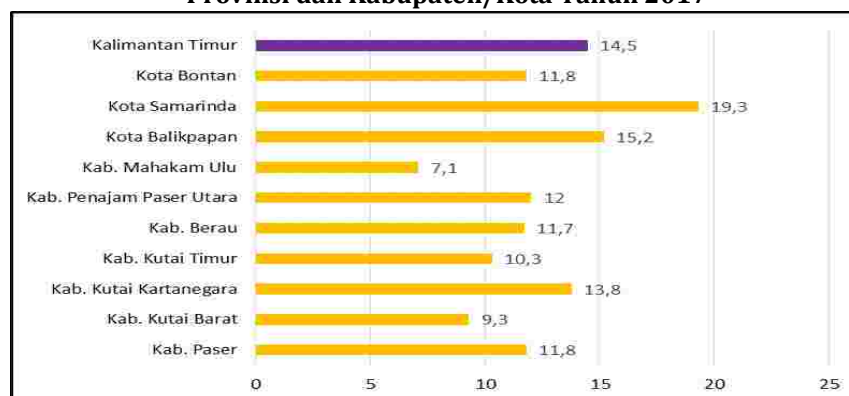
Sementara itu dalam rangka pengembangan pendidikan yang diarahkan bagi anak-anak penyandang disabilitas, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah luar biasa.

Namun Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan pada partisipasi pendidikan di tingkat sekolah menengah atas terutama jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata belum mencapai 90 persen dan angka putus sekolah yang tinggi yaitu rata-rata 21,09 % setiap tahun. Secara umum capaian APK Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan 9,56 persen dalam kurun waktu lima tahun, demikian pula capaian APM Kaltim meningkat sebesar 6,29 persen. Meskipun capaian APK dan APM Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, tetapi terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara APK dan APM yaitu sebesar 25,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan SMA tidak diikuti dengan kesesuaian umur peserta didik dengan golongan umur yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peserta didik di SMA/SMK/MA yang tinggal kelas atau mengulang atau juga disebabkan oleh adanya umur peserta didik lebih muda daripada golongan umur yang seharusnya masuk jenjang SMA. Demikian pula capaian APK dan APM di Kabupaten/Kota mencerminkan disparitas kualitas pendidikan di Kaltim. Daerah yang harus menjadi prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Paser, Kutai

Kartanegara, Berau dan Kutai Barat karena nilai APK dan APM selalu menjadi yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Disamping itu, disparitas pelayanan pendidikan dapat juga dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketercukupan tenaga pengajar. Kalimantan Timur memiliki tenaga pengajar yang terbatas di tingkat sekolah menengah atas, dimana rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK di Kalimantan Timur adalah 14,5 yang bermakna bahwa satu orang guru mengajar sebanyak kurang lebih 14-15 siswa. Terdapat beberapa daerah dengan rasio guru-murid yang kecil seperti di Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Kutai Timur. Di sisi lain, juga terdapat daerah dengan rasio guru-murid sangat tinggi seperti di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi guru-murid lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota.

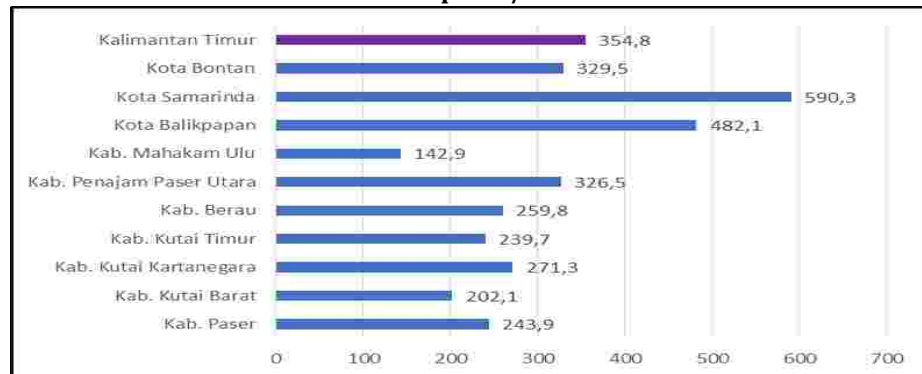
Gambar 2. 19
Rasio Guru-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: BPS Kaltim, Kaltim Dalam Angka 2017

Di samping rasio guru-murid, indikator lain yang juga menjadi indikasi penyebab disparitas pelayanan pendidikan adalah rasio sekolah-murid. Rasio murid-sekolah di Kaltim sebesar 354,8 yang artinya setiap satu sekolah rata-rata memiliki 354 siswa. Namun demikian, data tersebut belum menggambarkan daya tampung sekolah secara lebih rinci karena diperlukan data-data terkait jumlah ruang kelas per sekolah untuk mengukur rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang belajar.

Gambar 2. 20
Rasio Sekolah-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: BPS Kaltim, Kaltim Dalam Angka 2017

Kota Balikpapan dan Kota Samarinda rasio memiliki sekolah-murid sangat tinggi yaitu satu sekolah rata-rata memiliki jumlah siswa 500 orang. Sebaliknya, di beberapa daerah terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser perbandingan sekolah-siswa terlihat lebih kecil.

b. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat menjadi penentu penting bagi produktivitas suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan bidang kesehatan perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan bidang kesehatan di Kalimantan Timur semakin membaik, hal ini ditunjukkan oleh usia harapan hidup yang semakin meningkat dari 73,52 tahun pada tahun 2013 mencapai 73,7 tahun pada tahun 2017.

Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan kesehatan terkait kematian ibu, morbiditas, keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan, prevalensi TB dan HIV-AIDS.

Tabel 2. 6
Capaian Pembangunan Kesehatan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	I.3
2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	177,21	177,21	177,21	177,21	177,21	I.3
3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	jiwa	21	21	21	21	21	I.3
4	Angka Kematian Balita	jiwa	72	60	84	117	31	I.3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	(AKBa) per 1000 kelahiran hidup.							
5	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (jumlah)		7319	6012	6695	7933	10110	I.3
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	I.3
7	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	1.660	I.3
8	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.380	4.097	4.036	4.124	3.895	I.3
9	Rasio posyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,4	34,33	I.3
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,4	3,39	4,03	I.3
11	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12	92,29	I.3
12	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76	20,89	I.3
13	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9	10,5	I.3
14	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76	176,87	I.3
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	564,71	624,27	676,70	693,20	693,20	I.3
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	87,21	92,9	95,46	88,75	I.3
17	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	90,9%	79,6%	79,6%	91,3%	90,1%	I.1
18	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	90,9%	79,6%	79,6%	91,3%	90,1%	I.3
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		7,3	7,54	7,81	8,62	7,8	I.3
20	Cakupan Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	I.3
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	85,34	87,73	92,4	89,4	94,46	I.3
22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		1,28	1,05	1,24	1,96	1,88	I.3
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	17	14,65	23,6	38,89	30,96	I.3
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	30,57	37,94	20,83	9,6		I.3
25	Tingkat prevalensi		229,40	74,28	56,00	4,19	100	I.3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							
26	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	22,50	28,00	19,80	47,10	35,99	I.3
28	Angka kejadian Malaria	per 1000 penduduk	1,50	0,75	0,20	0,04	0,40	I.3
29	Tingkat kematian akibat malaria		5,70	1,00	0	0	0	I.3
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,18	0,03	0,09	0,190	<1	I.3
31	Cakupan kunjungan bayi	%	60,44	78,52	65,41	84,16	82,40	I.3
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,99	78,95	65,23	88	45	I.3
33	Cakupan pelayanan nifas		84,80	85,30	82,30	79,40	81	I.3
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	48,60	63,20	57,90	68,10	69	I.3
35	Cakupan pelayanan anak balita	%	55,60	54,50	59,00	66,20	61,2	I.3
37	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	43,00	91,88	94,24	99,34	98,52	I.3
38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	I.3
39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		60,06	93,18	100,00	97,92	94,12	I.3
40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100,00	85,23	98,80	100,00	100,00	I.3
41	Cakupan Jaminan Kesehatan		61,33	42,65	49,80	51,67	55,00	I.1
44	Angka Kematian Ibu (AKI).		113	104	100	95		I.3
45	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		-	1,5	1,9	2,7	2,3	I.3
46	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		-	1,5	1,9	2,7	2,3 jt	I.3

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Kaltim dan BPS Kaltim

Tuberkulosis (TB) dan HIV-AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir,

temuan kasus TB BTA+ baru di Kalimantan Timur meningkat sebesar 34,92 % yaitu sebanyak 1.953 kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.635 kasus pada akhir tahun 2017. Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan merupakan penyumbang terbesar kasus TB BTA+ Baru selama kurun waktu empat tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan tingginya resiko penyebaran TB BTA+ di wilayah tersebut. Terkait dengan distribusi tenaga medis dan paramedis, bahwa masih terjadi kekurangan tenaga medis dan paramedis terutama daerah 3T. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan penambahan tenaga medis dan para medis sehingga masyarakat yang berada di daerah 3T bisa terlayani dengan baik. Untuk sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah telah memenuhi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Puskesmas 24 jam, dan Rumah Sakit Pratama, tetapi terkait dengan peralatan medis kesehatan, masih sangat terbatas khususnya di puskesmas-puskesmas di daerah 3T.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi serta penataan ruang.

Tabel 2. 7
Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	II.9
2	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	66,24	51,66	II.9
3	Perumahan berdasarkan fasilitas sanitasi :							
	- Jamban sendiri	%	n/a	n/a	89,71	89,75	91,76	
	- Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	%	n/a	n/a	70,08	77,66	76,56	
4	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	n/a	1.405,14	1.363,39	1.309,72	1.026,69	II.9
5	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan		2	2	2	2	2	II.9

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	kawasan sentra produksi (Kawasan)							
6	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	%	n/a	n/a	51,7	51,5	54,3	III.6
7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)		67,83	82,06	69,14	75,02	73,18	III.11

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan dan kualitas. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan Provinsi hingga tahun 2017 sesuai dengan SK Kemendagri No. 55 Tahun 2000 yaitu sepanjang 1.628,07 Km dengan kondisi mantap mencapai 51,66%. Ketersediaan jalan provinsi dalam kondisi mantap belum mampu sepenuhnya mendukung konektivitas 8 Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No 1 tahun 2016) dan pusat produksi, kawasan industri, serta outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan.

Tabel 2.8
Panjang Jalan (Km) Provinsi Menurut Kondisi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	432,53	48,32	28,57	3,19	223,68	24,99	210,31	23,50
2016	149,97	9,55	720,54	45,89	500,52	31,88	269,04	17,14
2015	452,98	28,85	329,52	20,99	251,39	16,01	536,68	35,83
2014	456,86	29,10	339,57	21,63	359,21	22,88	414,43	26,40
2013	440,48	28,05	334,85	21,33	249,75	15,91	544,99	34,71

Sumber: Diolah dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Berdasarkan kondisi jalan tahun 2017 menunjukkan kondisi rusak dan rusak berat mencapai 433,99 Km atau 48,49% dari total panjang jalan. Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berada di Kabupaten Kutai Timur yaitu mencapai 161,86 Km atau 65,26% dari total panjang jalan provinsi di wilayah tersebut dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 116,62 Km atau 51,27% dari total panjang jalan provinsi di wilayah tersebut.

Tingginya kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksesuaian konstruksi jalan dengan standar spesifikasi

teknis, kondisi tanah yang labil sehingga rawan terjadi longsor, serta belum optimalnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi serta tingginya pelanggaran batas muatan kendaraan.

Dari aspek keselamatan berlalu lintas dijelaskan bahwa pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 864 kasus dengan korban meninggal dunia 951 jiwa, hal ini sebagian besar disebabkan rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Persoalan lain yang berkaitan dengan konektivitas wilayah yaitu ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kabupaten/Kota belum optimal. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan mobilisasi alat berat menjadi lebih mahal.

Kota Balikpapan merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada daerah tersebut mencapai 77% dari total panjang jalan provinsi diwilayah tersebut. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada tahun 2018 dilakukan penetapan Status Jalan Provinsi Kalimantan Timur yang baru melalui Keputusan Gubernur No. 622/K.295/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi yaitu sepanjang 895.06 Km. dari perubahan Panjang jalan tersebut, maka kondisi mantap jalan provinsi mengalami perubahan mencapai 52,85 % dan tidak mantap mencapai 47,51 % di tahun 2018.

Salah satu sektor strategis pembangunan di Kalimantan Timur adalah Sumber Daya Air. Keberadaannya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian. Pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan sektor Sumber Daya Air difokuskan pada 3

aspek, yakni upaya pemenuhan Kebutuhan Air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri, Pembangunan jaringan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian, serta upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang kesinambungannya sangat bergantung pada suplai air yang memadai. Pada tahun 2017, luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 13.618,5 Ha, atau 14,4% dari luas seluruh lahan sawah eksisting di Kaltim. Luasan tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/Kota serta mencakup seluruh kewenangan baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. (Tabel Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim)

Tabel 2.9
Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim

NO	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Non-Irigasi (Ha)	Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	12.702	12.702
2	Kutai Barat	608	8.111	8.719
3	Kutai Kartanegara	6.071	29.921	35.992
4	Kutai Timur	2.881	6.874	9.775
5	Berau	2.831	7.654	10.485
6	Penajam Paser Utara	933	11.272	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	480
8	Balikpapan	0	250	250
9	Samarinda	294,5	3.453,5	3.748
10	Bontang	0	74	74
	TOTAL	13.618	80.791,5	94.410

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, & Holtikultura Prov. Kaltim, 2018

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi, terdapat 8 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi dengan total luasan 12.051 Ha. Dari luasan tersebut, yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 56,59% atau seluas 6.820 Ha. Rencana pembangunan jaringan irigasi pada 4 Daerah Irigasi mencapai 83 Km. Hingga tahun 2017

realisasi pembangunan jaringan irigasi tersebut baru mencapai ± 26 Km atau hanya 31%.

Tabel 2.10
Kondisi Daerah Irigasi di Kaltim

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS DI (Ha)
1	Biatan	1.779
2	Labanan	1.100
3	Merancang	1.200
4	Semurut	1.089
5	Kaliorang	1.300
6	Selangkau	2.987
7	Marangkayu	1.507
8	Sungai Buluh	1.089
TOTAL		12.051

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Dalam proses perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, integrasi memang belum dilakukan hingga posisi/lokasi spesifik. Penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya data geospasial yang akurat mengenai kondisi lahan sawah eksisting serta rencana lokasi pencetakan sawah. Penyediaan data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan agar kedepannya persoalan ini tidak menjadi penghambat Kaltim untuk meningkatkan indeks pertanaman dan presentase ketersediaan beras.

Pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini dan 5 tahun kedepan, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami defisit air baku.

Tabel 2.11
Defisit Kebutuhan Air Baku

No.	Kabupaten / Kota	Defisit Kebutuhan Air (m³/Thn)	
		2018	2023
1	Kabupaten Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	Kabupaten Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	Kabupaten Kutai Barat	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
5	Kabupaten Kutai Timur	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	Kota Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

No.	Kabupaten / Kota	Defisit Kebutuhan Air (m ³ /Thn)	
		2018	2023
8	Kota Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Kota Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Kabupaten Mahakam Ulu	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Defisit air baku lebih disebabkan masih kurangnya pembangunan infrastruktur pengambil air baku pada air permukaan dan semakin berkurangnya cadangan air tanah. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur tersebut sudah dilakukan pada beberapa lokasi prioritas. Beberapa diantaranya telah terbangun dan sisanya belum direalisasikan. Terdapat pula beberapa prasarana yang telah terbangun namun belum dapat dioperasikan. Kekurangan prasarana dan sarana air baku berpengaruh pada distribusi dan ketersediaan air minum.

Permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dapat dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum.

Tabel 2.12
Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaan

NO	KABUPATEN/KOTA	Sumbangan Rumah (SR)			Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	PASER	15.882	18.743	19.050	41,93	24,21	38,29
2	PENAJAM PASER UTARA	4.798	5.339	5.470	15,79	14,19	15,87
3	SAMARINDA	127.633	137.135	146.225	89,60	90,96	95,46
4	BALIKPAPAN	87.999	95.781	97.243	76,84	76,50	76,98
5	KUTAI KERTANEGARA	65.026	69.942	68.035	59,86	63,25	63,39
6	KUTAI BARAT	9.560	9.987	10.012	34,58	34,25	34,35
7	KUTAI TIMUR	17.727	20.656	15.945	25,79	31,67	33,13
8	BERAU	13.159	16.120	16.517	40,71	44,34	44,70
9	BONTANG	19.212	22.970	23.999	80,23	84,37	87,05
10	MAHAKAM ULU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
JUMLAH		360.996	396.673	402.496	51,7	51,5	54,3

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana pada tahun 2015 sebesar 51,7% dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 54,3%. Masih minimnya cakupan air bersih perpipaan disebabkan oleh Masih kurangnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

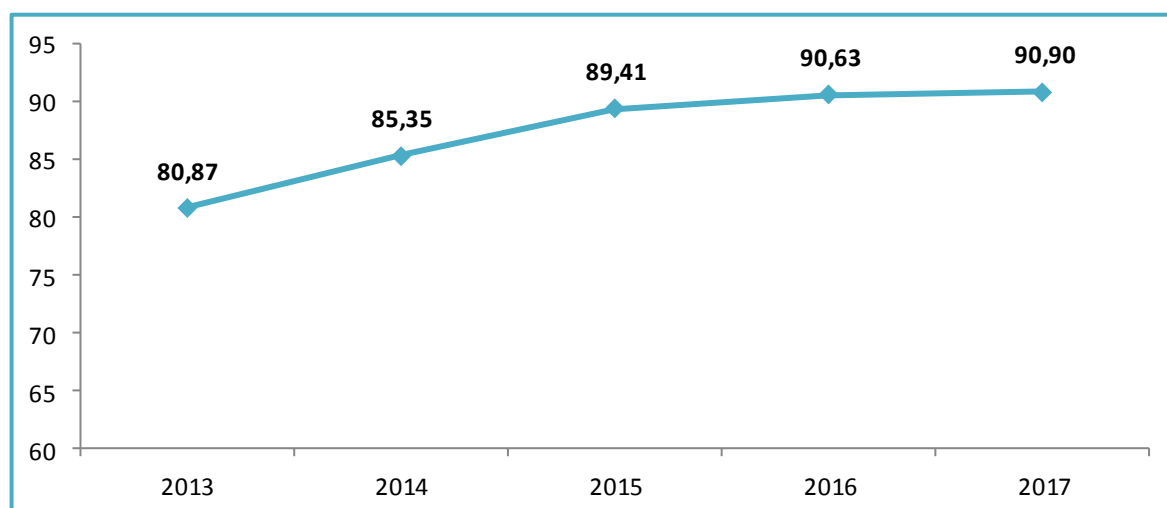
Tabel 2.13
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
di Kalimantan Timur Tahun 2015-2017 (%)

No.	Sumber Air Minum	2015	2016	2017
1.	Ledeng meteran dan eceran	22,68	19,66	23,40
2.	Air kemasan dan air isi ulang	59,57	65,57	68,14
3.	Sumur bor dan sumur terlindungi	7,15	5,91	4,76
4.	Sumur tak terlindung, mata air terlindung/tak terlindungi, sungai air hujan dan lainnya	10,59	8,85	3,66

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Persoalan cakupan layanan air minum yang belum optimal, membuat masyarakat lebih memilih air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini terlihat pada tabel di atas, cakupan sumber air minum berupa air kemasan dan air isi ulang memiliki persentase tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Grafik 2.21
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 9 perusahaan air minum tersebar di kabupaten/kota dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

Selain mengukur kualitas bangunan perumahan, kinerja pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dapat dilihat dari akses dan kualitas sanitasi. Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik.

Tabel 2.14
Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017

Fasilitas Perumahan	2015	2016	2017
Jamban sendiri	89,71	89,75	91,76
Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	70,08	77,66	76,56

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Pada tahun 2017, sebagian besar RT telah mempunyai jamban sendiri sebesar 91,76% dari total RT keseluruhan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, proporsi RT yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebesar 76,56%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping fasilitas sanitasi, akses air bersih juga menjadi salah satu indikator rumah layak huni. Pada tahun 2016, rumah tangga yang mendapat akses air minum layak mencapai 92,25% dari total rumah tangga, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun 7,75% sisanya belum dapat mengakses air minum layak.

Tabel 2.15
Penanganan Sampah dan Sampah Terangkut per Hari

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% Penanganan sampah	-	75,24 %	77,5 %	78,5 %	72,29 %	67,62 %
% Sampah terangkut per hari	-	-	65,95 %	64,61 %	71,19 %	65,62 %

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Penanganan sampah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2018. Begitu juga dengan persentase sampah yang terangkut pada jangka waktu tahun yang sama. Berbasis data tersebut, maka persoalan yang dihadapi oleh Kalimantan Timur adalah belum optimalnya penanganan pesampahan. Menurut hasil FGD persoalan ini disebabkan oleh belum adanya TPA regional dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Meskipun belum memiliki TPA Regional, terdapat beberapa TPA di Kabupaten Kota yang bisa dioptimalkan. Namun ada satu kabupaten yang belum memiliki TPA, yaitu Mahakam Ulu. Berikut adalah sebaran lokasi TPA dan sistem operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.16
Sebaran Lokasi TPA dan Sistem Operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Sistem Operasional TPA	Luas TPA (Ha)
Balikpapan	Manggar	<i>Control Landfill</i>	±28
Samarinda	Bukit Pinang	<i>Open Dumping</i>	±9,5
	Sambutan	<i>Control Landfill</i>	±30
Bontang	Bontang Lestari	<i>Control Landfill</i>	±15 (aktif 6 ha)
Paser	Janju	<i>Control Landfill</i>	10,499
	Batu Sopang	<i>Control Landfill</i>	±2 (rencana menjadi 5 ha)
Penajam Paser Utara	Buluminung	<i>Control Landfill</i>	±10
Kutai Timur	Batotak	<i>Control Landfill</i>	±12
Kutai Kartanegara	Bekotok	<i>Open Dumping</i>	±4
Kutai Barat	Belau	<i>Control Landfill</i>	±15
Berau	Bujangga	<i>Control Landfill</i>	±10
Mahakam Ulu	-	-	-

Sumber: Data Sektoral Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika ditinjau dari prasarana persampahan, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Dari 11 TPA yang ada, dua diantaranya masih menggunakan sisten *open dumping* yaitu TPA Bukit Pinang di Samarinda dan TPA Bekotok di Kutai Kartanegara, sedangkan 9 TPA lainnya sudah menggunakan sistem *Control Landfill*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, proses akhir sampah idealnya dilakukan

dengan metode *control landfill*, *sanitary landfill* dan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, proses akhir sampah dengan metode *open dumping* harus segera diganti minimal dengan metode *control landfill*. Meskipun demikian, metode *control landfill* ini merupakan metode antara sebelum mampu menerapkan sistem *sanitary landfill*. Oleh karena itu, perbaikan metode pemrosesan akhir sampah perlu untuk diperbaiki terutama pada TPA yang masih menggunakan metode *open dumping*. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Dari aspek pengendalian daya rusak air, dua fenomena utama yang menjadi fokus perhatian adalah pengendalian banjir dan abrasi. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai prediksi luas genangan banjir di seluruh wilayah Kaltim.

Tabel 2. 17
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai	Sungai Mahakam	500

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
	Barat		
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Selain disebabkan oleh faktor geografis masing-masing Kabupaten/Kota, intensifnya kegiatan pembangunan diikuti pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya frekuensi banjir di wilayah Kaltim. Salah satu kondisi riil yang terlihat adalah banyaknya aktivitas penduduk di atas badan sungai yang menyebabkan alur sungai semakin sempit dan sedimentasi semakin intensif. Drainase perkotaan juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi sementara kegiatan Operasi dan Pemeliharaan belum cukup memadai.

Upaya pengendalian banjir secara struktural kerap terkendala permasalahan sosial terutama pada proses pengadaan lahan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga masih jauh dari harapan. Sejatinya jika volume sampah dan sedimentasi yang masuk ke sungai dan saluran drainase dapat dikurangi maka frekuensi kejadian banjir baik dari sisi durasi maupun tinggi genangan dapat sedikit direduksi. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara menjaga lingkungan dengan penurunan risiko banjir merupakan upaya yang terus dilakukan dengan harapan mengurangi kebiasaan buruk masyarakat yang membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Posisi geografi Provinsi Kalimantan Timur memberi konsekuensi wilayah ini memiliki potensi Abrasi. Hingga saat ini infrastruktur pengendali abrasi belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 35.370 m garis pantai di Kaltim dalam kondisi kritis. Dari total panjang pantai kritis tersebut baru 9.086 m yang ditangani. Jika dikonversi menjadi luasan, wilayah pantai kritis yang belum tertangani mencapai 1.601 Ha.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036. Adapun 8 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur yang telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten/ Kota lebih dulu sebelum ditetapkannya Perda RTRWP, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Sementara untuk Kabupaten Berau, baru menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu yang saat ini masih berproses pengajuan Persetujuan Subtansi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Adanya perbedaan waktu dalam menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota dengan Provinsi menyebabkan masih terdapat perbedaan dalam menetapkan peruntukan pola ruang. Terhadap perbedaan tersebut, perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW. Adapun tabel dibawah ini .

Tabel 2.18
Data Progres Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/ Kabupaten / Kota

No	RTRW Kabupaten / Kota	Tahun PK	Progres Pelaksanaan PK RTRW											Permasalahan
			Persiapan	SK Penetapan PK	SK Tim PK	PK	Rekom PK	Revisi	Rekom Gub	Persub ATR	DPRD	Evaluasi Provinsi	PERDA	
1	Kota Balikpapan	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2017	-	-	-	-	-	Target 2018 : Rekom Gub dan Persub ATR
2	Kota Bontang	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2016	Tahun 2017	-	-	-	-	Proses pengajuan Persub ATR, namun terkendala belum ada kesepakatan pola ruang dengan PT. PKT sebagai stakeholder di Bontang
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	2017	2017	√	√	2017	Revisi	-	-	-	-	-	-	Sudah review RTRW tahun 2017 (kajian awal), SK Rekom Hasil PK: No 407/SK-BUP/HK/2017 tanggal 27 Desember 2017
4	Kabupaten Kutai Barat	2017	2018	√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	-	ada di presentasi Rakor BKPRD 2017 dan Surat Laporan 644/644/DPUPR-KB/IV/2018
5	Kota Samarinda	2018	2018	√	√	2018	-	-	-	-	-	-	-	PK mulai dari Februari 2018, SK Penetapan dan SK Tim sedang disusun
6	Kabupaten PPU	2018	2017	√	√	2019	-	-	-	-	-	-	-	sudah review RTRW tahun 2017 (kajian awal)
7	Kabupaten Kutai Timur	2020	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											
8	Kabupaten Paser	2019	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											TA 2018 melakukan Review RTRW (kajian awal PK)
9	Kabupaten Berau	2021	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											

Selain melakukan pengawalan terhadap Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Perda RTRWK/K maupun PK RTRWK/K, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui TKPRD juga melakukan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai turunan dari Perda RTRWP. Namun dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen RTR KSP mengalami beberapa kendala diantaranya belum tersedianya peta dasar skala rinci yang dibutuhkan, yaitu skala 1:25.000 – 1:5.000 dan perlunya melakukan penyesuaian materi teknis yang telah disusun terhadap beberapa KSP dengan mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016.

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan belum menyusun dokumen terkait arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, serta arahan pelanggaran sanksi sebagai kendali pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk meningkatkan kualitas bangunan di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan peningkatan sistem pengawasan konstruksi bangunan. Sistem pengawasan ini terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang belum terpenuhi.

Tabel 2.19
Data Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi Prov. Kaltim
Tahun 2017

No	Indikator	Jumlah
1	Tenaga Kerja Konstruksi	83.247 orang
2	Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat	20.526 orang
3	Tenaga Kerja Konstruksi Belum Bersertifikat	62.721 orang
4	Jumlah Badan Usaha	5.793 orang
5	Tenaga Kerja Ahli K3	145 orang
5	Jumlah Minimal Tenaga Ahli K3	11.586 orang

Sumber: Bina Konstruksi, 2018

Data terkait sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang sudah tersertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian LPJ Kalimantan Timur
Tahun 2017

No	Kualifikasi	Jumlah
Sertifikat Keterampilan		
1	Kelas I	1.578
2	Kelas II	166
3	Kelas III	122
TOTAL		1.866
Sertifikat Keahlian		
1	Madya	1.094
2	Muda	688
TOTAL		1.782

Sumber: Bina Konstruksi, 2018

Jumlah tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikat mencapai 1.866 orang dan tenaga ahli mencapai 1.782 orang. Selain untuk memenuhi jumlah ideal tenaga ahli, peningkatan keahlian tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengatasi kemungkinan kegagalan pembangunan, kegagalan konstruksi, bahkan penyimpangan ke ranah hukum. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah mengharapkan jumlah tenaga ahli dan terampil meningkat melalui pembagian tugas pengembangan oleh pemerintah daerah dan kabupaten/kota.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-13 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Adapun kondisi perumahan dan kawasan pemukiman di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Luas Kawasan Pemukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan
Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Pemukiman Eksisting	Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman
Samarinda	12.910,00	39.156
Kutai Kartanegara	9.558,62	63.928
Bontang	3.024,09	7.775
Kutai Timur	9.906,89	79.923
Berau	5.818,32	76.643
Balikpapan	8.905,67	25.318
Penajam Paser Utara	3.342,19	27.123
Paser	3.944,22	62.298
Kutai Barat	1.359,78	11.311
Mahakam Ulu	138,94	2.790
Total	58.908,76	396.265

Sumber : RTRW Prov. Kaltim 2016-2036

Luas kawasan peruntukan pemukiman mencapai 396.265 Ha. Pada tahun 2017, luas kawasan pemukiman eksisting sebesar 58.908,76 Ha atau 14,87 persen dari total luas kawasan peruntukan pemukiman. Sebagian besar kawasan pemukiman berada di Kota Samarinda (12.910 Ha) yang mencapai 21,9 persen dari total luas kawasan pemukiman.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun khususnya di wilayah perkotaan memberikan dampak terhadap kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh perkembangan perumahan maka akan terjadi *backlog* dimana seringkali angka pertumbuhan penduduk lebih besar daripada ketersediaan perumahan.

Tabel 2.22
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur dari
Tahun Awal Rencana

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2017			Tahun 2018	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah	Backlog	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi Kebutuhan Rumah
1	Paser	37.056	28.363	8.693	80.863	43.807
2	Kutai Barat	21.548	17.711	3.837	32.040	10.492
3	Kutai	128.023	104.405	23.618	225.278	97.255

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2017			Tahun 2018	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah	Backlog	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi Kebutuhan Rumah
	Kartanegara					
4	Kutai Timur	17.249	12.740	4.509	139.762	122.513
5	Berau	83.549	66.413	8.800	87.973	4.424
6	Penajam Paser Utara	43.005	34.730	7.490	48.389	5.384
7	Mahakam Hulu	612	529	83	5.822	5.210
8	Balikpapan	161.892	112.086	49.806	169.106	7.214
9	Samarinda	204.605	144.370	51.069	233.001	28.396
10	Bontang	37.565	26.072	11.493	49.859	12.294
TOTAL		735.104	547.419	169.398	1.072.094	336.990

Sumber: Laporan Akhir RP3KP Prov Kaltim, 2018

Angka backlog diatas merepresentasikan kebutuhan rumah untuk keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga khususnya yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya. Tantangan pemerintah dalam pengurangan backlog adalah harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih bermukim di area kumuh dan tidak layak huni.

Tabel 2.23
Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
1.	Balikpapan	224,86	153,5
2.	Samarinda	133,33	63,68
3.	Kutai Timur	75,93	-
4.	Bontang	73,56	47,43
5.	Kutai Kartanegara	172,67	11,68
6.	Berau	184,30	66,3
7.	Penajam Paser Utara	49,07	-
8.	Paser	10,68	10,68
9.	Kutai Barat	488,59	-
Total		1412,99	353,27

Sumber: SK Kumuh Kab Kota 2018

Total kawasan pemukiman kumuh yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Bupati/Walikota sebesar 1.412,99 Ha. . Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Rendahnya akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni juga disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penataan pemukiman. Sampai tahun 2018, sudah tertangani 353.27 Ha dari luas kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan masih tersisa seluas 1.059,72 ha.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Data mengenai rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Tabel 2.24
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur
dari Tahun Awal Rencana

No	Kabupaten/kota	Rumah Tangga Tahun 2017	Unit Rumah Tahun 2017	Backlog Tahun 2017	Rumah Tangga Tahun 2038	Demand Rumah Th 2038
1	Paser	37.056	28.363	8.693	80.863	43.807
2	Kutai Barat	21.548	17.711	3.837	32.040	10.492
3	Kutai Kartanegara	128.023	104.405	23.618	225.278	97.255
4	Kutai Timur	17.249	12.740	4.509	139.762	122.513
5	Berau	83.549	66.413	8.800	87.973	4.424
6	Penajam Paser Utara	43.005	34.730	7.490	48.389	5.384
7	Mahakam Hulu	612	529	83	5.822	5.210
8	Balikpapan	161.892	112.086	49.806	169.106	7.214
9	Samarinda	204.605	144.370	51.069	233.001	28.396
10	Bontang	37.565	26.072	11.493	49.859	12.294
TOTAL		735.104	547.419	169.398	1.072.094	336.990

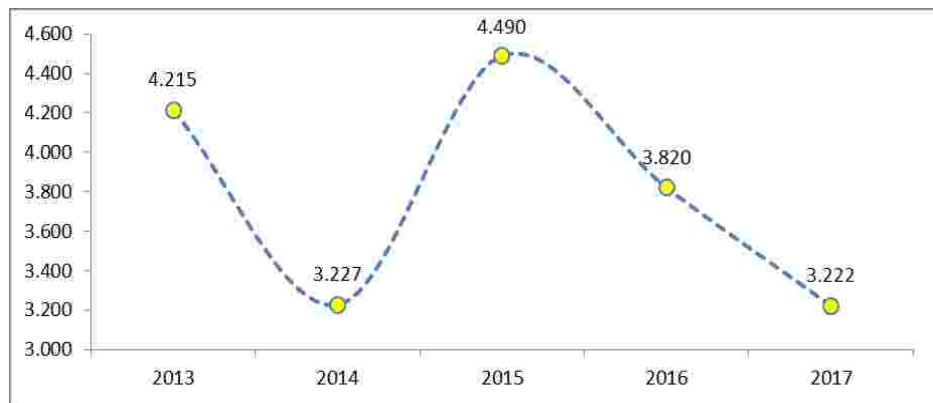
Sumber: Laporan Akhir RP3KP Prov Kaltim, 2018

Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu rumah. Dengan demikian di Provinsi Kalimantan Timur masih dibutuhkan pembangunan rumah sebanyak 169.398 unit.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan rendahnya penanganan tingkat kebencanaan.

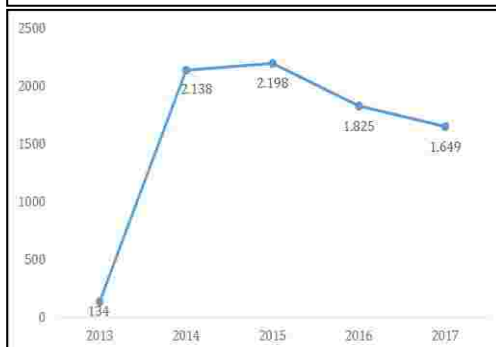
Gambar 2. 22
Jumlah Kejadian Kriminal di Kalimantan Timur



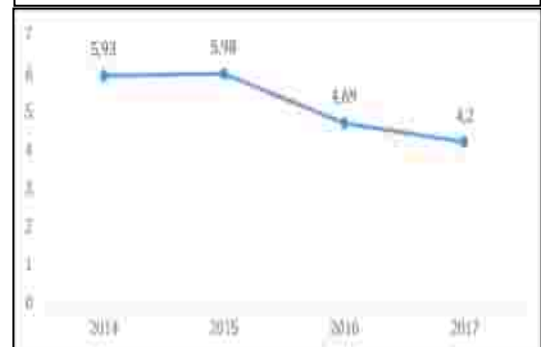
Sumber : Polda Kaltim

Permasalahan lain dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah kecenderungan penurunan ketersediaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 23
Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Gambar 2. 24
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jumlah Satpol PP di Kalimantan Timur pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 134 personil pada tahun 2013 menjadi 2.138 personil pada tahun 2014. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing menjadi 1.825 dan 1.649 personil. Rasio Polisi Pamong Praja per satuan penduduk per 10.000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 0,84 persen, selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2017.

Gambar 2. 25
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Begitu juga dengan jumlah petugas Linmas yang saat ini mengalami penurunan. Padahal Sat Linmas berfungsi untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan.

f. Sosial

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Provinsi Kalimantan Timur mengalami permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kondisi tersebut disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar daerah. Kinerja pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal karena peningkatan PMKS tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dan tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih terdapat 54 ribu keluarga Pra Sejahtera atau keluarga sangat miskin/fakir miskin. Sebagian besar penduduk fakir miskin berada di kawasan perkotaan, yaitu di Kota Samarinda (29,0% dari total keseluruhan Kaltim), Kota Balikpapan (21,3%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (20,5%).

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah PMKS	Orang	120,971	113,807	113,807	247,167	243,459	I.1
2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	0.02	0,02%	0,02%	0.01	31.09	I.1
3	PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	355,636	355,636	355,636	7,869	76	I.1
4	PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	23,69	14,12	14,12	54,67	99,60	I.1
5	Jumlah PMKS yang ditangani	Orang	26	26	26	26	75,696	I.1
6	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	125	I.1
7	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7,368	7,296	7,296	7,256	5.469	I.1
8	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	4	I.1
9	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	210	I.1

Sumber: Dinas Sosial Prov.Kaltim

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Koperasi dan UKM

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2013, jumlah koperasi sebesar 5.916 unit dan menurun menjadi 5.184 unit di tahun 2017. Hal ini dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah di Kalimantan Timur dan membentuk Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, imana ada beberapa Kabupaten/Kota yang sebelumnya berada di Provinsi Kalimantan Timur

masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu menyebabkan Jumlah Koperasi dan juga mempengaruhi beberapa Indikator lainnya mengalami penurunan.

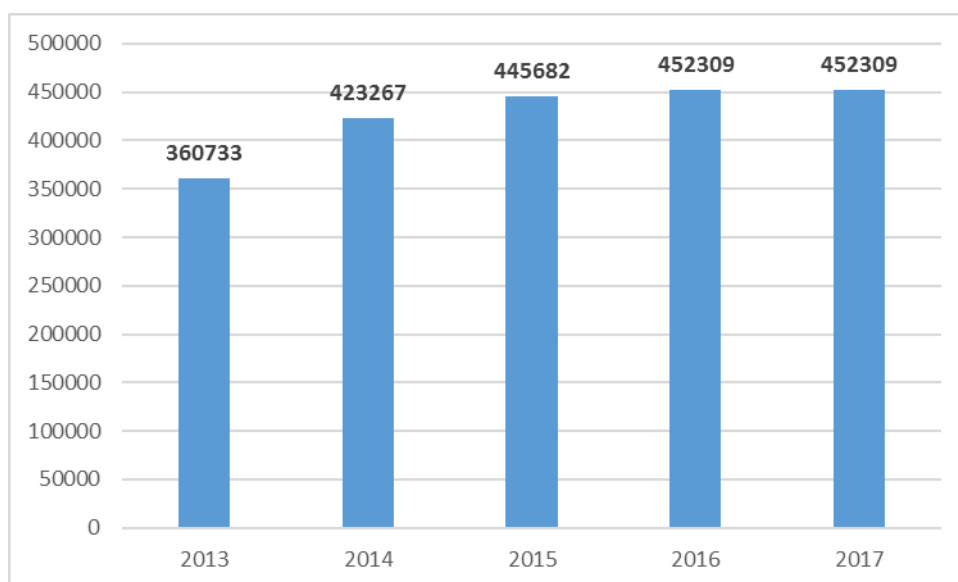
Tabel 2. 26
Perkembangan Koperasi Tahun 2013 s.d 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi (Unit)	5,919	5,283	5,407	5,546	5,184
2	Persentase Koperasi Aktif (%)	66.73	72.7	67.99	64.08	71.05
3	Koperasi RAT (unit)	1,809	892	828	792	665
4	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (%)	91.87	23.22	22.52	21.5	18.06
5	Jumlah Anggota (orang)	390,360	344,310	341,269	299,068	121,455
6	Modal Sendiri (Rp Milyar)	361,686	577,062	691,816	783,438	637,694
7	Modal Luar (Rp Milyar)	1,156,218	1,439,290	1,291,882	996,328	531,331
8	Volume Usaha (Rp Milyar)	1,628,842	2,298,383	2,511,087	2,186,346	1,042,484
9	Sisa Hasil Usaha (Rp Milyar)	129,230	133,415	230,980	153,682	78,493
10	Jumlah Manager (orang)	397	290	273	237	149
11	Jumlah Karyawan (orang)	7,622	5,943	5,374	6,641	2,590

Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim tahun 2018

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, jumlah UMKM sebesar 360.733 unit meningkat mejadi 452.309 unit pada tahun 2017.

Gambar 2. 26
Jumlah UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017



b. Tenaga Kerja

Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja. Variabel yang dapat digunakan untuk melihat kondisi baik atau buruknya ketenagakerjaan di suatu daerah adalah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Kesempatan Kerja. Kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun masih menghadapi permasalahan terkait daya saing tenaga kerja.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	%	15,55	40,61	22,12	20,03	22,61	11.8
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,53	63,48	62,39	67,79	63,75	11.8
3	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58,48	58,7	57,71	62,4	59,35	11.8
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	18,105	13,080	7,078	5,982	10,365	11.8
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	292,582	322,064	385,796	358,826	449,465	11.8
6	Rasio lulusan S1/S2/S3							1.4

Sumber : BPS Prov.Kaltim dan Dinas Tenaga Kerja Prov.Kaltim

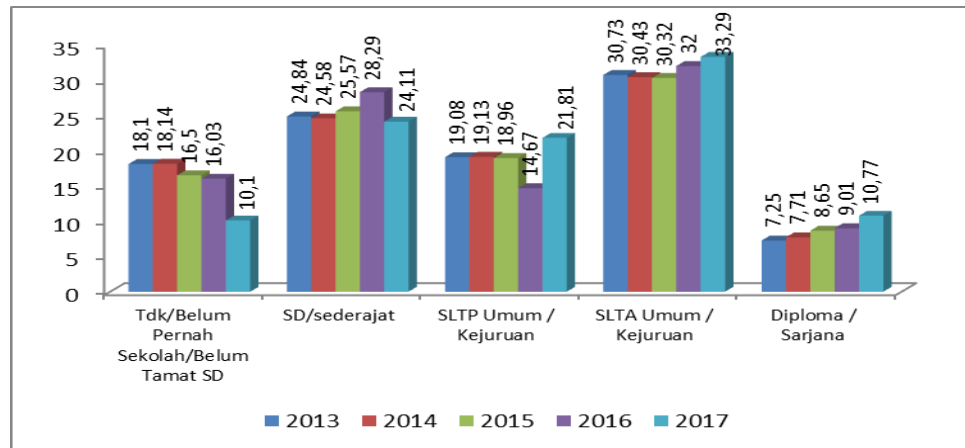
Angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat selama 5 tahun terakhir, dengan daya saing yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar hanya lulusan pendidikan menengah.

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
di Kalimantan Timur, 2012 - 2017

Uraian Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	1.777.381	1.497.572	1.537.938	1.539.491	1.717.892	1.654.964
Bekerja	1.619.118	1.378.610	1.421.952	1.423.957	1.581.239	1.540.675
Pengangguran	158.263	118.692	115.986	115.534	136.653	114.289
Bukan Angkatan Kerja	889.718	859.778	884.603	928.020	816.221	941.028
Sekolah	246.473	263.369	271.956	272.331	203.316	247.456
Mengurus RT	557.100	526.867	521.681	560.800	535.158	612.093
Lainnya	66.145	69.542	90.966	94.889	77.747	81.479

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

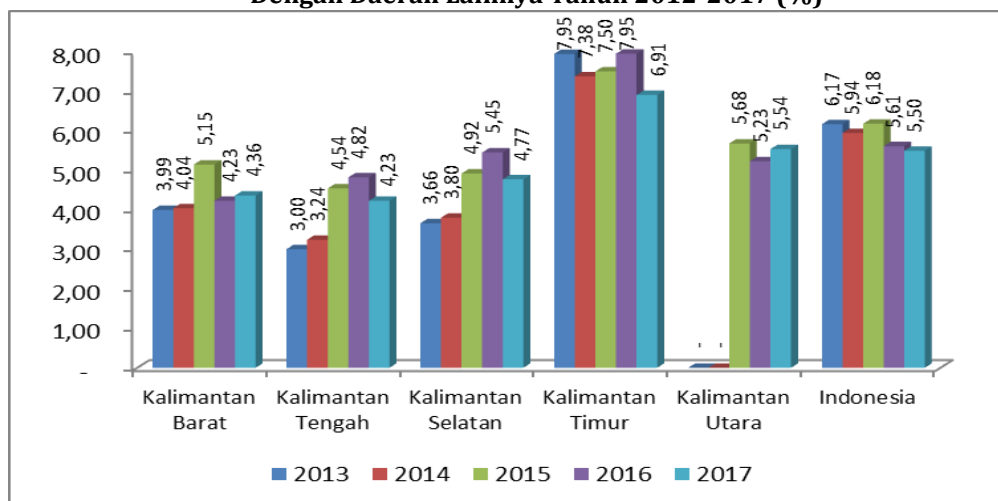
Gambar 2. 27
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : BPS Prov.Kaltim 2017

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator paling penting untuk mengetahui daya saing tenaga kerja karena berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Pengembangan perekonomian Kaltim berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang masuk dari daerah lain, ditambah dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor ekonomi padat karya, hal ini semakin memperbesar tingkat pengangguran terbuka.

Gambar 2. 28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Dengan Daerah Lainnya Tahun 2012-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

c. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

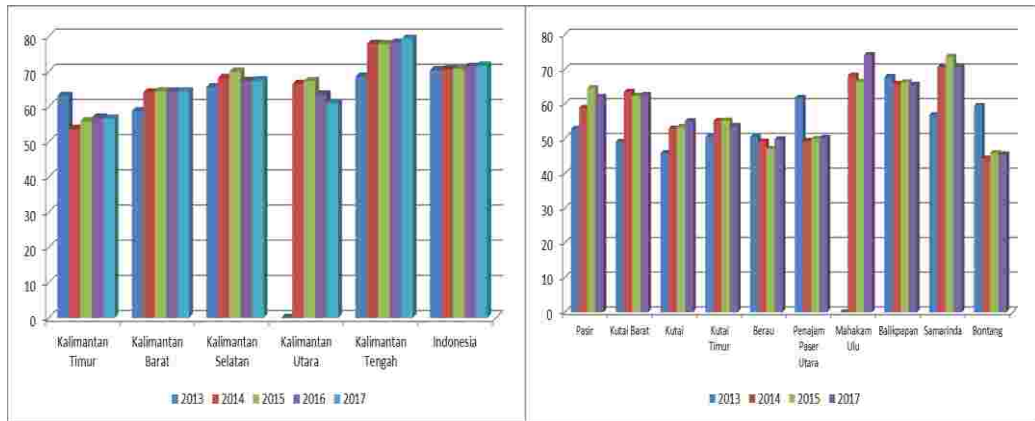
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Capaian IDG Provinsi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perbandingan lainnya dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63.12	53.74	55.96	56.93	65.64	1.5
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84.69	84.75	85.07	85.6	85.62	1.5
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	39.53	39.63	40.52	39.37	44.86	1.5
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39.95	42.26	48.93	47.69	42,33	1.5
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%			36.36	36.36		1.5
6	Rasio KDRT	%		12	1	7.12		1.5
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%						1.5
8	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30,978	30,927	30,927	11,510		1.5
9	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	90.90	79.60	79.60	91.30	90.10	1.5

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Prov.Kaltim

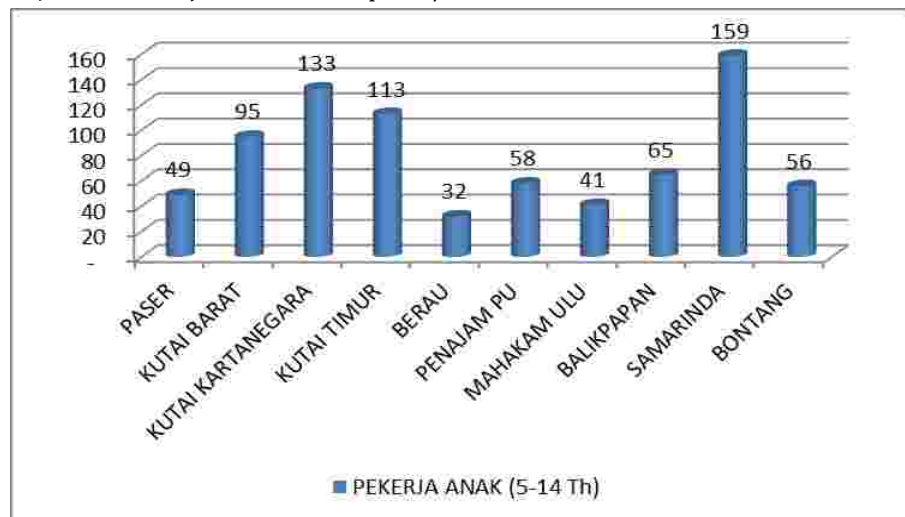
Gambar 2. 29
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Nasional

Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Dari 10 kabupaten/kota, 9 daerah sudah menjadi pengembang kota/kabupaten layak anak. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda memiliki jumlah pekerja anak yang cukup besar.

Gambar 2. 30
Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K 2017

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Belum optimalnya pengembangan desa mandiri, karena Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa. Faktor yang

berpengaruh adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping desa di daerah pedalaman, belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes, masih rendahnya koordinasi lintas sektor terhadap pembangunan desa.

Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi aparatur desa, belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan aparatur pemerintah desa.

e. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan khususnya beras dan daging di Provinsi Kalimantan belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ketahanan pangan berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan utama, akses atau distribusi pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Berbagai indikator tersebut berhubungan erat dengan urusan kesehatan dan rumpun urusan ekonomi yang menjadi basis bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2. 30
Rasio Pemenuhan Beras/Kebutuhan Konsumsi Beras
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi (GKG) (ton)	Beras Tersedia (ton)	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus/Minus (ton)	Ketersediaan (%)
1.	2013	3.275.844	439.439	275.704	373.446	-97.742	73,83
2.	2014	3.351.432	426.467	267.565	382.063	114.498	70,03
3.	2015	3.426.638	408.782	256.470	390.637	134.167	65,65
4.	2016	3.501.232	305.337	191.568	399.140	207.572	48,00
5.	2017	3.575.449	400.102	251.024	407.601	156.577	61,59

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Ketersediaan pangan terdiri dari pangan utama yang dikonsumsi masyarakat. Pada umumnya beras menjadi salah satu komponen dalam indikator tersebut. Ketersediaan pangan berkorelasi dengan stok cadangan pangan daerah. Ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur

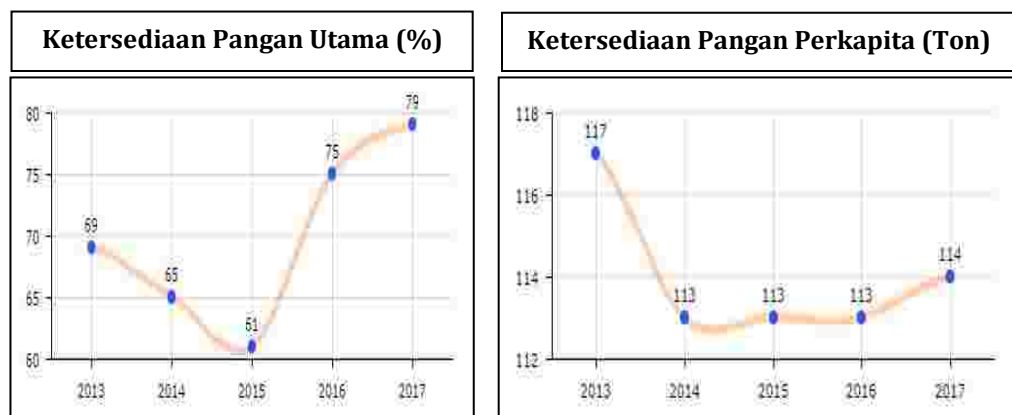
tetap harus ditingkatkan karena sebagian besar pangan utama berasal dari luar daerah.

Sampai tahun 2017, konsumsi beras per kapita di Kalimantan Timur sebesar 114 kg/kap/tahun, dan rasio pemenuhan beras lokal mencapai 61,54 % sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 Tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi 89,79 kg/kap/tahun, sehingga tingkat pemenuhan beras di Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 73,53%. Tingkat konsumsi beras per kapita di Kalimantan Timur ini berada dibawah rata-rata nasional yaitu 92 kg/kap/tahun.

Stok beras di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Beras dari dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerah dikarenakan tingkat produksi yang fluktuatif karena sebagian besar berasal dari sawah tadah hujan. Umur padi yang panjang juga menjadi penentu stok pangan beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur. Belum optimalnya stok cadangan pangan beras menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab bagi ketersediaan pangan utama.

Ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadi perhatian utama untuk diintervensi oleh Pemerintah, karena erat dengan persoalan kemiskinan. Pemenuhan terhadap ketersediaan pangan per kapita secara merata dapat mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pangan.

Gambar 2. 31
Ketersediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas_Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Penyebab lain masih rendahnya akses pangan di Provinsi Kalimantan Timur karena sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur ke sentra pertanian. Panjangnya rantai distribusi pangan dari luar daerah maupun ke dalam daerah juga menjadi penyebab. Lebih dari 40% pedagang mendatangkan dari luar daerah yaitu dari Jawa dan Sulawesi kemudian didistribusikan ke pedagang menengah dan pengecer atau langsung pengecer.

f. Pertanahan

Urusan pertanahan termasuk urusan yang penting dalam pembangunan daerah, terutama pada unsur aset, legalitas, hingga adanya persoalan konflik pertanahan. Adanya konflik pertanahan yang perlu menjadi perhatian di Kalimantan Timur adalah terkait batas wilayah dan konflik tumpang tindih perijinan.

g. Lingkungan Hidup

Dalam konteks rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Timur sangat serius dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dalam lima tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

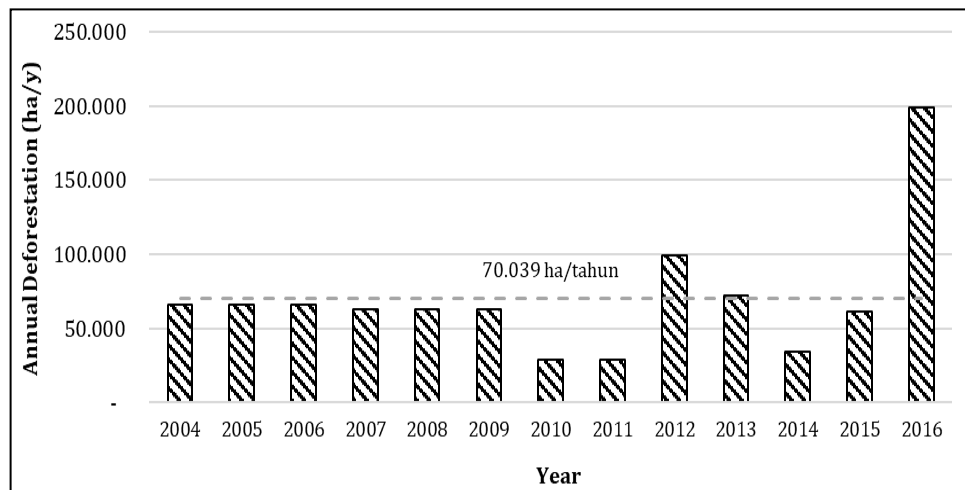
No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		72.41	75.24	81.97	83.03	82.64	
2	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	%	0.02	0.65	1.01	1.95	1.38	III.13
3	Indeks kualitas air sungai		7.59	3.04	2	3		III.14
4	Penegakan hukum lingkungan	%	86.21	86.36	100	100	100	IV.16
5	Persentase sampah terangkut per hari	%	64.61	90.33	66.43	87.51		III.11
6	Indeks Resiko Bencana							I.1
7	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	ha	45	11,160.25	181,125.00	12,740.00	104.00	III.6
8	Luas lahan terbuka tambang	ha	38,099.98	38,667.32	41,541.58	48,991.69	50,239.88	III.15
9	Luas lahan tambang yang direklamasi	ha	96,877.12	98,666.27	103,072.80	103,041.64	103,786.40	III.15
10	Emisi Gas Rumah Kaca tutupan hutan	ton CO2 Eq	10,276,303.00	23,831,368.00	31,085,172.00	19,725,868.92	19,433,145.44	III.15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim

Kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur selain mengedepankan kemajuan sosial dan ekonomi juga berwawasan lingkungan.

Indeks tutupan hutan mengalami penurunan, persoalan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingginya alih fungsi hutan dan lahan, tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik, tingginya pencemaran udara, dan masih tingginya angka emisi GRK. Penurunan indeks tutupan hutan sejalan dengan kenaikan semakin tingginya laju deforestasi. Laju deforestasi Kalimantan Timur menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada tahun 2016. Terdapat lebih dari 7 juta ha hutan yang mengalami deforestasi.

Gambar 2. 32
Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017.

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan yang ditandai dengan menurunnya indeks tutupan hutan dan meningkatnya laju deforestasi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: rendahnya pengawasan kawasan lindung, tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha dan rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi terutama masih rendahnya reklamasi lahan tambang dan revegetasi kawasan lindung di Kalimantan Timur.

Besarnya emisi gas rumah kaca menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 hingga 2017 emisi GRK menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun saat ini sudah disusun berbagai kebijakan penanganan yang melibatkan multi-pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masih tingginya emisi GRK di Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah, masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi, masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME dan masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%.

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki area cadangan karbon tinggi seluas 53.000 ha, sedangkan area cadangan karbon rendah seluas 1.462.000 Ha. Pada konteks penerapan penggunaan biodiesel, hingga saat ini terdapat 2 perusahaan pertambangan yang menerapkan B20 (Biodiesel 20%) PKB2B yaitu Berau Coal dan KPC.

h. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang dan jasa di suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Pelayanan perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja pembangunan bidang perhubungan selama lima tahun terakhir.

Laju pertumbuhan penggunaan kendaraan angkutan umum cenderung menurun, jumlah pengguna angkutan umum mencapai 15,6% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya peralihan penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi. Hal tersebut menyebabkan sejumlah terminal tidak mengalami peningkatan jumlah penumpang, rata pada periode 2013-2017.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perhubungan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2,013,727	2,233,278	2,376,033	2,398,117	2,428,324	III.11
2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1,094	1,228	867	667	977	I.3
3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7.81	7.09	7.12	6.89	6.51	II.9
4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10,913,500	10,913,500	9,241,800	12,127,125	10.232.985	III.11
5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	687,407	456,539	209,854	223,305	256,425	III.11
6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	613,991	375,124	193,981	229,755	249,352	III.11
7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3,642,539	3,791,629	3,945,625	4,025,784	4,216,892	III.11
8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3,593,269	3,955,136	3,693,028	*		III.11
9	Jumlah penumpang yang terlayani	Orang	25,565,418	26,035,007	22,120,061	24,129,407	22,861,863	III.11
10	Jumlah barang	ton	1,723,350,543	834,348,907	2,637,670,927	2,440,221,930	2,329,974,117	III.11
11	Rasio ijin trayek	%	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	IV.16
12	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	145,670	145,701	145,701	152,564	152,788	IV.16
13	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	49	44	44	44	46	II.9
14	Persentase layanan angkutan darat	%	32,68	31,49	35,49	34,96	36,23	III.11
15	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	unit	850	284	414	1,239	350	II.9
16	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	6,74	2,30	3,47	11,60	3,11	II.9
17	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	7.81	7.09	7.12	6.89	6.51	II.9
18	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	jiwa	20,091,174	20,032,034	19,573,224	21,676,243	20,043,352	III.11

Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

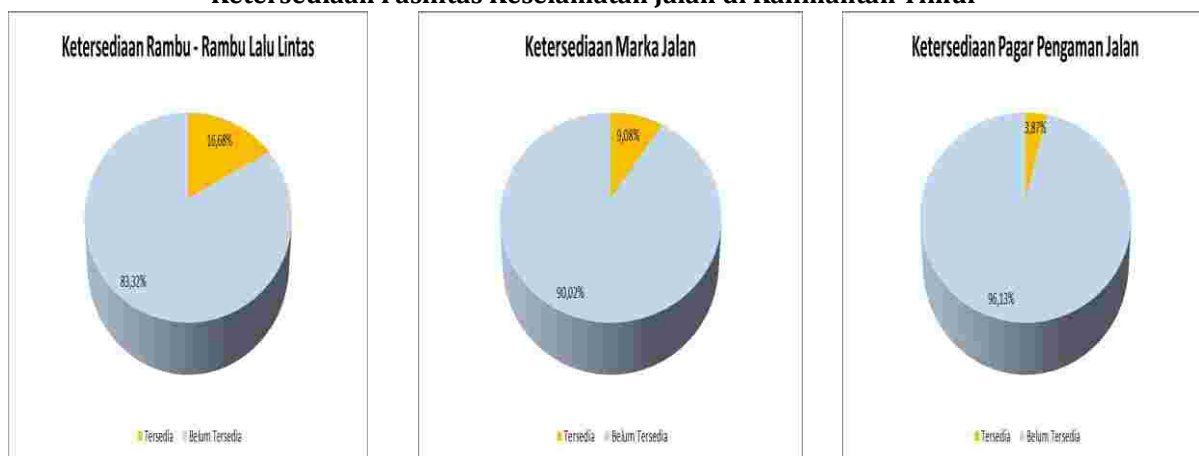
Tabel 2. 33
Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Terminal	23	23	23	23	23	Unit
	1. Kelas A	2	2	2	2	2	Unit
	2. Kelas B	7	7	7	7	7	Unit
	3. Kelas C	10	10	10	10	10	Unit
	4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1.826.522	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	Orang
2.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit
3.	Jumlah Rambu-rambu yang tersedia	851	1.135	1.549	2.472	2.822	Unit
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	850	284	414	923	350	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

Keterbatasan jumlah jembatan timbang merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan daya rusak konstruksi jalan akibat lalu lintas sejumlah angkutan barang dan alat berat di atas 10 ton. Tingkat keselamatan transportasi juga sangat rendah karena bentuk trase jalan yang berkelok dan juga karena rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan pada jalan sepanjang 2.215.500 km.

Gambar 2. 33
Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Timur



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Tingkat keselamatan transportasi sangat minim. Hal tersebut dapat terindikasi dari rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan (2.215.500 km). Selain itu, ketersediaan pagar pengaman jalan hanya 3,87% (3.428 km) dibandingkan dengan total kebutuhan yang mencapai 88.620 km.

Akses pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2013-2017. Jumlah kendaraan roda empat yang terangkut kapal ferry meningkat 42,3%. Selain itu, jumlah orang melalui angkutan penyeberangan sungai juga mengalami peningkatan lebih dari 17% setiap tahunnya.

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pembangunan 4 pelabuhan laut baru yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019/2020 yaitu Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Mantaritip. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% selama periode 2013-2017, dan jumlah barang yang dibongkar muat meningkat lebih dari 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

i. Komunikasi dan Informatika

Seluruh masyarakat kawasan perkotaan di Kalimantan Timur telah terakses oleh layanan jaringan komunikasi dan informasi. Sementara di kawasan perdesaan masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Keterbatasan akses telekomunikasi disebabkan salah satunya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
10.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	II.9
10.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95.34	96.27	97.12	100	100	II.9
10.3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	29.63	37.63	33.46	34.67	32.89	II.9

Sumber : SIDATA, Bappeda Prov.Kaltim

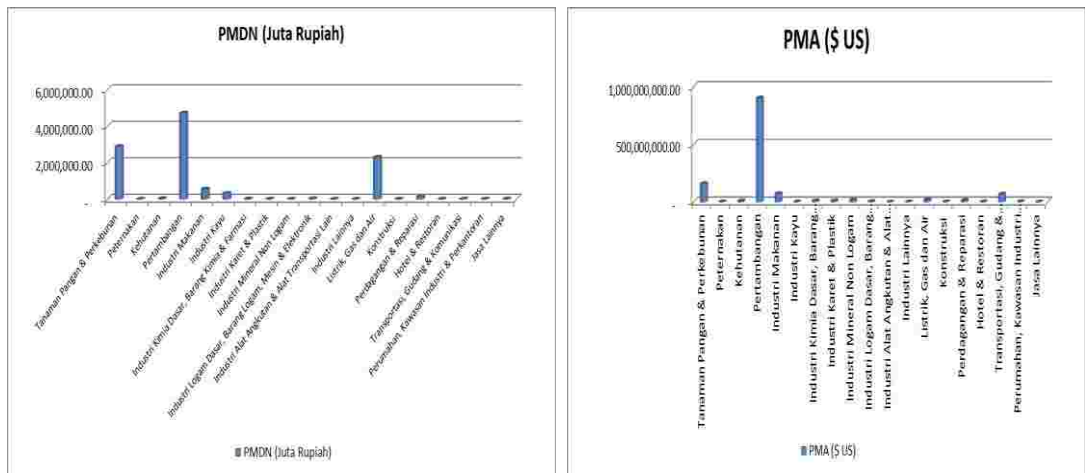
j. Penanaman Modal

Investasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasinya terus meningkat. Hal yang menjadi perhatian adalah sektor perkebunan dan pertambangan yang memiliki daya pikat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18,441,377.30	12,983,049.70	9,611,313.10	6,885,124.60	10,980,216.40	II.8
2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	1.181.859,20	1285215.2	II.8
3	Nilai realisasi investasi	Milliar Rp	30,892	37,873	39,379	1,180,049	28,202.10	II.8
4	Rasio daya serap tenaga kerja		235.62	102.41	161.73	71.75	23.08	II.8
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milliar Rp	10,732	-5,458.32	-3,372	-2,726	4,095.09	II.8

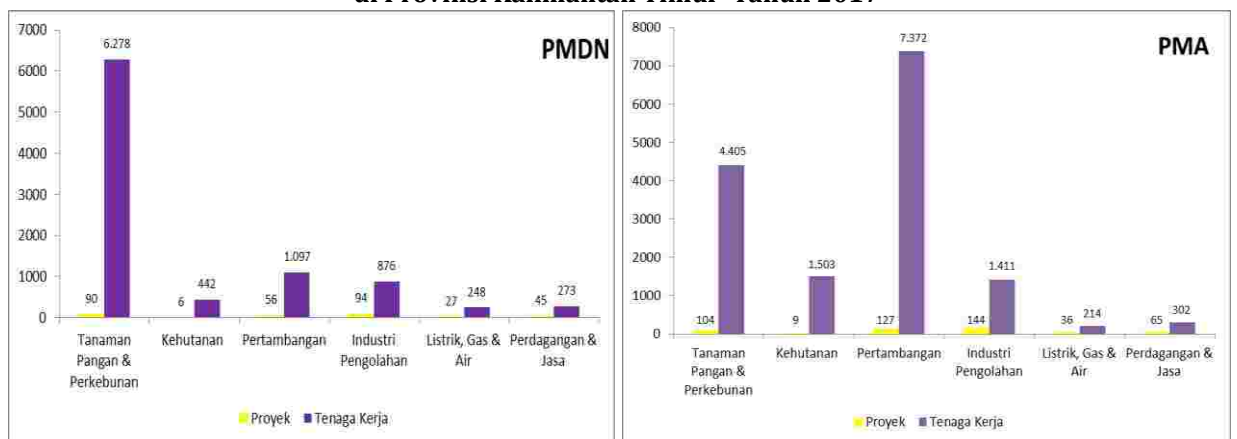
Gambar 2. 34
Realisasi PMDN dan PMA Per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Walaupun investasi di Kalimantan Timur berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB Nasional, namun daya serap tenaga kerja dari investasi tersebut sangat rendah. Dari 3.247 proyek investasi yang dijalankan hanya menyerap 325.633 tenaga kerja dari 1,5 juta angkatan kerja yang bekerja atau 20,66 %. Investasi di bidang Perkebunan yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada proyek PMDN, sementara Pertambangan paling banyak menyerap tenaga kerja pada proyek PMA.

Gambar 2. 35
Daya Serap Tenaga Kerja Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Selain permasalahan nilai investasi yang sudah berjalan, kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan industri di Kariangau Balikpapan, Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU), dan kawasan industri

oleochemical di Maloy Kutai Timur, yang telah disiapkan bagi pengembangan industri belum banyak investor yang memanfaatkan kawasan tersebut. Ketersediaan infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum memadai menjadi salah satu permasalahan dalam menarik investasi di kawasan tersebut.

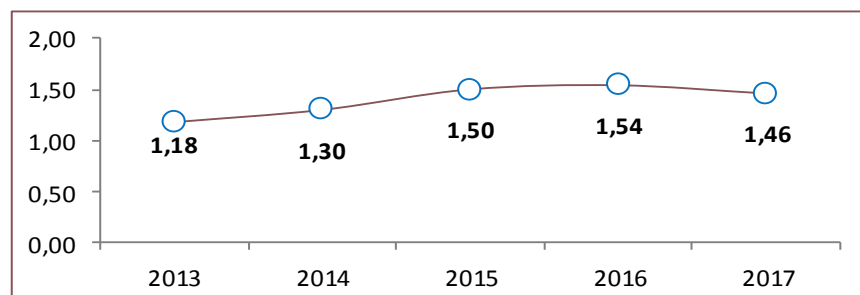
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari berbagai urusan seperti kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata dan berbagai sektor potensial lain yang berparuh terhadap berbagai indikator makro daerah. Urusan pilihan menjadi sektor pengungkit yang sangat potensial dan menjadi *leading* sektor dalam peningkatan perekonomian daerah.

a. Kelautan Dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kaltim selama lima tahun terakhir cenderung meningkat walaupun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,46%.

Gambar 2. 36
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. Produksi perikanan selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan bahkan cenderung menurun. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sistem distribusi pemasaran hasil produksi perikanan yang tidak tercatat dan transaksi langsung di tengah laut

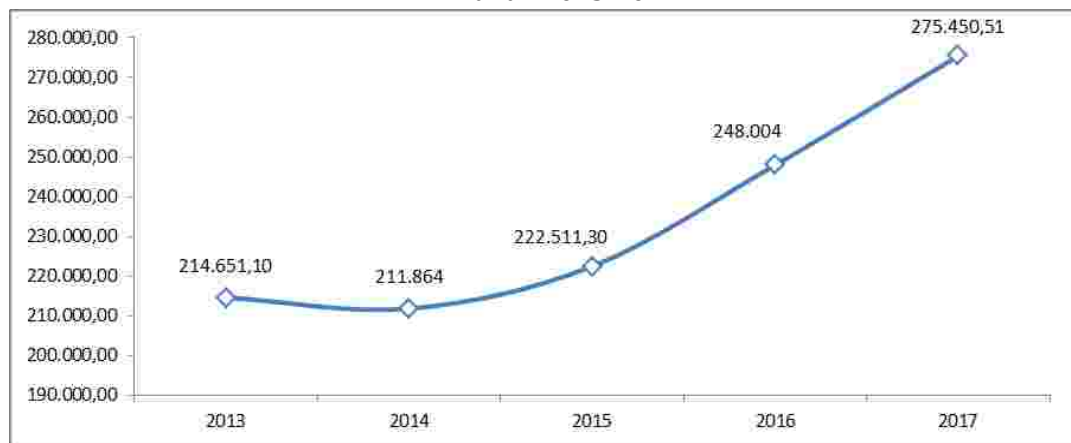
atau sungai. Permasalahan lainnya adalah pada budidaya perikanan terkait dengan perubahan kondisi fisik lahan dan kualitas sumber daya manusia pembudidaya.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi Perikanan	Ton	214,651.10	211,863.50	222,511.30	248,004.20	275,450.51	II.8
2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1.18	1.30	1.50	1.54	1.46	II.8
3	Konsumsi ikan	Kg	1,537,874.00	837,876.00	276,047.00	278,298.00	399,055.00	I.2
4	Cakupan bina kelompok nelayan	%	5.77	6.81	8.81	3.14	3.14	II.8
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	42,202.50	42,273.10	40,557.90	40,558.00	37,583.00	II.8
6	Nilai tukar nelayan	%	88.98	101.46	98.38	99.89	101.37	I.1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2. 37
Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : Sidata Kaltim

b. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian daerah, karena pariwisata dapat mendorong pengembangan aktifitas ekonomi lainnya seperti perdagangan dan jasa dan layanan transportasi.

Pariwisata di Kalimantan Timur belum berkembang secara optimal. Destinasi Pariwisata cukup banyak dengan pola tersebar dan sebagian besar merupakan wisata alam. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Kalimantan Timur membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit karena

wilayah yang sangat luas dan sebaran antar obyek wisata yang saling berjauhan. Namun demikian, jumlah kunjungan wisata cenderung meningkat baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

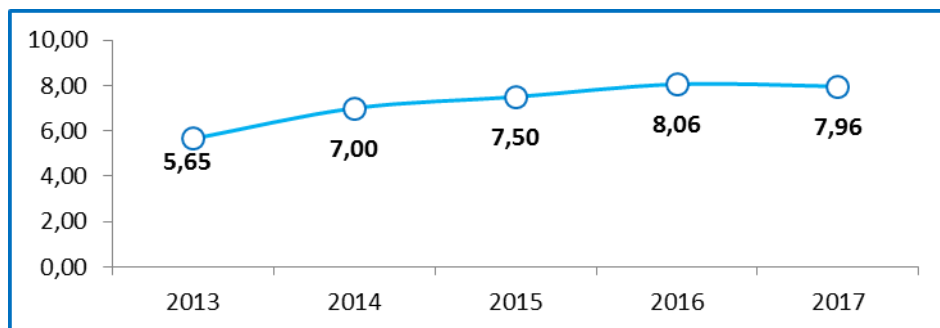
No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	32,973	53,257	49,285	45,211	58,869	11.8
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	1,926,769	3,914,769	4,270,740	3,324,294	7,185,790	11.8
3	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0.66	0.73	0.86	0.95	0.93	11.8

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

c. Pertanian

Pertanian tidak hanya terkait peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, namun juga terkait kesejahteraan petani yang dinilai dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Kinerja sektor pertanian mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB Kaltim mengalami kenaikan mulai tahun 2013 hingga 2017. Walaupun relatif kecil, tetapi hal ini menunjukkan adanya pergerakan transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 38
Kontribusi Pertanian (Dalam Arti Luas) Terhadap
PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi padi	Ton	439,439	426,567	408,782	305,337	356,680	II.8
2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Ton/Ha	4.27	4.25	4.12	3.80	3.78	II.8
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5.65	7.00	7.72	8.22	7.96	II.8
4	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	%	0.30	0.32	0.36	0.31	0.30	II.8
5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2.59	3.75	3.98	4.43	4.49	II.8
6	Nilai tukar petani		95.30	99.93	98.61	98.14	97.16	I.1

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu komoditas tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi. Tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur cukup tinggi yaitu 84,1 kg/kap/tahun walaupun lebih rendah dari rata-rata nasional 150 kg/kap/tahun. Produksi beras lokal belum memenuhi kebutuhan pangan daerah dengan rasio pemenuhan beras lokal mencapai 61,54 % sampai tahun 2017. Permasalahan menurunnya luas tanam padi adalah kondisi fisik lahan potensial tersebar dalam kawasan konservasi hutan, alih fungsi lahan pertanian, dan terbatasnya petani. Tanaman pangan potensial di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas pertanian lahan kering terutama ubi kayu, ubi jalar dan jagung.

Gambar 2. 39
Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)



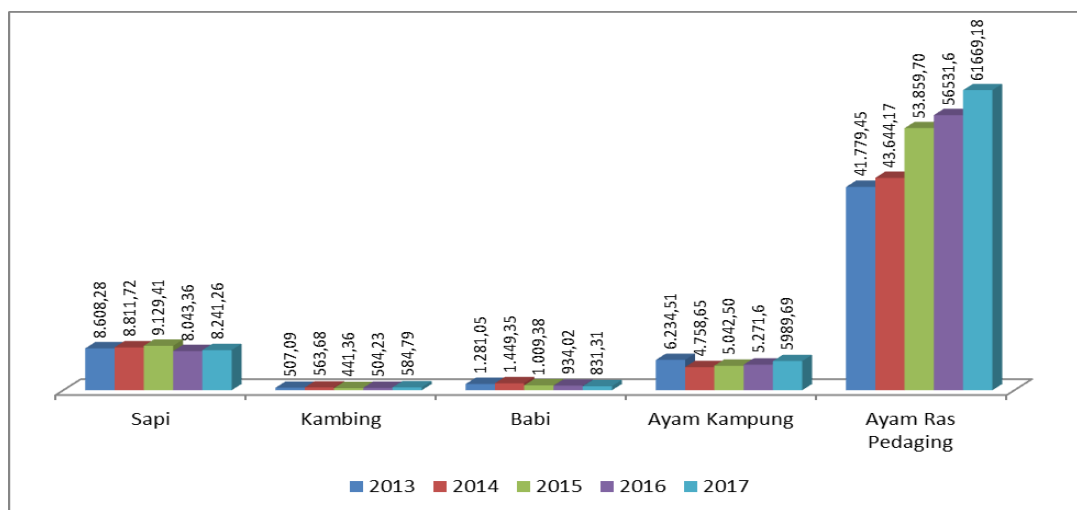
Sumber: BPS Kaltim

Sub sektor pertanian yang menjadi unggulan Kalimantan Timur adalah perkebunan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya

produktivitas perkebunan rakyat antara lain komoditi sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada. Rendahnya produktivitas komoditi perkebunan rakyat disebabkan tanaman rusak dan keterbatasan benih unggul. Permasalahan lainnya adalah belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan.

Sub sektor pertanian unggulan lainnya adalah peternakan. Produksi peternakan terkait dengan cadangan pangan daerah untuk mencukupi konsumsi nutrisi masyarakat. Kalimantan Timur telah swasembada ayam dan telur.

Gambar 2. 40
Produksi Daging Komoditas Peternakan Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : Sidata Kaltim

d. Kehutanan

Potensi produksi kehutanan di Kalimantan Timur mengalami penurunan seiring dengan laju deforestasi selama lebih dari satu dasawarsa. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ditopang dari produksi hasil hutan kayu cenderung stagnan.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kehutanan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1.11	1.16	1.33	1.34	1.15	II.8
2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	46,896.39	84,035.54	56,224.46	42,464.21	40,901.85	III.15
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	III.15

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Permasalahan yang dihadapi adalah hutan produksi belum dikelola secara arif dan efisien, semakin meluasnya areal hutan yang di berikan ijin pinjam pakai oleh Kementerian Kehutanan untuk kegiatan pertambangan. Pengelolaan kawasan hutan sampai saat ini yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kendala dalam upaya pengendalian di daerah.

Hasil hutan produksi selama ini yang terus diharapkan adalah hasil hutan kayu, padahal pemanenan kayu kontradiktif dengan isu perubahan iklim dan *green economic*. Perlu perubahan orientasi terhadap hasil-hasil hutan non-kayu, seperti ekstraktif tumbuhan obat, energi terbarukan, jasa lingkungan dan ekowisata. Sampai saat ini belum ada regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. Hingga saat ini jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang menerapkan metode riil-C 7 unit dari jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 65 unit.

Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. Jika dikelola dengan baik, kayu log dapat diolah menjadi industri barang jadi seperti meubeler dan lain sebagainya. Rata-rata 1.6 juta m³ kayu log bahan mentah yang diekspor ke luar daerah tanpa pengolahan, sehingga nilai ekonomisnya masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur dan belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu. Saat ini terdapat 131 unit industri pengolahan hasil hutan kayu di Provinsi Kalimantan Timur untuk kapasitas 2.000 m³ s/d 6.000

m³, 65 unit untuk kapasitas < 2.000 m³ dan 40 unit untuk kapasitas ≥ 6.000 m³. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil hutan kayu memerlukan regulasi yang mewajibkan stakeholder untuk mengolah hasil kayunya di Kalimantan Timur. Pada sisi lain, industri hasil hutan selama ini hanya fokus pada hasil kayu, belum mengarah pada limbah kayu, misalnya peluang mengembangkan Eucalyptol (minyak dari daun HTI Eucalyptus) yang selama ini justru hanya menjadi limbah di HTI di Kalimantan Timur. HTI Eucalyptus setiap tahunnya dipanen seluas sekitar 15.000 ha.

Akses masyarakat di sekitar kawasan hutan juga belum memadai dalam mendukung pengelolaan hutan lestari (perhutanan sosial). Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan menjadi akar masalah dari persoalan tersebut. Di sisi lain areal penanganan masing-masing kawasan terlalu luas.

Menurunnya produksi kehutanan juga disebabkan oleh Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar belum dapat ditangani dengan lebih sistematis. Jumlah kasus *illegal logging* mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian dan pengawasan hutan.

Persoalan ini diperparah oleh laju deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan meningkatnya jumlah emisi di Kalimantan Timur. Deforestasi hutan di Kalimantan Timur rata-rata sebesar 70.039 Ha/tahun, dan degradasi hutan sebesar 16.236 Ha/tahun. Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit. Terdapat ijin HGU pada kawasan hutan seluas lebih dari 600.000 ha, dan lebih dari 3 juta Ha ijin pinjam pakai pertambangan. Pemanfaatan hutan tanpa kendali menjadi kawasan perkebunan, pemukiman, infrastruktur, penambangan akan berdampak terhadap penurunan kapasitas penyerapan dan penyimpanan CO₂, di samping juga akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan lainnya terutama menurunnya fungsi hidroorologis serta punahnya flora dan fauna.

Degradasi yang signifikan di Kalimantan Timur sebagian besar terkait dengan kegiatan penebangan di hutan alam (IUPHHK-HA) dari tahun 2006 sampai 2015, tingkat degradasi rata-rata yang disebabkan oleh penebangan di

Kalimantan Timur adalah 65.395 Ha per tahun dengan 3.381 Ha per tahun lebih lanjut terdegradasi dalam perkebunan kelapa sawit. Selain masalah emisi, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penangkap air, sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wilayah tangkapan air. Hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air di berbagai daerah sebagai sumber mata air baku.

Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan belum tertangani melalui program reboisasi terus menerus. Permasalahan belum tertanganinya kerusakan tanah pasca penebangan hutan melalui program reboisasi disebabkan oleh kemampuan untuk merehabilitasi lebih rendah dari kemampuan penebangan, baik kemampuan pendanaan maupun sumber daya manusianya. Luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mencapai 7,78 juta Ha. Program reboisasi dijalankan melalui dana DBH-DR melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, terdapat berbagai skema rehabilitasi hutan dan lahan dan salah satunya dari program Rehab DAS yang dilakukan oleh pemilik ijin pinjam pakai dan beberapa program rehabilitasi dalam skema perubahan iklim.

Kawasan hutan lindung belum berfungsi optimal sebagai penyeimbang lingkungan hidup serta perlindungan keanekaragaman hayati. Masalah tersebut disebabkan oleh penataan batas kawasan hutan lindung yang belum tuntas oleh Kementerian Kehutanan, walaupun pengelolaan berada di pemerintah daerah. Luas hutan lindung mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2013 hingga 2017. Diperlukan penegakan regulasi yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara efektif.

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang cukup besar di bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Kinerja bidang urusan Energi dan Sumberdaya Mineral meliputi ketenagalistrikan, pertambangan minyak, gas bumi, batu bara dan sumber daya mineral lainnya.

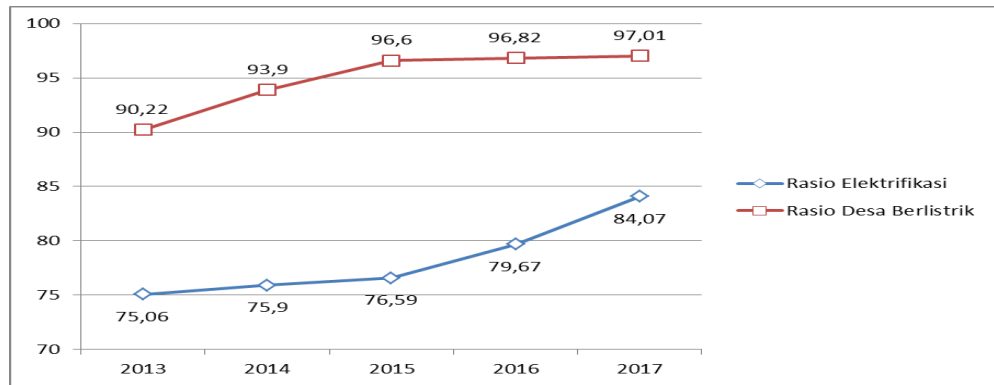
Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

N	INDIKATOR DAERA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
4.1	Kontribusi pertambangan penggalan terhadap PDRB	%	55.21	50.21	45.03	43.17	46,31	II.8
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasi	159.35	174.83	184.48	169.04	202.87	II.7
4.3	Rasio rasio KK	%	75,06	75,	76,59	79,67	84,07	II.7
10.	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2,666,440.00	2,930,573.00	3,110,17	3,286,00	3,230,40	II.7
10.	Jumlah pelanggan	Oran	663,58	736,59	791,55	842,00	904,93	II.7

Pertambangan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian Kalimantan Timur mengedepankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor non-tambang. Geliat industri ekstraktif mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan terjadinya penurunan tingkat produksi beberapa komoditi pertambangan. Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama pertambangan mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Menurunnya harga pasar dunia beberapa produk pertambangan sangat berpengaruh pada produktifitas pertambangan di daerah.

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Sebagian besar masyarakat mengakses listrik non-PLN, mencapai 64% dari total keluarga. Hanya 12,16% keluarga yang telah mengakses listrik PLN dan 13,84% belum memiliki akses listrik. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,07% lebih rendah dari capaian nasional 92,75%.

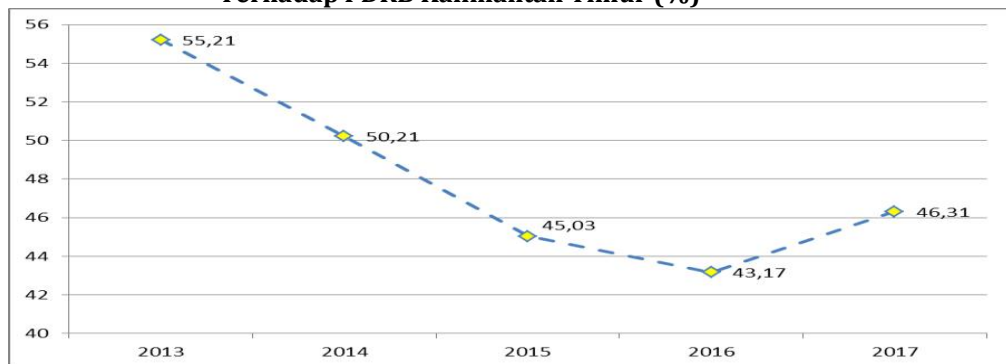
Gambar 2. 41
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*, 2018

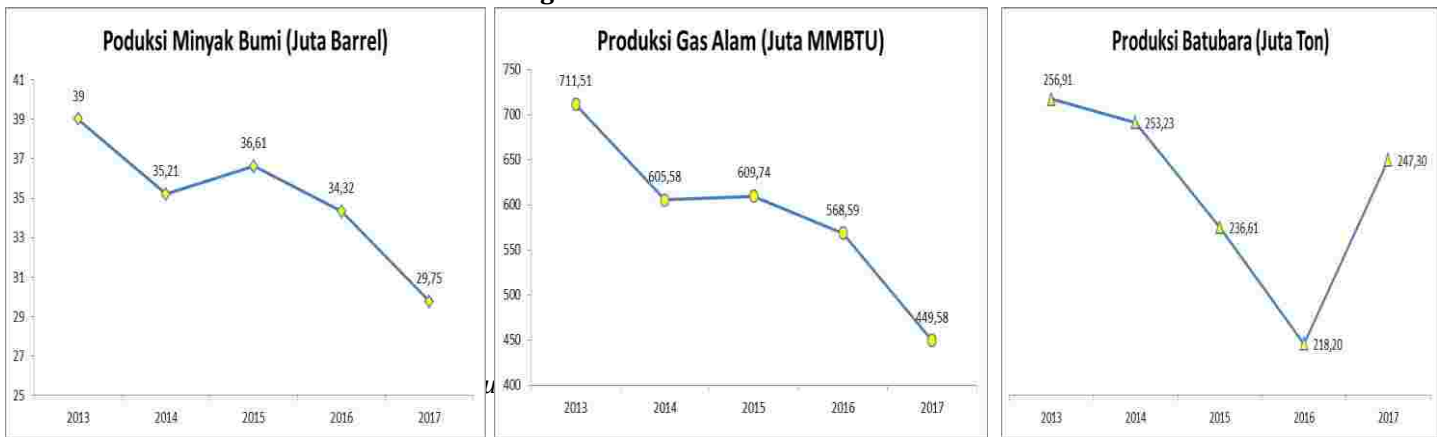
Kualitas instalasi listrik non-PLN yang terpasang sebagian besar belum sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata listrik non-PLN hanya beroperasi selama 6 jam setiap harinya. Daya listrik non-PLN yang dialirkan berasal dari PLTS, PLTD, PLTU dan PLTG. Hal tersebut berarti cakupan layanan PLN di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Penyediaan listrik di wilayah Terpencil, Tertinggal dan Terluar (3T) melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum optimal karena lemahnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan.

Gambar 2. 42
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kalimantan Timur (%)

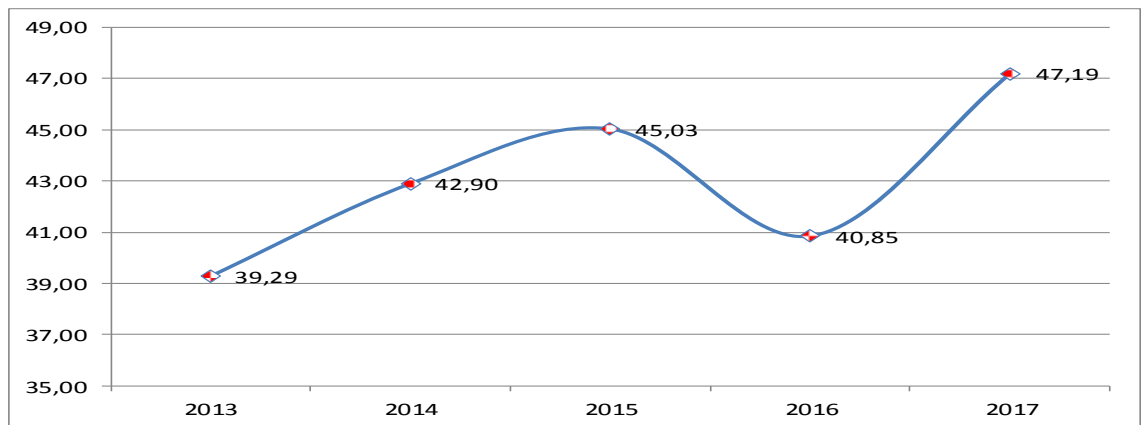


Sumber : *BPS Kaltim*

Gambar 2. 43
Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Gambar 2. 44
Persentase Area Direhabilitasi dari Lahan Terganggu



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*, 2018

f. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

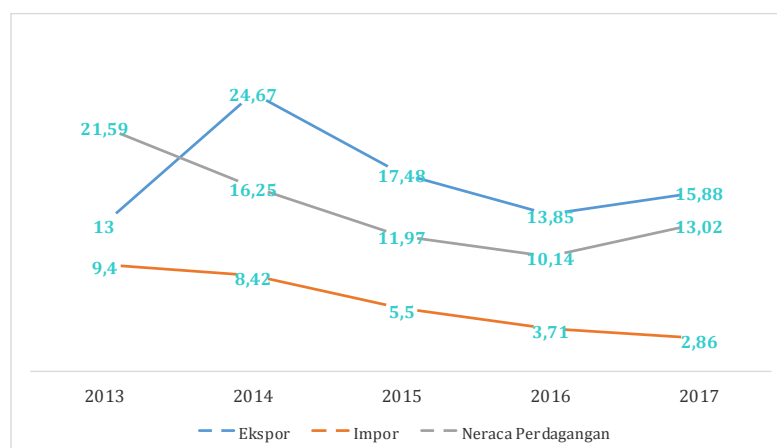
Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perdagangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4.29	4.58	5.12	5.53	5.30	II.8
2	Nilai ekspor	Ribu USD	31,003,083	24,673,182	17,483,274	13,854,373	17,532,855	II.17
3	Nilai impor	Ribu USD	9,512,101	8,471,495	5,506,226	3,711,080	3,228,306	II.17
4	Ekspor bersih perdagangan	Ribu USD	21,490,982	16,201,687	11,977,048	10,143,293	14,304,549	II.17

Sumber : BPS Kaltim

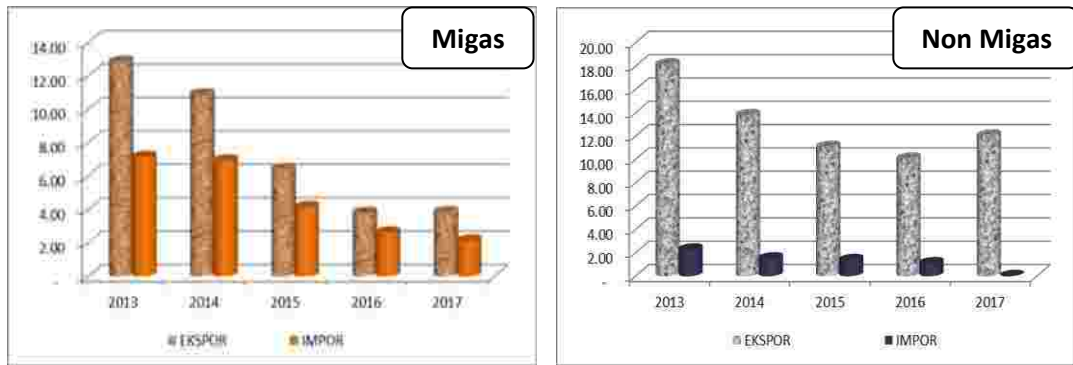
Gambar 2. 45
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kaltim

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar 1,98 persen. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari produksi mineral. Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu lebih besar dari non migas.

Gambar 2. 46
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (Juta US)

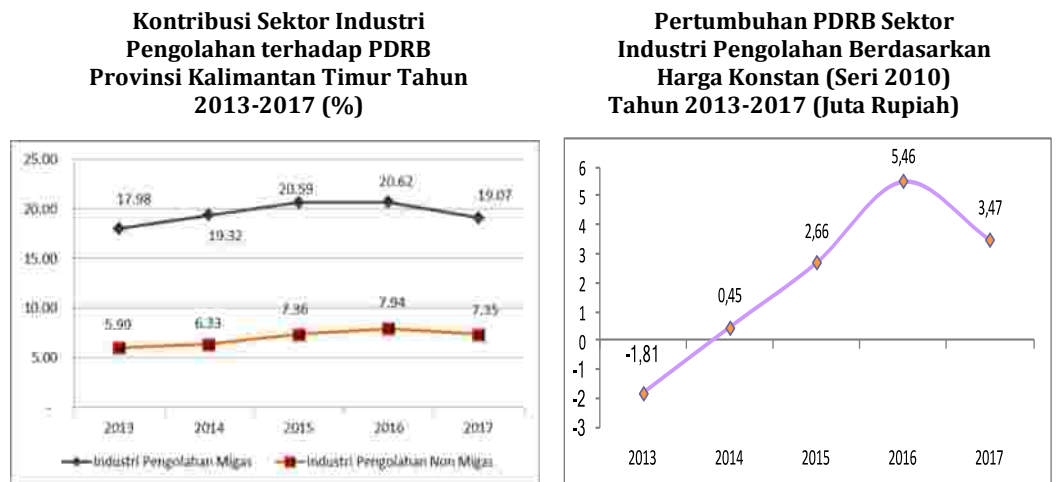


Sumber: BPS Kaltim

g. Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor potensial kedua penyumbang terbesar dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan rata-rata 2,85 persen selama lima tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PDRB Kaltim cenderung menurun. Rendahnya kontribusi Industri pengolahan non migas disebabkan tingkat produksi dan daya saing produk masih rendah.

Gambar 2. 47
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perindustrian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kaltim

Sebagian besar produk pengelolaan sumber daya alam Kaltim diekspor dalam bentuk bahan mentah, integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum berjalan. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kalimantan Timur masih belum berkembang dengan baik. Sentra industri kecil menengah tercatat 8.314 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 22.033 orang. Jumlah IKM

yang berorientasi ekspor hanya 15 unit. Industri kecil menengah masih didominasi oleh industri pangan. Pengembangan IKM dihadapkan pada permasalahan belum adanya regulasi pembatasan ekspor bahan mentah, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing produk.

Tabel 2. 42
Komoditas Produk Unggulan Industri Pengolahan di Kalimantan Timur

No.	Komoditas	Lokasi
1	Kayu Lapis (plywood), Mdf	Samarinda, Balikpapan, PPU, Kukar
2	Udang Beku	Balikpapan, Kukar
3.	Pengolahan kayu/sawmill	Samarinda, Balikpapan, Kukar, Berau, Paser, Kutim
4	Crude Palm Oil	Kukar, Paser, Kutim
5	Galangan Kapal	Kukar, Paser, Samarinda, Balikpapan
6	Pupuk urea & Amoniak	Bontang
7	Moulding	Samarinda, Balikpapan, Kukar
8	Gas, Methanol, Hexamethylene Tetramine, Melamine	Bontang
12	Pengolahan Lem	Samarinda, Bontang
13	Pengolahan Minyak Kelapa	Penajam Paser Utara
14	Pulp/Kertas	Berau
15	Pengolahan Rotan	Paser, Balikpapan
16	Kulit Buaya	Balikpapan
17	Kain Tenun Ulap Doyo	Kutai Kartanegara
18	Garmen	Balikpapan

Sumber: Dinas Indakop Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

Komoditas unggulan yang mendominasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit, akan tetapi industri pengolahan yang telah dikembangkan hanya sampai pada produk *Crude Palm Oil (CPO)*. Lima komoditas utama yang perlu dikembangkan secara prospektif dan potensial untuk industri pengolahan adalah Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.

2.3.3 Fokus Urusan Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang telah ditetapkan baik sebagai Peraturan daerah maupun Peraturan Kepala Daerah merupakan acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur. Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur sudah cukup baik dan mampu bersaing secara nasional. Kalimantan Timur telah

berhasil memperoleh penghargaan nasional sebagai salah satu provinsi berprestasi dalam perencanaan pembangunan, melalui Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dengan peringkat kedua terbaik nasional. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada permasalahan inkonsistensi perencanaan dengan penganggaran di setiap perangkat daerah dan kabupaten/kota. Sebagian besar perangkat daerah masih belum konsisten dalam merencanakan dan mencapai target kinerja terutama pada program dan kegiatan.

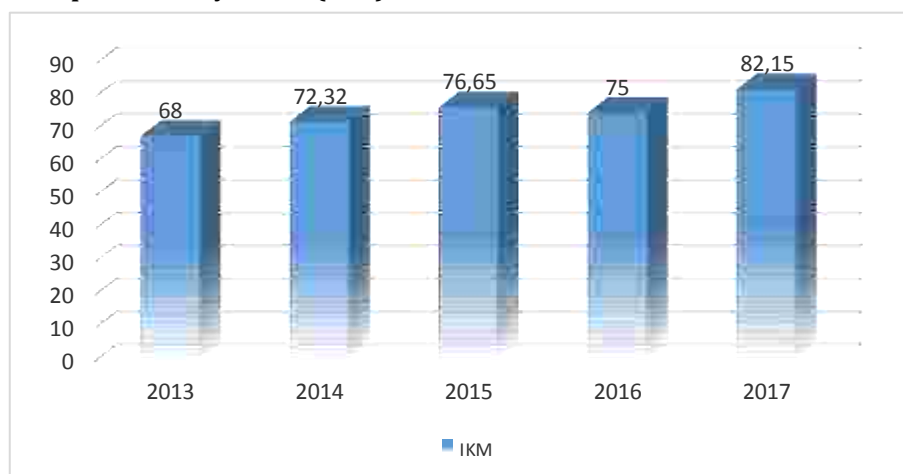
Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	IV.16
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	-	-	-	97.00	99.28	IV.16
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	-	-	-	97.00	99.28	IV.16
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	-	-	-	95.15	96.32	IV.16

b. Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi semakin meningkat. Artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat.

Gambar 2. 48
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: SIDATA, Bappeda Kaltim

Meskipun demikian, masih ada persoalan lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan kontrol terhadap kegiatan survai IKM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Saat ini, kontrol terhadap survai IKM belum berjalan optimal. Persoalan ini diindikasikan dengan masih adanya hasil survai yang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada OPD pengampu yaitu Bagian Organisasi Sekartariat Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 (Sembilan) SPM, sementara di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 15 (lima belas) SPM. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum yang mengatur secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan pelaksanaan SPM, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan SPM baik di kabupaten/kota maupun internal perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Opini BPK		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	IV.16
2	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		5,20	4,90	5,58	5,58	5,56	IV.16
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	-2.29	-2.96	-20.27	-11.26	1.95	IV.16
4	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10.00	8	11.74	4.86	8.23	IV.16
5	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Program (%)	7.39	9.43	0.82	12.43	0.46	IV.16
		Kegiatan (%)	12.43	13.22	0.72	8.60	0.60	
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	3.79	4.28	3.10	2.71	5.26	IV.16
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	5.80	5.41	6.90	10.98	9.54	IV.16
8	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak	BL (%)	49.87	45.99	43.71	47.47	36.95	IV.16
		BTL (%)	50.13	54.01	56.29	52.53	63.05	
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	18.23	21.09	25.03	18.51	23.81	IV.16
10	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IV.16
11	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	50,60	59,04	52,30	50,46	56,25	IV.16

Sumber : BPKAD Prov.Kaltim

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Selama lima tahun terakhir PAD Kaltim semakin meningkat dan pada tahun 2017 telah mencapai 55,88 persen dari total pendapatan daerah. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

d. Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan

salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai 2017. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mendapat predikat BB dengan skor 77,49. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

e. Keterbukaan informasi publik

Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip *governance*. Salah satu indikator untuk mengukur transparansi daerah adalah keterbukaan informasi publik.

Tabel 2. 45
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Peringkat	Nilai
1	2013	5	62,88
2	2014	3	91
3	2015	3	81,18
4	2016	3	88,17
5	2017	8	-

Sumber: Laporan Tahunan KIP 2012-2016

Walaupun akses terhadap informasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan semakin baik yang diindikasikan dengan semakin mudahnya mendapatkan data atau informasi capaian pembangunan daerah di website pemerintah, Indeks keterbukaan informasi publik Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat ke 3 menjadi peringkat ke 8 nasional. Permasalahan tersebut terjadi karena belum optimalnya kelembagaan informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP).

f. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM aparatur.

Persentase pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Perkembangan ASN yang mengikuti Diklat baik diklat formal maupun diklat struktural cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut memerlukan adanya kebijakan peningkatan diklat pegawai melalui optimalisasi penerapan standar kompetensi, peningkatan sistem administrasi kepegawaian , optimalisasi kelembagaan perangkat daerah, dan optimalisasi pelaksanaan lembaga sertifikasi.

Tabel 2. 46
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
3.1	Jumlah PNS	Orang	7,235	7,163	7,234	6,525	11,566	IV.16
3.2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	68.00	57.00	61.00	63.00	49.00	
3.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1.90	1.70	1.50	1.80	0.60	
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	%	99.00	80.00	40.00	70.00	33.00	
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	61	62	62	61	56	IV.16
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	310	310	299	300	280	IV.16
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1,422	1,611	1,695	1,455	4,985	IV.16
3.7	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skor	68.00	70.00	75.00	80.00	81.56	IV.16
3.8	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	5.68	11.99	11.08	11.20		IV.16

Sumber: BPSDM Kaltim

g. Penelitian dan pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini menyediakan instrumen perumusan kebijakan daerah melalui aktivitas ilmiah.

Tabel 2. 47
Uraian Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Uraian	Capaian
1.	Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
2.	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	87%
3.	Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %
4.	Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	100 %

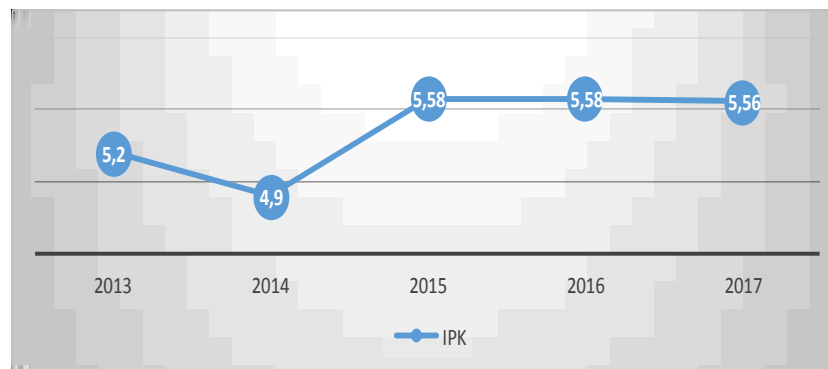
Sumber: Balitbang Prov.Kaltim 2018

Urusan penelitian dan pengembangan sudah berjalan optimal karena perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai 100 persen. Sementara kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan baru 87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

h. Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran internal instansi pemerintah. Untuk melihat kinerja pengawasan, dapat dilihat berdasarkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 49
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Inspektorat Prov.Kaltim

IPK provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Turunnya nilai IPK menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah belum berjalan optimal karena cukup banyak masyarakat menganggap masih ada praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, IPK ini belum diterapkan di seluruh OPD, dimana baru diterapkan pada pelayanan perizinan berusaha. Artinya, pelayanan perizinan belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Kalimantan Timur masih pada posisi level 2. Hanya satu perangkat daerah yang sudah menerapkan zona integritas yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan. Penetapan ini penting karena mencerminkan komitmen instansi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan yang optimal.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP juga belum optimal.

Tabel 2. 48
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	49	93	80	13	13,97
2014	19	47	38	9	19,14
2015	48	112	86	26	23,21
2016	41	118	60	58	49,15
2017	31	85	26	59	69,41
2018	11	29	8	21	72,41

Sumber: inspektorat 2013-2018

Tabel 2. 49
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	106	160	160	0	Selesai
2014	251	393	391	2	0,50
2015	203	309	308	1	0,32
2016	211	374	330	43	11,49
2017	282	421	209	212	50,35

Sumber: Inspektorat 2013-2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

Tabel 2. 50
Indikator Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1,096,709	1,136,173	1,193,642	1,296,926	1,443,928	I.1
2	Nilai tukar petani	%	95	100	99	98	97,16	I.1
3	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508,706	508,801	549,351	587,920	663,535	I.1
4	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588,003	627,372	644,291	709,006	780,393	I.1
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	58.73	59.69	63.76	63.76	48.17	
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	5.84	5.42	6.33	6.44	5.29	
7	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	627	770	775	688	II.8
8	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	523	661	661	673	689	II.8
9	Jumlah rumah makan/ restoran	Unit	943	987	1062	1167	1230	II.8
10	Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih	%	80.87	85.35	89.41	90.63	90,90	I.3
11	Rasio ketergantungan		46.2	45.76	45.28	44.83	42.43	I.1

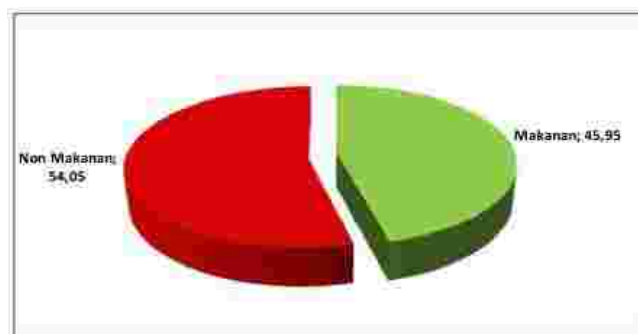
Sumber: BPS Kaltim

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena fokus konsumsi penduduk lebih tinggi ke konsumsi non makanan dibandingkan dengan konsumsi makanan. Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya menunjukkan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan makanan.

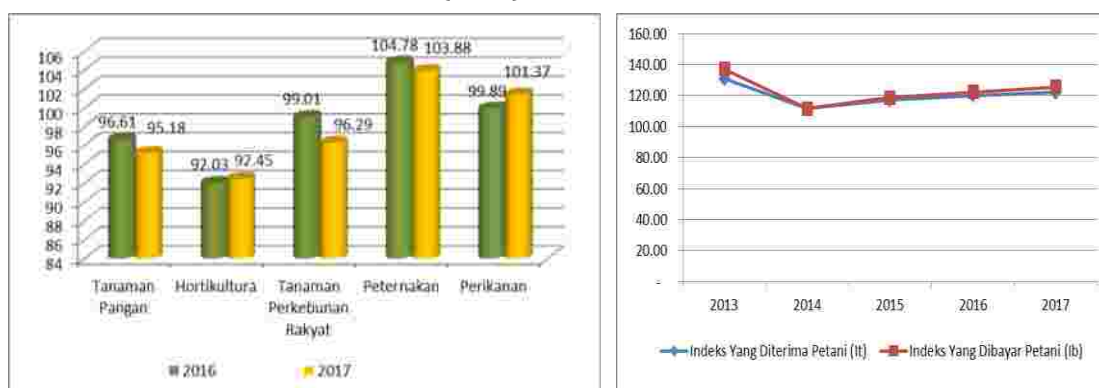
Gambar 2. 50
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Disamping indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, kemampuan ekonomi daerah diukur juga dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan, dan juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Gambar 2. 51
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektor pertanian, NTP tertinggi adalah peternakan dan perikanan, sedangkan NTP terendah pada subsektor hortikultura.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap daya saing daerah. Tingkat daya saing diukur dari ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi daerah. Pelayanan infrastruktur terkait sarana dan fasilitas wilayah lainnya yang diukur meliputi: konektivitas jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut ke kawasan-kawasan kesatuan sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan air baku dan air bersih, jaringan irigasi, perumahan, listrik dan energy, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas pelayanan jasa perdagangan.

Konektivitas infrastruktur perhubungan di Kalimantan Timur masih belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama masih terbatasnya jaringan jalan dan prasarana perhubungan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Konektivitas jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

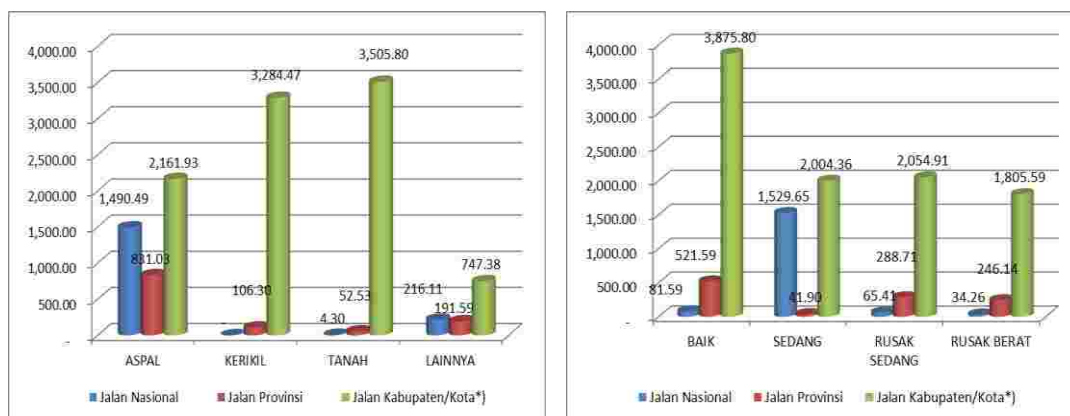
Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan, antara lain:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur

antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan Dukungan swasta belum optimal.

4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan hutan dan kawasan lindung.

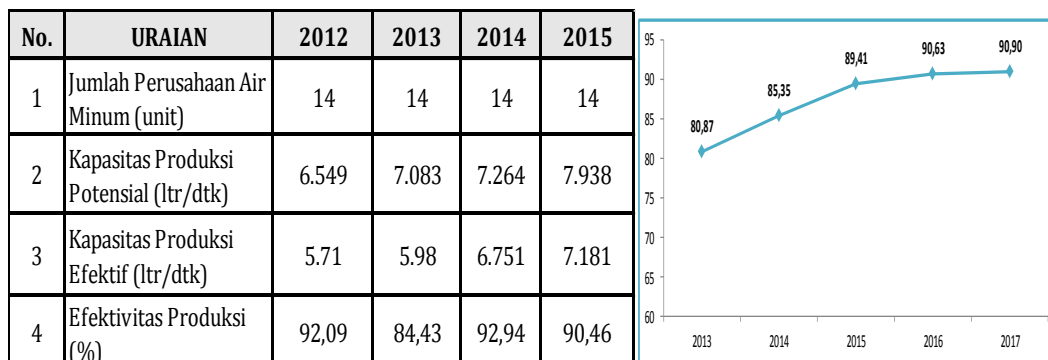
Gambar 2. 53
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim

Ketersediaan air baku dan air bersih di Kalimantan Timur hingga tahun 2017 telah melayani 90,90 persen rumah tangga. Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

Gambar 2. 54
Kapasitas Pelayanan Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Terlayani
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

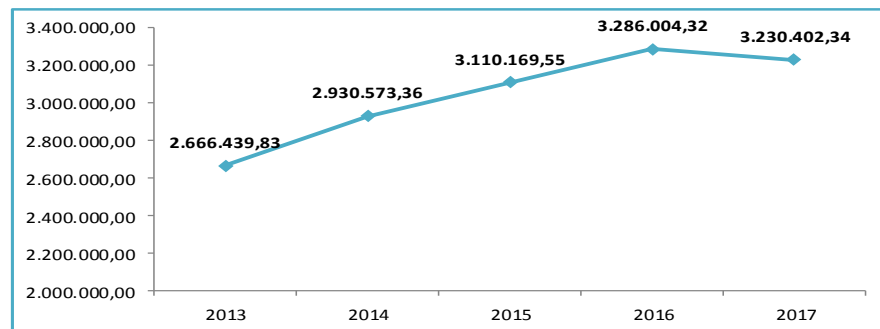


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di

setiap tahunnya hingga mencapai 3.286.004,32 MWh pada tahun 2016. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2016 berjumlah 774.995 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.801.719.937 MWh. Sementara pada tahun 2017 produksi tenaga listrik sedikit mengalami penurunan, namun jumlah pelanggan listrik rumah tangga tetap mengalami peningkatan.

Gambar 2. 55
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)

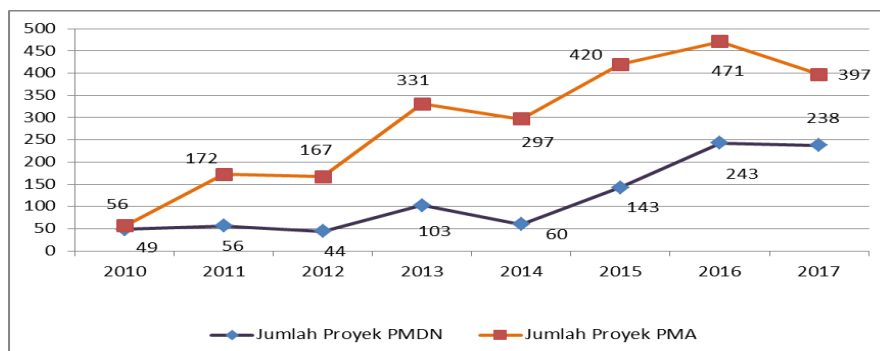


Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya saing daerah dengan fokus iklim berinvestasi sangat terkait dengan penataan ruang, pelayanan perijinan, regulasi daerah, kondisi keamanan berusaha, fasilitas pelayanan perbankan dan pelayanan umum lainnya. Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 936 proyek investasi terdiri dari 238 proyek investasi dari PMDN yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 128.998 orang, dan 397 proyek dari PMA yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 196.635 orang.

Gambar 2. 56
Perkembangan Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



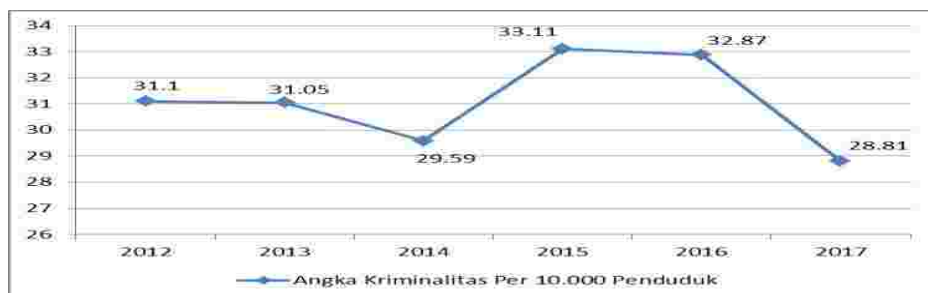
Sumber : DPMPSTSP Prov.Kaltim

Kondisi tata ruang wilayah sangat berpengaruh terhadap iklim berinvestasi terkait dengan kejelasan status lahan dan perijinan pemanfaatan ruang yang didukung oleh kebijakan daerah dalam penerapan insentif dan disinsentif. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut telah memberikan kejelasan status lahan bagi pengembangan investasi di daerah. Namun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan tumpang tindih lahan akibat perijinan yang diterbitkan sebelum RTRWP Kaltim di sahkan. Pengembangan luas lahan produktif yang tumpang tindih terkendala oleh waktu proses penyelesaian sengketa lahan yang cukup panjang. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan perijinan dan peninjauan kembali peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWP Kaltim. Kabupaten/Kota juga dituntut segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Zonasi, karena Peraturan Zonasi menjadi dasar hukum dalam penerbitan ijin di tingkat kabupaten/kota.

Kondisi keamanan suatu wilayah juga sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah.

Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, namun masih dalam posisi tinggi secara nasional. “Pekerjaan Rumah” inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

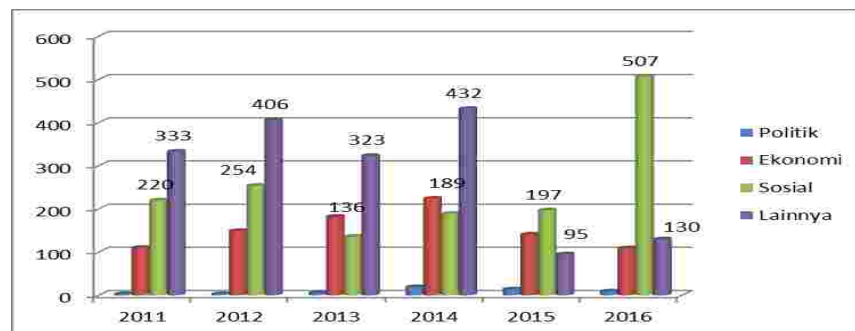
Gambar 2. 57
Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017



Sumber: Polda Kaltim 2017

Persoalan lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi adalah demonstrasi. Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi di Kalimantan Timur meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun dilakukan dengan damai, ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya.

Gambar 2. 58
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

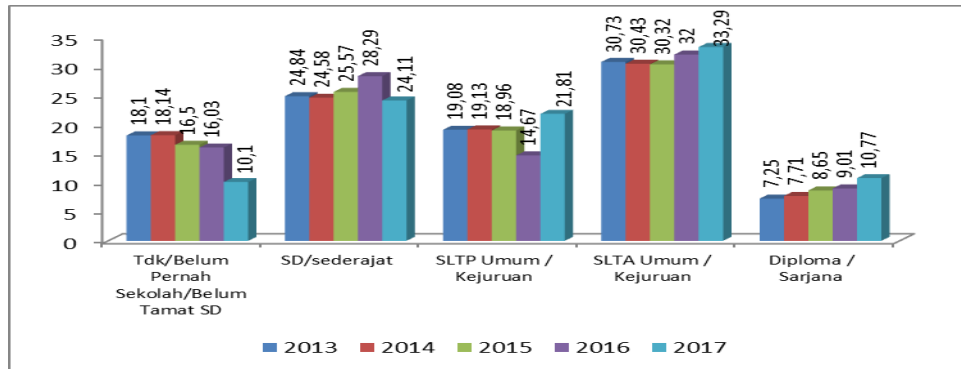
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada daya saing daerah. Untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, rasio ketergantungan kelompok umur produktif dan non produktif juga dijadikan ukuran kualitas sumber daya manusia.

Penduduk Kalimantan Timur yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya mencapai 9,01 persen saja, sementara sebagian besar berpendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%), serta masih tingginya masyarakat tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur masih rendah. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali

program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

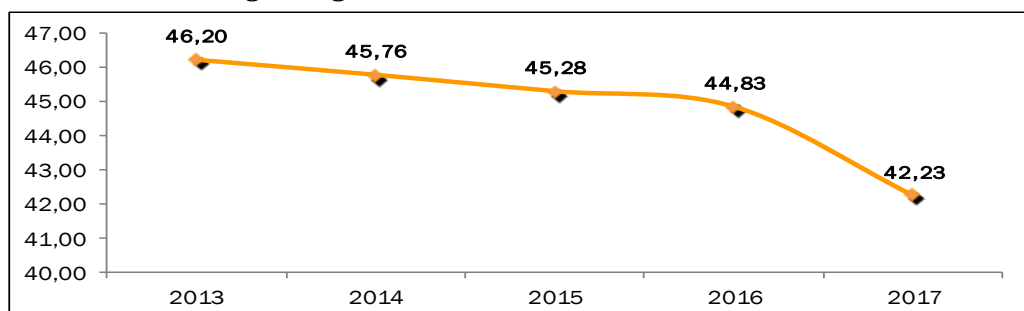
Gambar 2.58
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42-43 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini secara konsisten mengalami penurunan, terutama jika dilihat dari tahun 2013 dimana rasio ketergantungan menunjukkan rasio sebesar 46,20.

Gambar 2.59
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur,

BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah periode sebelumnya.

Gambaran tersebut selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan terutama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Perkembangan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, komponen pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik walaupun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan.

Tabel 3.1.
Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2013	11.940.096.024.641	11.631.697.051.830	97,42%
2014	11.192.326.880.287	11.287.300.941.021	100,85%
2015	10.497.631.453.406	9.464.926.705.876	90,16%
2016	7.762.674.455.113	7.987.877.780.773	102,90%
2017	8.223.730.774.720	8.154.749.005.918	99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama penyusun pendapatan daerah. PAD terbesar berasal dari pendapatan pajak daerah dengan besaran proporsi rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 42,46 persen. Meskipun demikian, nilai absolut pendapatan pajak daerah setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus 12,85 persen per tahun.

Komponen terbesar penyumbang pajak daerah berasal dari pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Namun demikian terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari masyarakat.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari Dana Perimbangan dan transfer lainnya setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. DAK mengalami peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2014. Demikian pula dengan DAU mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun

2016. Sementara itu, meskipun sebagai sumber pendapatan terbesar, besaran DBH cenderung menurun.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah pada komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,53 persen.

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari tahun 2013 Rp 410,67 Milyar menjadi Rp 37,26 Milyar di tahun 2017. Hal ini disebabkan karena Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terus mengalami penurunan dari Rp 394,6 Milyar di tahun 2013 menjadi Rp 7,5 Milyar pada tahun 2017. Pada tahun 2018, tidak ada alokasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Kalimantan Timur.

2. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2013-2017 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2013	15.139.000.000.000	13.780.244.907.476	91,02%
2014	12.217.683.000.000	11.274.631.837.034	92,28%
2015	11.484.260.000.000	10.205.342.292.212	88,86%
2016	7.976.359.000.000	7.601.242.338.859	95,30%

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2017	8.223.730.774.720	8.101.145.367.965	98,51%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas.

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan belanja bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 3.3. Perkembangan Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	TAHUN	URAIAN PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN NETTO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1.	2013	3.198.903.975.359,34	-	3.198.903.975.359,34
2.	2014	1.050.356.119.713,24	25.000.000.000,00	1.025.356.119.713,24
3.	2015	1.036.628.546.594,01	50.000.000.000,00	986.628.546.594,01
4.	2016	226.684.544.888,84	-	226.684.544.888,84
5.	2017	611.118.124.746,55	-	611.118.124.746,55

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pembiayaan Daerah terdiri dari dua komponen yaitu *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, *kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Pada tahun 2013 – 2017, pembiayaan penerimaan daerah hanya bergantung pada SiLPA. SiLPA terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar Rp 226,68 Milyar sedangkan SiLPA tertinggi yakni sebesar Rp 3,2 Trilyun dialami pada tahun 2013.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	11.940.096.024.641	11.192.326.880.287	10.497.631.453.406	7.762.674.455.113	8.223.730.774.720	-3,19%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	5.543.616.578.000	5.771.201.825.750	5.095.145.980.601	3.921.364.868.077	4.167.589.517.079	-0,26%
1.1.1.	Pajak daerah	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433	3.505.578.072.171	-2,13%
1.1.2.	Retribusi daerah	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560	16.659.010.037	-4,29%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	291.684.072.010	310.199.925.478	230.116.057.795	167.385.377.651	208.807.497.552	-5,63%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	630.109.625.674	909.765.846.475	951.602.831.867	717.442.609.764	857.708.316.470	9,61%
1.2.	Dana Perimbangan	5.973.586.166.641	5.053.998.624.537	4.918.899.806.705	3.813.127.539.436	4.024.646.840.474	-5,01%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413	1.710.695.086.821	-9,28%
1.2.2.	Dana alokasi umum	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000	714.906.576.000	139,95%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	8.047.840.000	1.383.900.000	218.651.350.000	1.047.628.487.000	1.143.558.722.000.000	24990,59%
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	422.893.280.000	367.126.430.000	483.585.666.100	28.182.047.600	31.494.417.167	-9,12%
1.3.1	Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	9.736.113.000	10.437.936.000	-3,46%
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	394.630.725.500	352.611.956.905	483.585.666.100	5.000.000.000	7.500.000.000	-24,49%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0	0	15.048.587.875	13,21%
2	BELANJA	15.139.000.000.000,00	12.217.683.000.000,00	10.967.068.904.744,60	7.989.359.000.000,00	8.834.897.375.000,00	-6,29%

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	7.589.788.098.568,00	6.598.286.393.088,30	5.947.158.306.899,96	4.197.167.944.503,67	5.570.709.846.709,00	-2,73%
2.1.1	Belanja Pegawai	933.282.282.068,00	1.027.784.762.088,30	514.399.254.869,71	991.505.508.003,67	1.698.837.530.019,00	24,95%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	1.617.958.784.500,00	946.891.710.000,00	977.532.900.000,00	849.120.600.000,00	1.035.431.514.000,00	-5,07%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	3.870.100.000,00	5.010.000.000,00	3,15%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.759.134.532.000,00	2.576.755.696.000,00	2.874.912.719.218,25	1.478.522.500.000,00	2.104.010.195.500,00	2,66%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan & Politik	2.254.122.500.000,00	2.031.354.225.000,00	1.556.813.432.812,00	861.149.236.500,00	721.120.607.190,00	-19,58%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	19.790.000.000,00	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	13.000.000.000,00	6.300.000.000,00	-9,65%
2.2	Belanja Langsung	7.549.211.901.432,00	5.619.396.606.911,73	5.019.910.597.844,64	3.792.191.055.496,33	3.264.187.528.291,00	-9,03%
2.2.1	Belanja Pegawai	609.529.516.215,33	489.298.650.271,25	514.399.254.869,71	450.048.961.767,00	243.801.648.092,00	-14,15%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.747.919.262.071	2.430.984.550.539,79	2.158.118.306.082,14	1.695.886.958.784,33	2.001.134.625.074,00	-6,19%
2.2.3	Belanja Modal	4.191.763.123.145	2.699.113.406.100,69	2.347.393.036.892,79	1.646.255.134.945,00	1.019.251.255.125,00	-2,68%
3	PEMBIAYAAN	3.198.903.975.359,34	1.025.356.119.713,24	986.628.546.594,01	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	1,76%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.887,84	611.166.600.279,55	2,31%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0	0	0,00%

3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di neraca pemerintah daerah berasal dari perolehan sejak Pemerintah Daerah tersebut berdiri. Oleh karena itu, untuk keperluan penyusunan neraca pertama kali, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan suatu pendekatan tertentu dan melakukan inventarisasi terhadap aset dan kewajibannya. Keandalan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca awal sangat penting dalam membangun sistem akuntansi pemerintah daerah, karena jumlah-jumlah yang disajikan dalam neraca awal akan menjadi saldo awal, yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi berikutnya. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Komponen aset dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan. Pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41 persen.

Tabel 3.5.
Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (RP)	2014 (RP)	2015 (RP)	2016 (RP)	2017 (RP)	PERTUMBUHAN (%)
1	Aset						
1.1.	Aset lancar	3,189,372,457,985.78	3,515,289,699,289.26	2,794,480,674,938.52	3,339,405,804,164.78	3,411,721,430,648.76	2.84
1.2.	Investasi jangka panjang	2,307,568,136,886	2,179,088,079,707	2,118,541,287,430	2,277,501,235,381	2,460,721,222,689.26	1.8
1.3.	Aset tetap	21,996,096,815,949.40	24,220,982,878,331.00	18,382,849,193,614.30	17,175,963,871,129.80	21,357,892,468,817.10	87.64
1.4.	Aset lainnya	151,881,580,658.91	174,339,515,972.00	132,704,136,253.30	320,313,481,494.34	1,035,220,371,759.79	88.86
	Jumlah aset daerah	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.40	23,113,184,392,170.20	28,265,555,493,914.90	1.91
2	Kewajiban						
	Kewajiban jangka pendek	632,278,528,956.51	913,791,245,661.67	468,763,491,805.24	716,158,960,129.10	1,074,749,726,990.98	24.66
3	Ekuitas dana	27,012,640,462,523.70	29,175,908,927,637.40	22,959,811,800,431.10	22,397,025,432,041.10	27,190,804,766,923.90	1.41
	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	27,644,918,991,480.20	30,089,700,173,299.00	23,428,575,292,236.30	23,113,184,392,170.20	28,265,554,493,914.90	1.91

Sumber: Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang *pertama* adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.6 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Persediaan	1,782,357,165,828	1,997,096,484,129	2,057,431,888,726	2,204,883,737,445	2,513,224,064,671	9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

**Tabel 3.7
Rasio Likuiditas Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	5.04	3.84	5.96	4.66	3.17	4.53
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	2.22	1.66	1.57	1.58	0.83	1.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53, sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kewajiban jangka

pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta adanya kebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah cermat.

Analisis neraca daerah yang *kedua* dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.8

Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0.022	0.0303	0.020	0.0309	0.038	0.028
2	Rasio hutang terhadap modal	0.023	0.0313	0.020	0.0319	0.039	0.029

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kondisi yang *solvable*. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik atau *solvable*. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset, dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang *ketiga* menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:

Tabel 3.9 Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMB. (%)
Piutang	709,122,636,012	883,288,619,506	671,448,413,308	755,022,737,028	634,847,129,148	-20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.10 Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
1	Rata-rata Umur Piutang	21.29	25.75	29.97	32.59	31.09	28.14
2	Rata-rata Umur Persediaan	282.42	345.38	359.65	352.80	342.61	336.57

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28,14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336,57 atau hampir selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi. Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

**Tabel 3.11 Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2013	5.885.262.003.582,88	11.631.697.051.829,90	50,60%
2014	6.664.586.023.490,97	11.287.300.941.021,00	59,04%
2015	4.950.160.613.906,01	9.464.926.705.876,01	52,30%
2016	4.031.514.706.408,00	7.987.877.780.773,00	50,46%
2017	4.588.752.896.230,47	8.154.749.005.918,47	56,25%
Rata-rata	5.224.055.248.723,67	9.705.310.297.083,67	53,73%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

Tabel 3.12.
Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (a) / (b) x 100%
		(a)	(b)	
1	2013	1,542,811,798,283.33	15,139,000,000,000.00	10.19%
2	2014	1,517,083,412,359.55	12,242,683,000,000.00	12.39%
3	2015	1,028,798,509,739.42	11,017,068,904,744.60	9.34%
4	2016	1.441.554.469.770.67	7,989,359,000,000.00	18.04%
5	2017	1.695.886.958.784.33	8,834,897,375,000.00	19.20%
6	2018	1.646.255.134.945.00	10,870,432,071,874.00	15.14%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber defisit riil dan analisis SiLPA. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

1. Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829,90	11.287.300.941.021,00	9.464.926.705.876,01	7.987.877.780.773,00	8.154.749.005.918,47
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10.205.342.292.212,00	7.601.242.338.859,40	8.239.379.709.093,14
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
A	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790.415.586.335,99	386.635.441.913,60	-84.630.703.174,67
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	3.198.903.975.359,34	1.050.356.119.713,24	1.036.628.546.594,01	226.684.544.888,84	611.118.124.746,55
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	1.050.356.119.713,24	1.038.025.223.699,89	246.212.960.258,02	613.319.986.802,44	526.487.421.571,88

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	9.464.926.705.876	7,985,727,918,251	6,957,328,915,701
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	13.780.244.907.476,00	11.274.631.837.034,30	10,205,338,696,735	7,601,242,338,859	5,666,129,081,032
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	25.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
4	Defisit riil	-2.148.547.855.646,10	-12.330.896.013,35	-790,411,990,859	384,485,579,392	1,291,199,834,669

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015	2016	2017
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,036,628,546,594	226,684,544,888	611,166,600,280
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 ketika APBD mengalami defisit. Penutup defisit itu, terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Kondisi berbeda pada tahun 2016 yaitu ketika terjadi surplus riil, maka penerimaan pembiayaan justru semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

2. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Apabila diperlukan maka dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Analisis SiLPA digunakan untuk melihat sumber perolehan SiLPA dan proporsi kontribusi yang diberikan. Perolehan SiLPA selama tahun 2013-2017 sebagian besar diperoleh penghematan belanja yang tidak terserap. Hal tersebut mengidentifikasi dua hal yaitu efektifitas dalam penghematan anggaran atau belum optimalnya penganggaran belanja daerah.

**Tabel 3.14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017		
		Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	Rp	%dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	1.050.356.119.713	100,00%	1.038.025.223.700	100,00%	246.212.960.258	100,00%	600.319.986.801	100,00%	-	1.123.738.108.106	100,00%
1	Pelampauan penerimaan PAD	341.645.425.583	32,53%	893.384.197.741	86,07%	-144.985.366.695	-58,89%	110.149.838.331	18,35%	-68.981.768.802	6,14%	
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-637.827.016.894	-60,72%	-800.677.641.912	-77,13%	-894.874.751.295	-	128.499.421.929	21,41%	-491.637.254.661	43,75%	
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	-12217381500	-1,16%	2.267.504.905	0,22%	7.155.370.460	2,91%	-13.445.934.600	-2,24%	1.492.106.708	-0,13%	
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.358.755.092.524	129,36%	943.051.162.966	90,85%	1.278.917.707.788	519,44%	375.116.661.141	62,49%	-564.659.666.884	50,25%	
5	Pelampauan pembiayaan netto	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	48.475.533	0,00%	

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, *pertama* strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan *kedua*, pada komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima tahun mendatang. Dalam konteks makro, pengelolaan anggaran daerah juga harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengelolaan anggaran sebagai salah satu komponen penting dari pembangunan daerah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah:

- Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
- Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
- Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah
- Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik
- Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri

**Tabel 3.15 Proyeksi Kerangka Pendanaan
Tahun 2019-2023**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pendapatan	10.549.624.013.250,00	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan	10.549.624.013.250,00	10.954.474.227.000,00	11.376.901.010.000,00	11.815.470.487.000,00	12.269.991.079.600,00
4	Belanja Tidak Langsung	6.526.656.978.075,00	5.411.102.979.307,11	5.412.061.767.073,62	5.616.897.372.290,36	5.775.758.664.747,42
5	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberapa komponen tersebut:

1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD, serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Optimalisasi pengelolaan aset kawasan ekonomi sebagai aset daerah.
 - Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah.
 - Peninjauan kembali terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai baik dari sisi tarif maupun mekanisme pemungutan.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola retribusi/pajak daerah.
 - Melakukan pendataan atas potensi pajak dan retribusi daerah guna mengukur kapasitas pajak dan retribusi daerah sebagai dasar dalam menetapkan target pendapatan.
 - Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, PD teknis penghasil, dan kecamatan.
 - Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan PD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sumberdaya kawasan ekonomi yang belum diatur dalam peraturan perundangan.
- b. Meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMD dengan melakukan penataan manajemen yang mendorong BUMD dikelola secara profesional.

- c. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi dalam pengelolaan pendapatan transfer.
 - Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
 - Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
 - Rasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Harmonisasi peraturan perundangan terkait investasi sektoral untuk Optimalisasi produktifitas kawasan ekonomi penyumbang terbesar PDRB Kaltim.
- d. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, yaitu melalui:

- Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah

pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.

- Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan renja OPD
- Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

- a. Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar
- b. Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah
- c. Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
- d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan
- e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.906.921.048.425	5.855.069.059.029	6.325.961.851.029	6.802.036.937.659	7.428.824.189.529
1	Prioritas I	3.309.189.730.304	5.018.612.696.589	5.409.359.250.099	5.905.380.955.803	6.500.411.128.328
2	Prioritas II	136.044.127.000	286.852.766.250	300.478.390.650	280.453.816.583	287.850.662.284
3	Prioritas III	461.687.191.121	549.603.596.190	616.124.210.280	616.202.165.273	640.562.398.917

3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan yaitu penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun. Strategi lainnya adalah kerjasama pembiayaan pembangunan secara komplementer dan terpadu baik melalui Pinjaman (*Loan*), APBN, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya terutama untuk pelaksanaan program prioritas daerah.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara akuntabel.

Komponen pendapatan daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam tahun 2019-2023 sebesar 3,84 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Peningkatan pendapatan daerah

tersebut diupayakan berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD. Rasio PAD terhadap pendapatan menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi. Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah. Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah. Kondisi defisit memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari sisi penerimaan pembiayaan. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	PENDAPATAN	10.549.624.013.250	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.452.964.353.550	6.362.974.720.000	6.860.538.503.000	7.808.866.980.000	8.381.004.510.500
1.1.1	Pajak Daerah	4.420.000.000.000	5.236.700.000.000	5.644.829.000.000	6.564.539.030.000	7.087.736.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	28.616.725.000	33.239.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704	31.209.722.618
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	224.523.866.374	227.111.724.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	779.823.762.176	865.923.810.602	845.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448
1.2	Dana perimbangan	5.059.832.628.500	5.159.079.507.000	5.273.955.507.000	5.424.555.507.000	5.807.155.507.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	3.038.477.121.500	3.137.724.000.000	3.252.600.000.000	3.403.200.000.000	3.785.800.000.000
1.2.2	Dana alokasi umum	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000	1.205.661.866.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	36.827.031.200	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
1.3.1	Hibah	12.272.000.000	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	14.671.639.200	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
1.3.6	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	-
2	Belanja	10.669.670.000.000	10.954.729.575.358	11.375.391.191.052	11.812.206.212.789	12.265.794.931.360
2.1	Belanja Tidak Langsung	6.526.656.978.075	5.531.148.966.057	5.532.107.753.823	5.736.943.359.040	5.895.804.651.497
2.1.1	Belanja Pegawai	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283	1.774.799.167.283
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	782.352.802.338	472.394.163.938	472.394.163.938	472.394.163.938	472.394.163.938
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	2.579.253.034.454	2.629.135.098.086	2.730.093.885.852	2.834.929.491.069	2.943.790.783.526
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.355.477.424.000	620.045.986.750	520.045.986.750	620.045.986.750	670.045.986.750
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	4.143.013.021.925	5.423.580.609.301	5.843.283.437.228	6.075.262.853.748	6.369.990.279.862
2.2.1	Belanja Pegawai	292.637.422.329	293.637.422.329	294.637.422.329	295.637.422.329	296.637.422.329
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.924.279.524	3.692.339.610.300	4.103.854.420.344	4.327.609.878.891	4.614.077.227.242
2.2.3	Belanja Modal	1.430.451.320.072	1.437.603.576.672	1.444.791.594.555	1.452.015.552.528	1.459.275.630.291
3	Pembiayaan	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750	120.045.986.750
3.1	Penerimaan Pembiayaan	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750	220.045.986.750
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dibagi menjadi permasalahan tingkat daerah dan per-urusan pemerintahan. Permasalahan tingkat daerah terkait dengan persoalan-persoalan makro yang memiliki keterkaitan dengan berbagai urusan, sedangkan permasalahan per-urusan adalah persoalan yang dihadapi oleh satu atau beberapa urusan pemerintahan di tingkat provinsi.

4.1.1. Permasalahan Tingkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, masih belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia, belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta belum tercapainya pelayanan publik yang optimal. Kelima permasalahan utama tersebut merupakan permasalahan pembangunan lintas sektor yang menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

1. Belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia

Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur adalah daya saing sumber daya manusia. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang kemudian diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kalimantan Timur dari sisi SDM tentunya masih menyisakan tantangan yang harus segera diatasi. Aspek daya saing seringkali diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mengukur berbagai aspek terutama pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data IPM yang ada, posisi Kalimantan Timur sudah lebih *baik* dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, serta rata-rata nasional. Namun demikian, bila dilihat daya saing antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur, maka akan terlihat adanya ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan IPM tiap daerah inilah yang menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal.

Belum optimalnya daya saing SDM Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Di samping itu, Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang

sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera. Oleh karena itu, program percepatan pengentasan kemiskinan diharapkan dapat ditetapkan dan diterapkan melalui pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang tepat guna.

Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional. maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Pemerintah mengkondisikan penciptakan pasar kerja yang sesuai dengan tuntutan global.

sedangkan kawasan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten, baik transmigrasi lokal maupun transmigrasi di luar Kalimantan. dalam rangka meningkatkan di kawasan transmigrasi perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

2. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah ini merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. LPE Kalimantan Timur cenderung menurun karena penurunan kontribusi sektor pertambangan (batu bara) akibat terjadinya penurunan harga batu bara di level internasional.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Sektor Kehutanan masih belum mengoptimalkan produktivitas kawasan yang telah diperuntukan untuk hutan produksi. Pada produksi hutan alam, produktivitas setiap tahun berada pada angka 30 m³/tahun dengan total produksi 2,0-2,6 juta meter kubik per tahun. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta hektare peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin perkebunan yang diterbitkan 2,76 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,35 juta hektare, termasuk 1,1 juta hektare kelapa sawit. Masih terdapat 1.41 juta Ha areal ijin perkebunan yang belum ditanami. Demikian pula di sektor pertambangan batubara dan mineral lainnya, luas areal yang di beri ijin 4,8

juta Ha tetapi yang dieksploitasi hanya seluas \pm 130 ribu Ha atau hanya 2,7% dari total luas IUP yang diberikan.

Industri hilir pertanian dalam arti luas juga belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi crude palm oil (CPO), walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Pembangunan juga belum berjalan merata, di mana masih tingginya kesenjangan antara satu kabupaten/kota terhadap yang lain. Indeks ketimpangan regional terus menunjukkan tren penurunan selama 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014-2015 indeks Williamson mengalami penurunan sebesar 0,03. Angka ini tetap hingga tahun 2015. Berdasarkan analisis terhadap data "PDRB Atas Harga Konstan Seri 2010 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016 Berdasarkan Kabupaten/Kota", indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Hulu dan Penajam Paser Utara.

3. Belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke sentra produksi

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas yang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi. Hal ini disebabkan karena rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan ketenaga listrikan.

Dilihat dari kondisi jalan, tahun 2017 kondisi mantap jalan Provinsi hanya mencapai 51,66%. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan layanan transportasi dalam mendukung mobilitas orang, barang dan jasa. Demikian pula pada transportasi darat yang masih memiliki fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang minim sehingga menyebabkan fatalitas kecelakaan semakin meningkat.

Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman belum sesuai harapan. Masih terdapat 6 titik kawasan pemukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar di tiga kabupaten/kota. Selain itu, akses masyarakat terhadap rumah layak huni belum optimal. Hal tersebut diindikasikan dengan perbaikan backlog kepemilikan dan penghunian rumah yang belum optimal setiap tahunnya. Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi telah mencapai 84,7%.

Persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota dan belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup,

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah

dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman. Informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih) pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO₂ pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO₂ atau sekitar 12,5 juta ton CO₂ per tahun. Sementara itu, emisi GRK dari sektor energi terus mengalami penurunan kecuali tahun 2014 yang sedikit meningkat dibanding 2013.

5. Belum tercapainya pelayanan publik yang optimal

Tata kelola pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, responsivitas, profesionalitas, serta efektivitas dan efisiensi melalui pelayanan prima. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik juga terkait hubungan antar aktor di dalam daerah, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah. Akuntabilitas administratif di dalam pembangunan daerah setidaknya terdiri dari akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Capaian akuntabilitas kinerja di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari dua indikator, yakni nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peringkat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2017 adalah “BB”, sementara peringkat EKPPD mengalami penurunan dari peringkat 3 menjadi peringkat 7 nasional dengan status “Sangat Tinggi”. Adapun akuntabilitas keuangan ditandai dengan capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dimana Provinsi Kalimantan Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017. Meskipun demikian, masih ada persoalan asset yang belum terselesaikan akibat pelimpahan wewenang.

Indikator akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif, sedangkan indikator akuntabilitas sosial dapat dilihat dari capaian indeks kepuasan masyarakat, terutama terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat. Capaian indeks kepuasan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur adalah 82,15. Angka tersebut telah menandakan kualitas yang cukup baik, namun belum optimal. Capaian akuntabilitas kinerja, keuangan, dan

akuntabilitas sosial dapat mencerminkan indikator kinerja utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni indeks reformasi birokrasi. Provinsi Kalimantan Timur memiliki predikat reformasi birokrasi “BB” pada tahun 2016

Pelaksanaan prinsip transparansi terkait tuntutan keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah diharapkan semakin terbuka dalam berhubungan dengan masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan. Gagasan One Map One Data serta Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan bagian yang perlu diperkuat. Upaya menjalankan transparansi juga berhubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi, yakni ketika pemerintahan semakin terbuka diharapkan dapat menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah. Capaian pelaksanaan prinsip transparansi, antara lain ditandai oleh indeks keterbukaan informasi public. Capaian indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat 3 pada tahun 2016 menjadi peringkat 8 pada tahun 2017. Adapun indeks persepsi korupsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan dari 5,58 pada tahun 2016 menjadi 5,56 pada tahun 2017. Standar layanan informasi publik perlu semakin dikuatkan, agar interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin bisa didekatkan.

Prinsip partisipasi ditandai oleh keaktifan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemerintah. Capaian pembangunan pada prinsip partisipasi dapat dilihat dari indeks demokrasi. Indeks yang bersifat komposit tersebut menilai capaian kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Saat ini, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,14 pada 2015 menjadi 73,64 pada 2016.

Capaian indikator-indikator di atas di satu sisi memperlihatkan keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, namun pada sisi lain juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Hal ini karena tata kelola pemerintahan merupakan realitas

kompleks yang terkait kapasitas kelembagaan, kapasitas personal aparatur pemerintahan, hingga struktur kesempatan bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan daerah pada tata kelola pemerintahan merentang dari berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, dan urusan penunjang.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah Per-Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan per-urusan menjadi basis utama perumusan permasalahan daerah dan isu-isu strategis. Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahan per-urusan juga dipetakan berbasis pada sinergitas RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Berbasis pada logika tersebut, maka pemetaan masalah per-urusan disusun berdasarkan pendekatan *vision based* (merujuk pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur) dan *problem based*.

1. Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
--------	---------------	---------	--------------

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendidikan	Kualitas pendidikan masyarakat belum optimal	Masih tingginya disparitas pelayanan pendidikan	Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Belum meratanya dan belum terpenuhinya kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
			Masih belum terfasilitasinya peserta didik dari keluarga miskin, disabilitas dan pekerja anak
			Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik kualifikasi S1
			Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan kejuruan (alat-alat lab, jaringan wifi, komputer, listrik)
		Masih Rendahnya minat baca	Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan Kab/Kota Kebudayaan
Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal	Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan	Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata
			Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
			Belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih rendahnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Konstruksi jalan dan jembatan belum sesuai standar keamanan dan kenyamanan
			Belum optimalnya penanganan/rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan strategis	Belum terhubungnya ibukota Kabupaten Mahulu dengan jaringan jalan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		provinsi	Belum semua kawasan strategis provinsi terhubung jalur darat secara baik
		tingginya pelanggaran pengguna jalan terhadap ketentuan batas muatan kendaraan maksimal	Belum optimalnya pengawasan batas muatan
	Rendahnya kualitas konstruksi infrastruktur	Belum optimalnya sistem pengawasan konstruksi bangunan	Belum terpenuhinya SDM tenaga konstruksi yang sesuai standar kompetensi
	Adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Belum disusun dan ditetapkannya Perda terkait RTRR sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
			Belum optimalnya kesesuaian Pola Ruang antara RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota
			Lemahnya pengawasan dan pengendalian pembangunan fisik dan pengembangan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari rencana tata ruang
	Masih rendahnya luas lahan pertanian beririgasi teknis	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi	Belum optimalnya fungsi bendungan
			Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
			Masih rendahnya ketersediaan jaringan irigasi
			Ketersediaan jaringan irigasi tidak sesuai dengan lokasi lahan pertanian strategis

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kondisi dan lokasi lahan pertanian eksisting dan ketersediaan jaringan irigasi, terutama data spasial
	Belum optimalnya akses air bersih masyarakat	Kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan	Belum tersedianya infrastruktur SPAM regional
		Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih	Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur air baku
	Tingginya kejadian banjir di Samarinda, Balikpapan dan Bontang	Infrastruktur pengendali banjir belum memadai	Rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai
			Belum optimalnya fungsi bendali, folder dan drainase
			Pembangunan infrastruktur pengendali banjir bersifat parsial dan pengananganan hulu hilir tidak terintegrasi
			Banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai
		Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan dan membantu mengurangi resiko banjir	Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan resiko banjir
	Tingginya laju abrasi pantai	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai	Infrastruktur pengendali abrasi belum memadai
	Tingginya volume sampah	Belum optimalnya penanganan persampahan	Belum tersedianya TPA Regional
Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	Masih rendahnya akses Masyarakat miskin terhadap rumah layak huni	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kualitas lingkungan kawasan pemukiman	Kurangnya ketersediaan drainase
			Kurangnya ketersediaan sanitasi layak
			Ketersediaan jalan lingkungan belum memadai
			Kurangnya pelayanan air bersih perpipaan
			Belum optimalnya upaya penataan kawasan pemukiman di sempadan Sungai Karangmumus, Sungai Karang Asam Besar, Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Rapak Dalam
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya kualitas demokrasi daerah	Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat	Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat
			Belum optimalnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat
	Masih Tingginya tingkat kriminalitas	Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitas	Terbatasnya ketersediaan Satuan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat
			Belum optimalnya penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial, hukum, dan agama
	Belum optimalnya kesiapsiagaan bencana	Belum optimalnya sistem penanggulangan kebencanaan	Masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menanggulangi bencana
Masih rendahnya infrastruktur kebencanaan			
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan			
Sosial	Tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Rendahnya kuantitas panti sosial untuk penanganan psiko sosial
			Terbatasnya fasilitas pelayanan panti sosial

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya pengendalian migrasi PMKS dari luar daerah
			Terbatasnya ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non-dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan.

Tabel 4.2.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kebudayaan	Lemahnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya lokal	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang penting pelestarian dan pengamalan kebudayaan lokal
			Belum optimalnya peran sekolah terhadap pendidikan kebudayaan
			Belum optimalnya penguatan lembaga adat dalam pelestarian budaya local

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi budaya masyarakat	Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat terkait pelestarian dan pengamalan budaya local
Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya penanganan kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya ruang kreatif bagi pemuda
			Masih belum optimalnya prestasi pemuda dalam olahraga dan seni budaya
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Pengarutamaan gender belum optimal	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengarusutamaan gender
			Masih rendahnya kerjasama dan pelibatan instansi terkait dalam pengarusutamaan gender
			Belum optimalnya kelembagaan unit layanan terpadu penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
	Masih tingginya jumlah pekerja anak	Belum optimalnya perlindungan anak	Belum berkembangnya layanan publik ramah anak
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Belum optimalnya pengembangan desa mandiri	Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping desa di daerah pedalaman
			Belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna
			Belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pembangunan desa belum terintegrasi antar sektor
		Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan anggaran desa
			Belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan desa
Perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi
			Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam keselamatan berlalu lintas dan ketentuan muatan maksimal
			Belum memadainya sarana dan prasarana terminal
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan	Terbatasnya fasilitas keselamatan perhubungan laut, sungai, danau dan penyeberangan
			Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar
			Terbatasnya dermaga yang sesuai standar
		Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi, terpadu dan memadai	Belum tersedianya moda transportasi yang terintegrasi melalui pepadu moda
Komunikasi dan Informatika	Masih rendahnya akses pelayanan jaringan komunikasi dan informasi	Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi	kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan
		Belum optimalnya layanan informasi publik	Terbatasnya jumlah dan kualitas sumberdaya PPID

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum terintegrasinya aplikasi layanan informasi publik
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan UMKM masih rendah	Minimnya kompetensi kewirausahaan
			Kurangnya inovasi produk UMKM yang mampu berdaya saing secara nasional dan internasional
			Kurangnya akses permodalan
			Rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha
			Belum tumbuhnya inkubasi bisnis
			Masih terbatasnya koperasi produksi (koperasi yang beranggotakan IKM produksi)
Ketahanan Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan (terutama beras)	Rendahnya akses pangan dan produktivitas lahan penghasil pangan	Panjangnya rantai distribusi pangan (dari luar daerah maupun ke dalam daerah)
			Belum optimalnya diversifikasi pangan, Pangan utama masih tergantung pada beras (padi)
			Rendahnya aksesibilitas distribusi pangan ke beberapa daerah
			Belum optimalnya perlindungan lahan pertanian pangan
	Produksi daging (sapi) belum memenuhi kebutuhan pangan daerah (swasembada)	Masih rendahnya populasi ternak sapi	Bibit ternak unggul sampai pengolahan produk ternak masih belum dilakukan secara mandiri

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya kompetensi peternak
			Terjadinya beberapa penyakit hewan
			Usaha peternakan masih berskala rakyat. Belum ada usaha peternakan besar
			Rendahnya jumlah peternak
Penanaman Modal	Belum optimalnya nilai investasi sektor sekunder dan tersier	Minat investasi pada sektor sekunder dan tersier masih rendah	Promosi investasi belum optimal
			terbatasnya ketersediaan informasi detail peluang investasi
			Terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi
	Kawasan strategis ekonomi belum memberikan daya tarik investasi	Promosi investasi pada kawasan strategis ekonomi belum optimal	Regulasi yang telah ada masih belum memudahkan investor
			Konflik kepemilikan dan penguasaan lahan
			Ketersediaan akses informasi peluang investasi yang masih terbatas
		Keterbatasan infrastruktur pendukung (jaringan jalan, pelabuhan, air n bersih, listrik, telekomunikasi)	
Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja lokal	Rendahnya kualifikasi tenaga kerja
			Rendahnya kualitas tenaga kerja
			Belum optimalnya kapasitas pelatihan oleh BLK

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Lingkungan Hidup	Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup	Tingginya Alih fungsi hutan dan lahan	Terbatasnya pengawasan kawasan lindung
			Rendahnya kualitas penghijauan dan reboisasi
			Belum tuntasnya tata batas kawasan
		Tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik	Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran di daerah tangkapan sumber air baku
			Rendahnya pengelolaan air limbah dan industri
			Terbatasnya ketersediaan pengelolaan limbah domestik (IPAL)
			Tingginya masyarakat yang bermukim di bantaran sungai
		Tingginya Pencemaran Udara	Meningkatnya Polusi Kendaraan bermotor di wilayah perkotaan
			Tingginya kebakaran hutan
			Tingginya aktivitas industri dalam bahan bakar diesel
		Masih tingginya angka emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			Masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah
			Masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi
			Masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%
Kearsipan Daerah	Belum optimalnya pengelolaan arsip daerah secara baku	Belum terintegrasinya sistem arsip daerah	Belum optimalnya kapasitas tenaga SDM kearsipan perangkat daerah
			Belum optimalnya sistem informasi kearsipan
Statistik	Belum optimalnya pemanfaatan data pembangunan daerah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik daerah	Belum optimalnya dokumentasi capaian pembangunan daerah
			Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data statistik sektoral
			Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan PPID

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral.

Tabel 4.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pilihan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Produktivitas perkebunan rakyat masih rendah	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan
			Terbatasnya Ketersediaan benih unggul
			Belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan (kelapa sawit)
		Masih rendahnya produksi padi	Luas tanam belum memadai
			Produktivitas masih belum optimal
			Jumlah keluarga petani semakin menurun
			Semakin meluasnya alih fungsi lahan pertanian
		Diversifikasi pangan belum optimal	Teknologi diversifikasi pangan (beras) masih belum optimal
			Promosi pangan non beras belum optimal
	Kelautan dan Perikanan	Kontribusi Sub Sektor Perikanan (Pertanian dalam arti luas) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Rendahnya produksi perikanan
Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional			
Masih rendahnya pengembangan budidaya perikanan darat			
Belum optimalnya Kawasan perlindungan perikanan			
Terminal pendaratan ikan belum merata			
Kehutanan	Masih rendahnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Ekspor masih dalam bentuk bahan mentah Kayu Alam	Belum adanya regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA
			menurunnya produktivitas kayu alam pada kawasan hutan
			Belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah.)	Masih rendah pengolahan hasil hutan kayu Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan selain kayu Belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu
		Akses masyarakat disekitar kawasan hutan belum memadai	Belum terselesaikannya konflik tenurial masyarakat Lambannya proses persetujuan perijinan perhutanan sosial
Pariwisata	kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah	Pengembangan destinasi pariwisata belum memadai	Minimnya SDM spesialisasi keahlian bidang pariwisata Inovasi pengemasan destinasi pariwisata masih rendah Sarana dan prasarana pendukung pariwisata belum terbangun secara optimal Akses menuju destinasi belum memadai
Perdagangan	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB belum optimal	Daya saing produk perdagangan antar daerah masih rendah Masih terbatasnya pasar produk di luar daerah	Rendahnya kualitas produk Belum optimalnya kuantitas dan kontiuitas produk Belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan
Perindustrian	Kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas terhadap PDRB belum optimal	Lambatnya pertumbuhan investasi Industri Kecil Menengah	Inovasi pengembangan produk olahan masih rendah Terbatasnya kemampuan Penguasaan dan pemilikan teknologi Terbatasnya akses permodalan Integrasi proses hulu-hilir antar sektor belum optimal
Energi Sumber Daya Mineral	Belum memadainya cakupan layanan ketenagalistrikan	Rendahnya akses ketenagalistrikan pada wilayah 3T	Belum optimalnya ketersediaan jaringan kelistrikan Masih terbatasnya daya listrik yang tersedia Keterjangkauan pembangkit listrik besar terbatas terhadap wilayah 3T Belum optimalnya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Pelaksanaan fungsi penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Penunjang Urusan Pemerintahan

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Belum efektifnya perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penetapan indikator kinerja yang berorientasi pada manfaat (Outcome)	Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti
			Terbatasnya data dan informasi
		Belum optimalnya pengendalian realisasi pelaksanaan pembangunan	Lambatnya pelaporan realisasi target pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil penelitian	Kualitas hasil penelitian belum memenuhi kebutuhan penyelesaian masalah pembangunan
Keuangan	Belum optimalnya Kemandirian Fiskal	Masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD)	Belum optimalnya upaya penggalan sumber-sumber PAD lainnya
			Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD
Pengawasan	Belum optimalnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum optimalnya kapasitas pengadministrasian aset daerah hasil pelimpahan kewenangan
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah
			Belum proporsionalnya tenaga auditor dengan obyek pengawasan
		Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik	Pelaksanaan SPM yang belum dikendalikan dengan baik
			Belum optimalnya penyelenggaraan survei IKM pada berbagai unit pelayanan
		Belum optimalnya upaya penerapan zona integritas pada perangkat daerah	Belum optimalnya komitmen aparatur dalam penerapan zona integritas
			Belum optimalnya penerapan survei indeks persepsi korupsi.
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Masih rendahnya profesionalitas aparatur	Belum optimalnya penerapan standar kompetensi	Rekomendasi hasil pengukuran kompetensi yang belum diimplementasikan secara optimal
			Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi profesi
		Belum optimalnya penyelenggaraan diklat	Belum optimalnya identifikasi kebutuhan diklat pada masing-masing perangkat daerah
			Belum optimalnya dukungan SDM, sarana dan prasarana

Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penyelenggaraan diklat
		Penempatan pegawai ASN masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki	Belum optimalnya sistem administrasi kepegawaian
Kesekretariatan	Belum optimalnya fungsi Koordinasi dan Integrasi pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya produktivitas DPRD dalam merumuskan raperda	Belum optimalnya fasilitasi legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat
		Belum optimalnya Integrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah	Lambatnya proses penataan organisasi dan tata laksana perangkat daerah
		Belum optimalnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Belum optimalnya pembinaan administrasi pemerintahan pada kabupaten/kota

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan.

4.2.1 Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Negara-negara dalam organisasi PBB berkomitmen untuk berupaya mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

B. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri. Dengan ketersediaan

teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk mendukung partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

C. Pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Ekonomi hijau mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan ekologi dan sosial-budaya masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi hijau tersebut menjadi pedoman perubahan paradigma pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus didukung keberlanjutan ekologi. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Misalnya pada sektor perkebunan, dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Pada sektor perikanan dilakukan dengan mendorong budidaya perikanan darat yang tidak membuka seluas-luasnya Kawasan berhutan, namun dilakukan dengan integrasi perikanan dan hutan (*aquasilviculture*), serta menetapkan

dan mengelola kawasan perlindungan bagi perbenihan biota air di alam (*reservat*).

D. Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (Paris Agreement)

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyetujui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

4.2.2 Isu Nasional

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan periode 2015-2019, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian dipertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2015-2019, dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

Tabel 4.5
Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.

Arah kebijakan nasional tersebut menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023.

4.2.3 Isu Strategis Kewilayahan

Perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dimana kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata antara wilayah satu dengan wilayah lain. Kemajuan pembangunan di kawasan pesisir terutama Balikpapan, Samarinda dan Bontang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya, sementara sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, air bersih dan sanitasi, keterbatasan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Isu strategis kewilayahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah, antara lain :

1. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Tingkat keberhasilan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Kalimantan Timur masih rendah, hanya 2 KSP yang berkembang dengan pesat dari 7 KSP yang ada, yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda. Infrastruktur pendukung konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal, terutama terkait dengan jaringan air bersih, telekomunikasi dan transportasi.

Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektivitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan. Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektivitas antar kawasan.

2. Peningkatan Daya Saing Daerah

Kebutuhan akan peningkatan daya saing daerah dilatarbelakangi oleh pengalaman perekonomian Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan cukup berat, dimana pada periode tahun 2015-2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang sangat tajam. Rendahnya kondisi daya saing daerah disebabkan oleh pengaruh eksternal buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.

Disamping itu, pengaruh internal terhadap rendahnya daya saing daerah antara lain :

- Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.

- Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
- Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless). Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan, inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi. Keunggulan berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, serta antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai timing-nya.

Peningkatan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peningkatan daya saing dilakukan melalui upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki, meliputi :

- Memperkuat kelembagaan dan tatakelola pemerintahan daerah meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan inovasi pemerintahan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah baru dan pengembangan investasi, penataan pola hubungan kerja sama antara Pusat-daerah dan antar daerah, serta kolaborasi multipihak swasta.

- Meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal.

3. Pemanfaatan Ruang

Daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami Konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai $\pm 88,47$ % lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar, dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas. Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut. Sementara dilain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur melalui dana desa pada kawasan-kawasan tersebut. Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti banjir dan tanah longsor.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan Sumber Daya Alam melalui pengendalian perijinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Dengan adanya investasi pemanfaatan ruang yang mampu mengolah sumber daya alam secara lestari, maka ekonomi daerah akan berputar, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, ada profit, ada pajak dan ada multiplier effect untuk daerah, yang selanjutnya diharapkan akan mampu mempersempit ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Harmonisasi Peraturan Perundangan terkait pemanfaatan ruang merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah.

4.3 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis disusun berdasarkan beberapa permasalahan utama pembangunan yang mengemuka berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah dan perumusan masalah per-urusan pemerintahan.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sinergitas target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Target pembangunan nasional, isu internasional, dan kesepakatan regional-global.

Berikut adalah isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan

tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

2. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi

dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah. Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh

infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi transformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum

yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan social. Berdasarkan capaian Pembangunan Kalimantan Timur , masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM.

Sementara di daerah, Kalimantan Timur juga menghadapi masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM sebagai berikut :

1. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapaian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;
2. Kapasitas Daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada permasalahan lemahnya pemahaman aparatur daerah;
3. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
4. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi terkait pencapaian indikator-indikator kinerja SPM.

BAB 5

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 5 tahunan adalah:

Tabel 5.1

Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)	Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)	Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)	Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)
<p>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.</p> <p>Kata kunci: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar</p>	<p>Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.</p> <p>Kata kunci: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.</p>	<p>Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.</p> <p>Kata kunci: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.</p>	<p>Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.</p> <p>Kata Kunci: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.</p>

Pada periode 2018-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan

efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

5.1 Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023 yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 5.2.
Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023**

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2018-2023
Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023:

Tabel 5.3.

Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing		

5.2 Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani

(pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak

selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-

besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan

faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energy baru terbarukan (EBT).

Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar

ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan hingga tingkat Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip

dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, membenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan membenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,12	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87	76,87
		Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	77,50
		Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
		Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8	73,8
		Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,19	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70	5,70
		Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56,70	56,71	56,72	56,73	56,75	56,75
		Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
		Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	51	52	53	54	55	55
2	BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
		Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	4,90

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	503	478	448	413	368	368
		Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,03
		Tujuan 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	5,24	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
		Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	20	20	20	21	21	21
		Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	25,53	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29
		Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57
			Rasio Pemenuhan Beras (%)	62,82	62,46	67,41	72,69	78,40	84,53	84,53
		Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,3	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37
		Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
		Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,52	1,58	1,64	1,71	1,78	1,78
		Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,15	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,2

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8,16	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
3	BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326	0,326
Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah		Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000	12.050.000	
		Jumlah barang (ton)	325.051.663	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000	376.900.000	
Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan		Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2	3	3	3	6	6	
Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air		Cakupan layanan air minum (%)	71,83	73,33	75,00	77,00	81,00	85,00	85,00	
		Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	14.008,5	14.808,5	15.558,5	16.258,5	16.925,5	16.925,5	
		Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	664	575	505	435	365	365	
Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh		Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673,42	620,06	533,56	459,56	409,56	359,56	359,56	
Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah		Rasio elektrifikasi (%)	84,21	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00	95,00	
4		BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,65	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15
Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)		7,2	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33	29,33	
Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana		0	145	140	135	130	125	125	
Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)		73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09	83,09	
5	BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI	Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,93)	B (69,50)	B (70,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)	B (74,50)

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
	PELAYANAN PUBLIK	Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
		Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81	81,50	82	82,50	83	83
		Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

BAB 6

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan utama yang terjadi di daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi berdasarkan lima misi.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS			
1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat	1) Pengembangan Demokrasi di Daerah 2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
	2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana)
			2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA/SLB, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
			3) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa KALTIM TUNTAS</p> <p>5) Penyediaan Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin</p> <p>6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh</p> <p>7) Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Luar Biasa</p> <p>8) Penguatan kapasitas kelembagaan tentang anak</p> <p>9) Pengembangan perpustakaan digital</p> <p>10) Pemenuhan Bahan Bacaan Perpustakaan</p>
	3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	<p>1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)</p> <p>2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit</p> <p>3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin</p>
2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	<p>1) Peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat</p> <p>2) Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3) Peningkatan akses dan keterampilan perempuan dalam berwirausaha</p>
	5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda dan penyandang	Peningkatan prestasi keolahragaan dan kesempatan pemuda dan penyandang disabilitas	1) Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	disabilitas	berwirausaha	2) Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas
	6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	1) Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
MISI 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
3. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	7. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Optimalisasi pengelolaan UKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis
			2) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan
			3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan keunggukan kompetitif UKM
			4) Fasilitasi Kewirausahaan Pemuda dengan Penumbuhan Usaha Rintisan (<i>Startup</i>) Industri Kreatif
			5) Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi untuk perempuan dan keluarga
			6) Pengembangan Industri Kreatif berbasis potensi dan keunggulan daerah
	8. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan secara merata	1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
			2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa
			3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam membangun desa berkualitas
			4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	9. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata	1) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat 2) Pemanfaatan Anjungan Kaltim di TMII sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata Kaltim
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	10. Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah	1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan khususnya sektor pertanian, migas dan pertambangan 2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas 3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor
	11. Meningkatnya realisasi investasi	Percepatan proses perizinan dan pengendalian rencana investasi	1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi 2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi
	12. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering 2) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 3) Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani 5) Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian
	13. Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui pola kemitraan	1) Pembangunan Miniranch sapi 2) Penyediaan Informasi Peternakan 3) Fasilitasi Penyediaan Permodalan bagi Peternak
			1) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak
	14. Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	1) Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan 2) Pengembangan Kebun Rakyat di lahan cadangan carbon rendah melalui kemitraan 3) Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir 4) Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani 5) Pengelolaan areal perkebunan yang menilai konservasi tinggi 6) Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa Perkebunan 7) Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan
	15. Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1) Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan 2) Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan 3) Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	16. Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	1) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan 2) Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 3) Pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi 4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
	17. Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1) Peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN			
5. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	18. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran 2) Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan 3) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan masyarakat
	19. Meningkatkan konektivitas antar kawasan	Penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan	1) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan 2) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi (hinterland) dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah
			3) Peningkatan aksesibilitas ke kawasan strategis pariwisata nasional dan provinsi
	20. Meningkatkan fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan sarana dan prasarana dan distribusi air bersih	1) Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku 2) Peningkatan infrastruktur layanan air minum
	21. Menurunnya kawasan kumuh	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	1) Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi keluarga pra sejahtera pada kawasan kumuh 2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat
	22. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	1) Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
MISI 4 : BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	23. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	24. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
	25. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
7. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	26. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1) Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur
			2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
			2) Penataan pola hubungan kerjasama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
	1) Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah		
	2) Meningkatnya kapabilitas APIP		
	27. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Peningkatan efisiensi di berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/ teknologi informasi
2) Peningkatan kualitas komunikasi dan teknologi informasi			

Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah

3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi.
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar
5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan tahunan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tematik pembangunan setiap tahun diprioritaskan, dengan mengacu pada pelaksanaan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Arah Tematik Tahunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun	Arahan Tematik Tahunan
2019	Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri
2020	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi
2021	Menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan
2022	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas
2023	Penguatan pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi Kalimantan Timur

Gambar 6.1
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, RKPD Tahun 2019-2023



6.3 Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (*Dedicated Program*)

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut diatas telah dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu :

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama.
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA

7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat

30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

6.4 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kewilayahan

1. Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan sinergi Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota dalam lima tahun (2019-2023) mendatang diarahkan untuk mendukung: (1) penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah; (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah ; (3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1	PASER	Peningkatan Produktifitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan rakyat (kopi, aren, sagu, kelapa, kakao, sawit)
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan Air Bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengendalian kawasan budidaya perikanan pada kawasan cagar alam teluk adang teluk apar
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
2.	KUTAI BARAT	Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan karet rakyat
			Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian
		Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi Kresik Luway dan kawasan eks galian tambang
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
3.	KUTAI KARTANEGARA	Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
		Peningkatan Produktifitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan industri Pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan wisata budaya
4.	KUTAI TIMUR	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan industri Maloy	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
5.	BERAU	Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Pengembangan industri Pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan ekowisata

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
		Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
6.	PENAJAM PU	Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan Agroindustri	Pengembangan kawasan industri Buluminung sebagai pusat industri pengolahan produk pertanian
7.	MAHAKAM ULU	Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi, jalan menuju ibukota kabupaten
		Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan Mini Ranch melalui pola kemitraan
8.	BALIKPAPAN	Pengembangan industri Pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan wisata buatan
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Pengembangan kawasan industri	Pengembangan kawasan industri kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk
		Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan sentra produksi ke kawasan industri kariangau
			Peningkatan Upaya pengendalian banjir
			Pengembangan Direct Call Pelabuhan Kariangau
			Peningkatan pelayanan air bersih

NO.	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
9.	SAMARINDA	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan Bandara APT Pranoto ke kawasan lainnya Peningkatan Upaya pengendalian banjir Peningkatan pelayanan air bersih
		Peningkatan upaya rehabilitasi Lahan Kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang
		Pengendalian perluasan kawasan pertambangan	Pembatasan wilayah kerja konsesi pertambangan pada kawasan permukiman
10.	BONTANG	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi	Peningkatan Upaya pengendalian banjir Peningkatan pelayanan air bersih
		Peningkatan produktifitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk Perikanan Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil perikanan

2. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memerhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (*spasial*) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena pengkluster-an wilayah mempunyai pengaruh

penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2016-2036, dan berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu, Provinsi Kalimantan Timur menetapkan prioritas pengembangan kawasan untuk lima tahun kedepan pada Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur, dan Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Tabel 6. 4
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kawasan Strategis Provinsi

No.	KAWASAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS
1.	Kawasan Industri Kariangau–Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan (Kabupaten Penajam dan Kota Balikpapan)	Pengembangan Aneka Industri dan Agroindustri yang terintegrasi	Percepatan realisasi investasi industry pengolahan, pengembangan direct call terminal pelabuhan peti kemas, dan percepatan penyelesaian jaringan infrastruktur antar kawasan sekitarnya.
2.	Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur	Pengembangan pusat/sentra pengolahan <i>oleo chemical</i> berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier)	Percepatan realisasi investasi industri pengolahan kelapa sawit, <i>oleo chemical</i> , dan industri turunannya.
3.	Kawasan Danau Semayang-Danau Jempang-Danau Melintang dan sekitarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	Peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan sekitarnya	Pengembangan Ekowisata, peningkatan nilai tambah produk Perikanan, pengendalian banjir

6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangu*an Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
MISI 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas																
Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing																
	Sasaran 1 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	72,86		74,5		75,5		76,5		77,5		77,5			
1	5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	67,18	2.492.300.000	69	1.000.000.000	70	1.075.000.000	71	1.140.000.000	72	1.260.000.000	72	6.967.300.000	Kesbangpol	
1	1	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	72	10.000.000.000	150	10.000.000.000	233	10.000.000.000	233	10.000.000.000	233	10.000.000.000	233	50.000.000.000	Disdikbud	
2	16	Program Pengembangan Nilai Budaya	17	1.097.268.226	150	9.200.000.000	233	9.200.000.000	233	11.763.300.000	233	17.028.200.000	233	48.288.768.226	Disdikbud	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sasaran 2 : Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat	Rate-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80					
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96					
1 1	42	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	0	0	55	20,000,000,000.00	70	20,000,000,000.00	86	20,000,000,000.00	86	20,000,000,000.00	86	20,000,000,000.00	86	20,000,000,000.00	86	80,000,000,000	Disdikbud
1 1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	68,23	69%	72,00%	117,863,785,000	76,00%	154,660,020,000	78,00%	163,543,900,000	80,00%	169,254,000,000	80,00%	169,254,000,000	85	742,261,705,000	85	742,261,705,000	Disdikbud
1 1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Keluruan	68,23	69%	72,00%	72,532,337,000	76,00%	108,093,000,000	76,00%	224,257,023,420	78,00%	362,235,297,400	80,00%	447,616,363,500	85	1,214,734,021,320	85	1,214,734,021,320	Disdikbud
1 1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	95	96,00%	98,00%	6,828,750,000	99,00%	14,770,000,000	99,00%	28,340,000,000	100,00%	30,349,000,000	100,00%	37,725,000,000	100	118,015,750,000	100	118,015,750,000	Disdikbud

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	1	23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	791	6500	80,016,703,000.00	13000	93,570,000,000.00	19500	100,000,000,000.00	26000	110,000,000,000.00	31709	121,000,000,000	31709	504,586,703,000	Disdikbud
1	1	38	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	635	2500	11,750,025,875	2500	77,943,407,000	2500	53,718,361,600	2500	57,855,561,600	2500	30,180,000,000	2500	231,447,356,075	Disdikbud
1	2	107	Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	0	85.00%	0	90.00%	20,000,000,000.00	95.00%	20,000,000,000.00	97.00%	20,000,000,000.00	100.00%	20,000,000,000.00	100	80,000,000,000	Disdikbud
1	1	19	Pendidikan Luar Biasa	60	65	8,060,811,000	70	23,793,195,800	75	24,356,000,000	80	40,689,400,000	85	45,090,000,000	85	141,989,406,800	Disdikbud

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	2	21	Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	76.00%	223,985,000	82.00%	-	88.00%	-	94.00%	-	100%	-	100	223,985,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	#	23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	2,447	3,662	796,500,000	4,559	1,000,000,000	5,771	1,125,000,000	6,393	1,200,000,000	70,323	1,500,000,000	70,323	5,621,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipian Daerah	
			Sasaran 3 : Meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,7	73,72		73,74		73,76		73,78		73,80		73,80			
1	2	56	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50	60	1,441,700,240	70	653,350,000	80	1,453,350,000	90	1,822,988,500	100	2,017,995,000	100	7,389,333,740	Dinas Kesehatan	
1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	15	2,385,297,500	43	2,500,000,000	64	3,000,000,000	96	5,412,331,760	100	4,570,710,000	100	15,668,339,260	Dinas Kesehatan	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	17	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh pelayanan Kesehatan (%)	87.5	41,478,068,000	90	41,500,000,000	92	41,500,000,000	95	41,000,000,000	100	41,500,000,000	100	206,978,068,000	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat																
			Sasaran 4 : Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	56,64		56,71		56,72		56,73		56,75		56,75		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	37	158,900,000	40	650,000,000	43	150,000,000	46	160,000,000	47	160,000,000	47	1,278,900,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	20	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	0,060		0,054	200,000,000	0,048	250,000,000	0,042	300,000,000	0,038	350,000,000	0,038	1,100,000,000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	35	Rasio KDRT		-											

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	6	23	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya (Orang)	1000	1.380,185,000	1500	1.375,203,500	2500	1.518,203,500	3000	1.518,203,500	3500	1.518,203,500	3500	7.309,999,000	Dinas Sosial
1	06	18	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusitas (%)	32	212,200,000	431	233,420,000	45	233,420,000	461	233,420,000	475	233,420,000	475	1,145,980,000	Dinas Sosial
			Indeks Pembangunan Pemuda	56,74		57,23		57,82		58,27		58,86		58,86		
2	13	33	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	24,15%	3.911,650,000	35,00%	3.500,000,000	40,00%	5,210,000,000	55,00%	7,225,000,000	60,00%	7,830,542,000	60,00%	27,677,192,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	13	35	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,09	-	0,15	1,478,200,000	1	2,500,000,000	1,5	3,000,000,000	2	5,000,000,000	2	11,978,200,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022			2023		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
2	15	Sasaran 6 : Meningkatkan daya saing tenaga kerja	50	51	80.00%	6,957,500,000	8,007,500,000	80.00%	7,007,500,000	7,357,875,000	80.00%	7,357,875,000	80.00%	36,688,250,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	80.00%	80.00%	80.00%	8,007,500,000	8,007,500,000	80.00%	7,007,500,000	7,357,875,000	80.00%	7,357,875,000	80.00%	36,688,250,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN															
Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan															
2	11	Sasaran 7 : Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	-	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	Dinas Perindustrian
2	11	Program Penguatan Kelengkapan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	0	0	100 Koperasi	3,424,608,000	3,733,608,000	100 Koperasi	3,733,608,000	4,033,608,000	100 Koperasi	4,333,608,000	400 Koperasi	15,525,432,000	Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	11	Sasaran 8 : Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	518	503	478	448	413	368	368	368	368	368	368	368	Dinas Perindustrian

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	7	16	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	302	148,045,000	25	670,000,000	30	700,000,000	35	720,000,000	40	714,000,000	40	2,952,045,000	DPMPD
2	7	29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	289	300,000,000	25	1,000,000,000	30	1,080,000,000	35	1,130,000,000	40	1,125,000,000	40	4,635,000,000	DPMPD
2	7	28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	63	475,000,000	103	1,150,000,000	138	1,242,000,000	173	1,280,000,000	213	1,295,000,000	213	5,442,000,000	DPMPD
2	7	30	Program Kampung Iklim +	28		22	2,000,000,000	25	1,250,000,000	27	1,500,000,000	28	1,650,000,000	28	6,400,000,000	DPMPD
			Sasaran 9 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	0.93		0.95		0.99		1.01		1.03		1.03		
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	1,885,600,000	2	2,800,000,000	2	3,050,000,000	2	3,050,000,000	2	3,050,000,000	2	13,835,600,000	Dinas Pariwisata

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan																	
3	7	Sasaran 10 : Meningkatkan kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	18,33	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
		0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5		22.902.780,000
3	7	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri			4.080,000,000			4.692,000,000					5.395,810,000			6.205,170,000	
		Sasaran 11 : Meningkatkan realisasi investasi	25,53	31,5	33,08	34,73	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29		
2	12	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan	15	14	13	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	1.600,000,000	6.441,000,000
					1.500,000,000			1.520,000,000					1.600,000,000			1.600,000,000	
2	12	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	2.250,000,000	8.919,400,000
					500,400,000			2.000,000,000					2.250,000,000			2.570,000,000	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 12 : Meningkatkan kontribusi sektor pertanian pangan dan tanaman hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57		
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	57,91	75,43	77,62	79,94	82,02	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16	85,16			
3	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah produksi padi (Toni)	383,958	403,000	423,000	444,000	466,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	68,271,580,000	DPTPH	
3	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	226,017	233,020	240,245	247,698	255,387	263,320	263,320	263,320	263,320	263,320	263,320	18,070,600,000	DPTPH	
	Sasaran 13 : Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0.3	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37			
3	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	0	5	35	40	35	35	35	35	35	35	35	7,600,000,000	Dinas Peternakan	
3	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	20	20	20.5	21	22	22	22	22	22	22	8,300,000,000	Dinas Peternakan	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab											
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD													
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
	Sasaran 14 : Meningkatkan kontribusi usaha sub sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49																								
3	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13,249,959	15288465 Ton	21,805,111,250	17136849 Ton	16,717,791,000	18126358 Ton	16,717,791,000	18313874 Ton	16,717,791,000	18313874 Ton	18,472,673,000	18313874 Ton	88,690,761,250											Dinas Perkebunan	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	98	35	1,010,821,250	35	1,010,821,000	35	1,150,000,000	35	1,150,000,000	35	1,537,331,000	140	5,251,373,250												Dinas Perkebunan
3	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikasi (Produk)	0	2	2,251,383,750	2	2,251,383,000	3	2,400,000,000	3	2,400,000,000	3	3,424,072,000	10	10,326,838,750												Dinas Perkebunan
3	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	1,87	4,79	977,500,000	4,07	977,500,000	4,06	1,020,000,000	4,04	1,020,000,000	4,04	1,490,000,000	4,04	4,740,800,000												Dinas Perkebunan
	Sasaran 15 : Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,46	1,52		1,64		1,71		1,78		1,78		1,78													

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	1	25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	154.956 Ton	4.125.830.000	158.055 Ton	5.555.000.000	161.216 Ton	6.110.500.000	164.441 Ton	6.721.550.000	167.730 Ton	6.721.550.000	167.730 Ton	167.730 Ton	29.234.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	1	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	152.027 Ton	15.396.907.000	155.516 Ton	18.157.500.000	158.938 Ton	16.121.500.000	162.593 Ton	13.093.650.000	166.170 Ton	11.279.213.620.000	166.170 Ton	166.170 Ton	74.048.770.620	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	1	29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Unggulan Unggulan	2,6 Miliar Ekor	3.796.810.000	2,7 Miliar Ekor	4.799.100.000	2,8 Miliar Ekor	5.111.750.000	2,9 Miliar Ekor	5.510.425.000	3 Miliar Ekor	4.789.100.000	3 Miliar Ekor	3 Miliar Ekor	24.007.185.000	Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)
3	1	26	Program Pengelolaan Ruang Laut	1 Kawasan	3.122.885.000	1 Kawasan	3.795.000.000	1 Kawasan	4.174.500.000	1 Kawasan	4.591.950.000	1 Kawasan	4.591.950.000	1 Kawasan	1 Kawasan	20.276.285.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Sasaran 16 : Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2			
3	4	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	160	3.471.960.000,00	165	3.471.960.000,00	170	3.471.960.000,00	175	3.471.960.000,00	180	3.471.960.000,00	180	17.359.800.000	Dinas Kehutanan	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	4	41	Program Perlindungan dan KSDAE	52	782,100,000.00	51.75	782,100,000.00	51.5	782,100,000.00	51.25	782,100,000.00	51	782,100,000.00	51	3,910,500,000	Dinas Kehutanan
3	4	39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	218	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	1,194,850,000.00	1398	5,974,250,000	Dinas Kehutanan
3	4	42	Program Penyuluhan, pemberian bantuan yang dikelola masyarakat hutan dan perhutanan sosial	118,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	2,330,970,000.00	32,000	11,654,850,000	Dinas Kehutanan
			Sasaran 17 : Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah	-8.16		3.84		3.84		3.84		3.84		3.84		
4	4	30	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	0		4	3,946,999,000	6	4,341,700,000	8	4,775,871,000	10	5,046,127,000	10	18,110,697,000	Badan Pendapatan Daerah
Misi 3 : BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN																
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar																
			Jumlah penumpukan yang terlayani (orang)	10,392.536	11,026.000	11,536.200	11,700.000	12,050.000	12,050.000	12,050.000	12,050.000	12,050.000	12,050.000	12,050.000	12,050.000	
			Jumlah barang (ton)	325,051.663	344,850.000	355,200.000	365,900.000	376,900.000	376,900.000	376,900.000	376,900.000	376,900.000	376,900.000	376,900.000	376,900.000	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	9	19	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	3.037,846,500	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (85%)	30.200,000,000	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%)	40,609,330,000	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90%)	27,909,330,000	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	27,909,330,000	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	129,665,836,500	Dinas Perhubungan
2	9	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	4,375,614,000	598	21,800,000,000	512	39,790,670,000	427	29,590,670,000	342	29,590,670,000	342	125,147,624,000	Dinas Perhubungan
1	3	15	Sasaran 19 : Meningkatkan konektivitas antar kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2		3		3		3		6		6		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	58,88	994,570,504,517	63,46	1,329,828,399,770	68,04	2,029,191,334,197	71,62	2,661,831,219,624	71,62	7,567,902,561,128	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
			Sasaran 20 : Meningkatkan fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	75		77		81		85		85		
				Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13,618,5	14,806,5		15,558,5		16,258,5		16,925,5		16,925,5		
				Luas genangan banjir perkeaan (Ha)	730	664		505		435		365		365		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 3 16	Program Pengelolaan Air Baku Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7922	148,924,820,000	8322	216,507,087,018	8622	256,652,331,562	8622	301,998,744,857	8882	347,763,677,742	8882	1,271,846,671,179	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat	
1 3 17	Program Pembangunan Infrastruktur Kecipranya	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	60,23	258,960,950,000	65,23	223,724,000,251	67,23	265,207,409,281	71,23	312,065,369,686	75,23	359,355,800,334	75,23	1,419,313,529,552	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat	
	Sasaran 21 : Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673,42		533,56		459,56		409,56		359,56		359,56			
1 4 15	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51,722	47,055,350,000	41,722	209,290,193,784	36,722	248,097,253,843	31,722	291,932,120,029	26,722	336,171,555,151	26,722	1,132,546,472,807	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat	
	Sasaran 22 : Terpenuhiya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	84,21		87,50		89,50		92,00		95,00		95,00			
3 5 47	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	-	3,63	47,692,828,000	4,13	47,692,828,000	4,63	47,692,828,000	5,13	47,692,828,000	5,13	190,774,312,000	DESDM	
3 5 37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945,607	1,723,350,000	989,607	11,000,000,000	1,038,607	11,000,000,000	1,041,607	11,000,000,000	1,078,607	11,000,000,000	1,078,607	45,723,350,000	DESDM	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Misi 4 ; BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN																
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup																
	Sasaran 23 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7.2	26.89	26.3	26.89	27.75	28.5	29.33	29.33	29.33	29.33	29.33	29.33		
2	5	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	417	550	500	550	600	640	670	670	670	670	670	670	DLH	
2	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	0	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	Terencana sedang (8)	DLH	
	Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0	140	145	135	135	130	125	125	125	125	125			
1	5	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	60	25 Persen	60 Persen	50 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	BPBD		
1	5	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	88 Persen	87 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	BPBD		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Sasaran 25 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09						83,09				
		Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/ Kota (%)	63,19	64,87	75,34	77,19	90	96,82						96,82				
1	3	70		6.297,172,500		21,650,709,702		25,665,233,156		30,199,834,486		34,776,367,774		118,589,317,618				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
Misi 5 : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK																		
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik																		
		Sasaran 26 : Tenwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00						80,00				
		Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71,05	73	75	77	79	81						81				
4	1	60		2,974,660,000		2,547,303,400		2,198,578,969		1,832,418,318		1,447,949,632		11,000,910,319				Biro Organisasi (SETDA)
		Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	86	87	90	92	95	97						97				
4	1	80		1,145,920,000		1,203,216,000		1,263,376,800		1,326,545,640		1,392,872,923		6,331,931,363				Biro Organisasi (SETDA)

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4 3 48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	78,53	80	7.085.850.000	85	8.585.850.000	90	7.385.850.000	95	8.585.850.000	100	8.585.850.000	100	8.585.850.000	100	6.000.000.000	Bappeda
	Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81		81,50		82		82,50		83		83				
4 1 42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	50	906.920.000	61	952.266.000	71	999.879.300	79	1.049.873.265	89	1.102.366.929	89	1.102.366.929	89	5.011.305.494	Biro Organisasi (SETDA)
4 1 81	Program Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52,63	60,53	224.960.000	68,42	236.208.000	78,95	248.018.400	89,47	260.419.320	92	273.440.286	92	273.440.286	92	1.243.046.006	Biro Organisasi (SETDA)
2 10 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2,6	2.143.730.000	2,8	3.601.000.000	3	3.571.000.000	3,2	3.731.000.000	3,5	3.991.000.000	3,5	3.991.000.000	3,5	17.037.730.000	Diskominfo

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SIPP) Pemda	Level 3															
	Sasaran Z8 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Level 3															
4	2	99	65	2.322.305.000	70	2.522.305.000	75	2.522.305.000	80	2.522.305.000	85	2.522.305.000	85	2.522.305.000	85	12.411.525.000		Inspektorat
4	2	21	3	2.767.000.000	3	2.767.000.000	3	2.767.000.000	3	2.767.000.000	4	2.767.000.000	4	2.767.000.000	4	13.835.000.000		Inspektorat

BAB 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bagian ini menjabarkan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian sebagai berikut :

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kode	KAPASITAS RIIL /BELANJA	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	8,566,250,000,00.00	5.518.720.811.513	5.513.723.979.007	6.084.616.771.007	6.660.691.857.637	7.337.479.109.507
II	BELANJA	8,566,250,000,00.00	10.669.670.000.000	11.534.474.227.000	12.147.101.010.000	13.246.220.487.000	14.201.152.017.500
II	1 Belanja Tidak Langsung	5,193,673,675,886.00	6.486.979.778.075	6.526.656.978.075	6.526.656.978.075	6.526.656.978.075	6.526.656.978.075
II	1 1 Belanja Pegawai	1,672,792,329,286.00	1.774.799.167.283	2.287.901.347.513	2.287.901.347.514	2.287.901.347.515	2.287.901.347.516
II	1 2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
II	1 3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
II	1 4 Belanja Hibah	1,055,451,599,600.00	740.543.638.400	730.944.338.400	730.944.338.400	661.811.399.190	383.667.120.559
II	1 5 Belanja Bantuan Sosial	5,500,000,000.00	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000	9.774.550.000
II	1 6 Belanja Bagi Hasil	1,890,570,835,000.00	2.579.253.034.454	2.977.391.300.000	3.019.125.291.000	3.542.169.681.370	3.820.313.960.000
II	1 7 Belanja Bantuan Keuangan	551,858,912,000.00	1.357.609.387.938	495.645.442.162	453.911.451.161		
II	1 8 Belanja Tidak Terduga	17,500,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
II	2 Belanja Langsung	3,372,576,324,114.00	4.143.013.021.925	5.007.817.248.925	5.620.444.031.925	6.719.563.508.925	7.674.495.039.425
II	2 1 Belanja Pegawai	215,026,293,328.00	292.637.422.329	353.721.970.813	396.994.227.424	474.629.390.258	542.079.987.229
II	2 2 Belanja Modal	1,527,763,510,934.00	1.430.451.320.072	1.729.040.859.031	1.940.561.504.951	2.320.052.686.483	2.649.760.331.897
II	2 3 Belanja Barang dan Jasa	1,629,786,519,852.00	2.419.924.279.524	2.925.054.419.081	3.282.888.299.550	3.924.881.432.184	4.482.654.720.299

7.2. Program Perangkat Daerah

Pada bagian ini menyajikan rumusan program pembangunan 5(lima) tahun kedepan baik program yang bersifat strategis maupun program yang bersifat operasional. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Perumusan program bagi penyelenggaraan urusan dilakukan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah di tiap urusan (wajib dan pilihan) sebagaimana Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.

Berbagai program yang disajikan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			2,967,409,713,675.00	3,570,831,251,175.00	4,178,773,050,595.00	5,280,866,855,225.00	6,217,315,243,675.00								
1.01	Pendidikan			880,900,940,675.00	747,346,612,000.00	894,917,796,020.00	1,104,286,504,000.00	1,212,982,648,500.00								
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan peminangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76,80%	80,26%	185,000,000,000.00	82,67%	185,000,000,000.00	86,30%	192,000,000,000.00	88,26%	210,525,082,000.00	88,26%	215,442,596,000.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	5,613,548,200.00	6 unit	5,613,548,200.00	6 unit	14,108,890,000.00	6 unit	18,618,444,000.00	6 unit	18,618,444,000.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	6,955,460,000.00	92%	6,955,460,000.00	93%	6,955,460,000.00	97%	9,828,450,000.00	97%	14,850,000,000.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	78%	4,228,862,075.00	81%	4,132,041,000.00	82%	4,132,041,000.00	83%	6,180,000,000.00	84%	9,906,000,000.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	60%	28.793.195.800,00	70%	23.793.195.800,00	75%	24.356.000.000,00	80%	40.689.400.000,00	85%	45.090.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	95%	42.980.914.600,00	97%	14.770.000.000,00	98%	28.340.000.000,00	99%	30.349.000.000,00	100%	37.728.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus	75%	7.827.000.000,00	79%	7.827.000.000,00	81%	9.370.000.000,00	83%	11.443.369.000,00	85%	20.277.245.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi	791 Orang	93.570.000.000,00	13000 Orang	93.570.000.000,00	19500 Orang	100.000.000.000,00	26000 Orang	110.000.000.000,00	31700 Orang	121.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.01.38	Program Peningkatan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah	635 Siswa	14.821.000.000,00	2500 Siswa	77.943.407.000,00	2500 Siswa	53.718.361.600,00	2500 Siswa	57.855.561.600,00	2500 Siswa	30.180.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68.23%	70%	207,606,000,000.00	73%	131,940,000,000.00	77%	149,660,020,000.00	82%	158,543,900,000.00	85%	164,254,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK, MAK	68.23%	70%	230,796,000,000.00	73%	103,093,000,000.00	77%	219,257,023,420.00	82%	357,235,297,400.00	85%	442,616,363,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah Sekolah yang Mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama	72 Persen	85 Persen	10,000,000,000.00	100 Persen	10,000,000,000.00	150 Persen	10,000,000,000.00	200 Persen	10,000,000,000.00	233 Persen	10,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri	30 SMK	40 SMK	-	55 SMK	20,000,000,000.00	70 SMK	20,000,000,000.00	86 SMK	20,000,000,000.00	86 SMK	20,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.43	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh	0 persen	0 persen	-	90 persen	20,000,000,000.00	95 persen	20,000,000,000.00	97 persen	20,000,000,000.00	100 persen	20,000,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76,80%	80,26%	1,076,360,000.00	82,67%	1,076,360,000.00	86,30%	1,300,000,000.00	88,26%	1,300,000,000.00	88,63%	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	UPTD Taman Budaya	
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	472,600,000.00	6 unit	472,600,000.00	6 unit	500,000,000.00	6 unit	500,000,000.00	6 unit	500,000,000.00	500,000,000.00	UPTD Taman Budaya	
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	90,000,000.00	92%	90,000,000.00	93%	150,000,000.00	95%	150,000,000.00	97%	150,000,000.00	150,000,000.00	UPTD Taman Budaya	
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	76,80%	80,26%	870,000,000.00	82,67%	870,000,000.00	86,30%	870,000,000.00	88,26%	870,000,000.00	88,63%	870,000,000.00	870,000,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	6 unit	31,725,500,000.00	31,725,500,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	91%	-	92%	274,500,000.00	93%	274,500,000.00	95%	274,500,000.00	97%	274,500,000.00	274,500,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	90%	91%	8,200,000,000.00	92%	8,200,000,000.00	93%	8,200,000,000.00	95%	8,200,000,000.00	97%	8,200,000,000.00	8,200,000,000.00	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	
1.02	Kesehatan				874,153,454,750.00		912,780,714,500.00		886,074,160,650.00		913,541,159,000.00		949,992,239,000.00			
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	85%	2,858,978,240.00	86%	2,875,828,240.00	87%	2,858,978,240.00	88%	2,858,978,240.00	90%	2,858,978,240.00	2,858,978,240.00	Dinas Kesehatan	
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	5 unit	2,599,158,000.00	5 unit	1,047,900,000.00	5 unit	1,047,900,000.00	5 unit	1,309,100,000.00	5 unit	1,809,100,000.00	1,809,100,000.00	Dinas Kesehatan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25,64%	30%	1,517,150,000.00	40%	1,987,150,000.00	60%	1,487,150,000.00	70%	1,487,150,000.00	70%	1,487,150,000.00	1,487,150,000.00	Dinas Kesehatan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	67%	1.245.583,000.00	68%	1.072.750,000.00	69%	1.072.750,000.00	70%	1.072.750,000.00	71%	1.072.750,000.00	Dinas Kesehatan		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	98%	98,50%	3.030.933,260.00	99%	1.938.576,760.00	99,50%	1.573.331,760.00	100%	1.500.000,000.00	100%	1.500.000,000.00	Dinas Kesehatan		
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal 4 kali (K4)	10%	30%	7.599,827,760.00	50%	3.753,000,000.00	70%	3.353,000,000.00	90%	3.353,000,000.00	100%	5.039,076,760.00	Dinas Kesehatan		
1.02.17	Program Peningkatan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	87,50%	87,50%	41.478.068,000.00	90%	41.500,000,000.00	92%	41.500,000,000.00	95%	41.000,000,000.00	100%	41.500,000,000.00	Dinas Kesehatan		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	50%	60%	1.834.215,000.00	70%	903.340,000.00	80%	903.340,000.00	90%	903.340,000.00	100%	903.340,000.00	Dinas Kesehatan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5 Kab/Kota	1,095,015,000.00	6 Kab/Kota	1,150,000,000.00	7 Kab/Kota	1,150,000,000.00	8 Kab/Kota	1,150,000,000.00	10 Kab/Kota	1,150,000,000.00	Dinas Kesehatan			
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	6%	2,385,297,500.00	43%	2,500,000,000.00	64%	3,000,000,000.00	96%	4,412,331,760.00	100%	3,370,710,000.00	Dinas Kesehatan			
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	1,441,700,240.00	70 Fasyankes	1,453,350,000.00	80 Fasyankes	1,453,350,000.00	90 Fasyankes	1,822,938,500.00	100 Fasyankes	2,017,995,000.00	Dinas Kesehatan			
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit tidak menular	5 Kab/Kota	389,925,000.00	6 Kab/Kota	500,000,000.00	7 Kab/Kota	1,100,000,000.00	8 Kab/Kota	1,000,000,000.00	10 Kab/Kota	1,091,300,000.00	Dinas Kesehatan			
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100%	4,600,000,000.00	100%	5,000,000,000.00	100%	5,500,000,000.00	100%	6,000,000,000.00	100%	6,600,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	1,338,450,000.00	70%	1,338,450,000.00	75%	2,500,000,000.00	80%	2,500,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan			
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	1,740,500,000.00	3 unit	1,740,500,000.00	3 unit	2,235,578,000.00	3 unit	2,200,000,000.00	3 unit	2,500,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan			
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	358,975,000.00	100%	358,975,000.00	100%	600,000,000.00	100%	800,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan			
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi utama	%	8,835,578,000.00	0%	-	%	-	%	-	%	-	UPTD Balai Latihan Kesehatan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	50 Fasyankes	1,062,075,000.00	60 Fasyankes	9,897,653,000.00	70 Fasyankes	80 Fasyankes	8,000,000,000.00	90 Fasyankes	7,835,578,000.00	100 Fasyankes	8,900,000,000.00	UPTD Balai Latihan Kesehatan		
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1,944,150,412.00	70%	2,000,000,000.00	80%	90%	2,400,000,000.00	95%	2,400,000,000.00	95%	2,400,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1,594,158,849.00	3 unit	1,300,000,000.00	3 unit	3 unit	1,000,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	3 unit	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Peminatih Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	391,000,000.00	65%	410,000,000.00	70%	75%	450,000,000.00	80%	580,000,000.00	85%	580,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98%	-	98.50%	1,190,000,000.00	99%	99.50%	1,150,000,000.00	99.70%	1,227,247,500.00	100%	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.26	Program pengadain, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	5554 SPM	70 SPM	2,770,690,739.00	80 SPM	800,000,000.00	90 SPM	500,000,000.00	95 SPM	500,000,000.00	100 SPM	4,425,800,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	0%	50%	-	60%	1,000,000,000.00	70%	1,000,000,000.00	80%	1,000,000,000.00	90%	1,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	0%	100%	-	100%	1,000,000,000.00	100%	500,475,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim		
1.02.07	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	65%	852,200,000.00	70%	1,000,000,000.00	75%	1,500,000,000.00	80%	2,000,000,000.00	85%	2,000,000,000.00	UPTD Laboratoriu m Kesehatan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	2,617,727,800.00	3 unit	2,800,000,000.00	3 unit	2,782,623,500.00	3 unit	3,500,000,000.00	3 unit	4,500,000,000.00	3 unit	4,500,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	30,072,200.00	70%	115,000,000.00	75%	125,000,000.00	80%	275,000,000.00	85%	375,000,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan			
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80%	-	85%	2,085,000,000.00	87%	1,775,000,000.00	90%	1,700,851,000.00	95%	2,158,145,000.00	UPTD Laboratorium Kesehatan			
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal	0%	406,044,000.00	0%	-	0%	-	100%	-	0%	-	UPTD Laboratorium Kesehatan			
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	74%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	100%	8,000,000,000.00	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	60%	5,172,400,000.00	70%	5,200,000,000.00	75%	5,172,400,000.00	80%	5,172,400,000.00	85%	5,172,400,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	586,050,000.00	3 unit	800,000,000.00	3 unit	565,569,000.00	3 unit	565,369,000.00	3 unit	565,569,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	70%	223,650,000.00	80%	800,000,000.00	85%	700,000,000.00	90%	700,000,000.00	95%	700,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	80%	4,967,478,000.00	84%	3,000,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	87%	2,500,000,000.00	90%	2,500,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	100%	-	100%	1,000,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0%	1,130,048,000.00	90%	2,700,000,000.00	95%	2,046,857,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
	rumah sakit mata																
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	1%	100%	624,626,000.00	100%	640,000,000.00	100%	686,857,000.00	100%	686,857,000.00	100%	686,857,000.00				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78%	80%	652,000,000.00	82%	1,000,000,000.00	84%	1,000,000,000.00	86%	1,000,000,000.00	88%	2,000,000,000.00				RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67%	69%	50,000,000.00	70%	50,000,000.00	71%	50,000,000.00	73%	50,000,000.00	75%	50,000,000.00				RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Stock out dan stagnansi obat dan bhp medis	7%	6%	15,000,000,000.00	5%	1,000,000,000.00	4%	1,000,000,000.00	3%	1,000,000,000.00	3%	1,500,000,000.00				RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	75%	85%	10,177,840,000.00	90%	17,300,000,000.00	100%	9,998,178,600.00	100%	18,200,000,000.00	100%	13,000,000,000.00	100%	13,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	75%	85%	6,801,000,000.00	90%	8,150,000,000.00	100%	10,800,000,000.00	100%	7,453,144,000.00	100%	13,000,000,000.00	100%	13,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM	70%	80%	-	85%	300,000,000.00	87%	700,000,000.00	89%	700,000,000.00	91%	453,144,000.00	91%	453,144,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.60	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan	Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda
1.02.10 2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat Kepuasan Pasien	75%	85%	-	90%	100,000,000.00	91%	100,000,000.00	92%	100,000,000.00	93%	100,000,000.00	93%	100,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.10 4	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator pelayanan minimal Rumah Sakit	76%	-	80%	500,000,000.00	82%	600,000,000.00	84%	1,000,000,000.00	86%	1,500,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda			
1.02.10 5	Program Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan mutu luaran peserta didik (peningkatan IPK/Tahun)	3.1	-	3.2	300,000,000.00	3.25	300,000,000.00	3.3	300,000,000.00	3.35	300,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda			
1.02.10 6	Program Peningkatan Tata Kelola RS. dan Tata Kelola Klinis	Pencapaian indikator kinerja utama RS	80%	-	84%	1,000,000,000.00	86%	1,000,000,000.00	88%	500,000,000.00	90%	1,400,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda			
1.02.10 7	Program Tata Kelola Keuangan	Cost recovery	65%	-	78%	300,000,000.00	81%	400,000,000.00	84%	400,000,000.00	87%	400,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda			
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas A	100%	454,000,000,000.00	100%	461,000,000,000.00	100%	465,000,000,000.00	100%	470,000,000,000.00	100%	482,000,000,000.00	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)			
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	78.42%	-	79%	549,000,000.00	79.30%	4,000,000,000.00	79.50%	5,000,000,000.00	80%	5,000,000,000.00	RSUD dr. Kamupso Djarwibowo di Balikpapan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	-	85 unit	-	90 unit	2.000.000.000.00	95 unit	2.000.000.000.00	100 unit	2.500.000.000.00	100 unit	2.500.000.000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100%	-	100%	100%	1.500.000.000.00	100%	1.750.000.000.00	100%	2.250.000.000.00	100%	2.250.000.000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan		
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72%	50.000.000.00	72.50%	73%	79.000.000.00	73.50%	100.000.000.00	74%	100.000.000.00	74%	100.000.000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	100%	-	100%	525.000.000.00	100%	500.000.000.00	100%	750.000.000.00	100%	500.000.000.00	100%	500.000.000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Kelengkapan sarana prasarana dan akses sesuai standar kelas rumah sakit	78%	27.348.000.000.00	83%	49.628.500.000.00	85%	11.098.764.550.00	90%	15.786.769.000.00	90%	18.036.769.000.00	90%	18.036.769.000.00	RSUD dr. Kanjoso Djatiribow o di Balikpapan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.27	Program penciptaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar	90%	-	92%	1.500.500.000.000	93%	2.500.000.000.000	95%	2.500.000.000.000	95%	2.500.000.000.000	95%	2.500.000.000.000	RSUD dr. Kamuboso Djatiribowo di Bahkpapan	
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jejarang dengan Fasilitas Kesehatan	0 Jaringan	-	10 Jaringan	400.000.000.000	10 Jaringan	400.000.000.000	10 Jaringan	400.000.000.000	10 Jaringan	400.000.000.000	10 Jaringan	400.000.000.000	RSUD dr. Kamuboso Djatiribowo di Bahkpapan	
1.02.102	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan pelanggan	500%	-	500%	200.000.000.000	500%	100.000.000.000	500%	100.000.000.000	500%	100.000.000.000	500%	100.000.000.000	RSUD dr. Kamuboso Djatiribowo di Bahkpapan	
1.02.103	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penilaian proper hijau	80 Sertifikat	-	85 Sertifikat	262.500.000.000	85 Sertifikat	450.000.000.000	85 Sertifikat	450.000.000.000	90 Sertifikat	450.000.000.000	90 Sertifikat	450.000.000.000	RSUD dr. Kamuboso Djatiribowo di Bahkpapan	
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Pelayanan Standar Minimal Rumah Sakit	76%	-	85%	220.500.000.000	90%	250.000.000.000	95%	250.000.000.000	100%	250.000.000.000	100%	250.000.000.000	RSUD dr. Kamuboso Djatiribowo di Bahkpapan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B	0 Instalasi / unit	18 Instalasi / unit	212.300.000.000.00	19 Instalasi / unit	216.000.000.000.00	20 Instalasi / unit	220.000.000.000.00	21 Instalasi / unit	225.000.000.000.00	RSUD dr. Kamipso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	70 Nilai	74 Nilai	8.244.355.000.00	77 Nilai	9.523.675.000.00	80 Nilai	9.650.000.000.00	83 Nilai	9.700.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor sesuai standar tiap unit pelayanan	5 unit	6 unit	-	7 unit	312.000.000.00	8 unit	1.000.000.000.00	9 unit	1.000.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	77%	82.000.000.00	81%	602.000.000.00	85%	650.000.000.00	90%	700.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	68%	116.000.000.00	71%	116.000.000.00	75%	150.000.000.00	78%	150.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan standar Pelayanan Keperawatan	65%	70%	12.000.000.00	75%	15.000.000.00	80%	18.000.000.00	85%	21.000.000.00	90%	24.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Capaian Standar Indikator Keselamatan Pasien	40%	50%	392.400.000.00	60%	250.000.000.00	70%	320.000.000.00	80%	420.000.000.00	90%	420.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar	65%	70%	10.866.060.750.00	75%	1.390.300.000.00	80%	5.068.000.000.00	85%	6.073.000.000.00	95%	7.078.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
1.02.27	Program pencelenggaraan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit yang layak dipakai dan berfungsi dengan baik	Jenis	3 Jenis	122.700.000.00	Jenis	629.100.000.00	Jenis	930.000.000.00	Jenis	940.000.000.00	Jenis	955.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
1.02.61	Program Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Rumah Sakit	Persentase teknologi/aplika si yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	58%	66,67%	-	75%	1.200.000.000.00	83,33%	1.300.000.000.00	91,67%	1.400.000.000.00	100%	1.500.000.000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.02.62	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Piutang rumah sakit yang telah tertayarkan	2000000000 Rupiah	-	1000000000 Rupiah	180,000,000.00	1000000000 Rupiah	200,000,000.00	1,000,000,000 Rupiah	200,000,000.00	1000000000 Rupiah	1000000000 Rupiah	200,000,000.00	200,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1.02.63	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku	83%	-	90%	338,600,000.00	93%	558,000,000.00	95%	568,000,000.00	98%	573,000,000.00	573,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
1.02.104	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator pelayanan minimal rumah sakit	76%	-	85%	8,281,940,500.00	90%	6,139,315,000.00	95%	8,115,735,000.00	100%	9,837,755,000.00	9,837,755,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	0%	16,000,000,000.00	95%	16,800,000,000.00	95%	17,650,000,000.00	95%	18,500,000,000.00	95%	19,500,000,000.00	19,500,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1,125,072,315,750.00		1,638,753,730,891.00		2,088,683,840,082.00		2,908,855,072,196.00		3,655,279,801,024.00	3,655,279,801,024.00			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	12.968.700,000.00	86%	20.000,000,000.00	87%	23.750,000,000.00	88%	27.970,000,000.00	90%	32.200,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	7 unit	3.069.932,117.00	7 unit	4.740,612,935.00	7 unit	5.550,000,000.00	7 unit	6,610,000,000.00	7 unit	7.598,490,367.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	50%	1.689.400,000.00	60%	2.617,000,000.00	65%	3.100,310,876.00	70%	3.646,539,313.00	75%	4,200,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	66%	941,317,500.00	79%	1,510,000,000.00	80%	1,820,000,000.00	82%	2,040,000,000.00	84%	2,370,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Lembaran	Tingkat kemampuan jalan provinsi	52,85%	552,481,103,020.00	58,88%	994,570,504,517.00	63,46%	1,329,828,399,770.00	68,04%	2,029,191,334,197.00	72,62%	2,661,831,219,634.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.03.16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	7922 L/detik	7922 L/detik	8322 L/detik	216,507,097,018.00	8622 L/detik	256,652,331,562.00	8622 L/detik	301,998,744,857.00	8982 L/detik	347,763,677,742.00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		
1.03.17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan	60.23%	65.23%	223,724,000,251.00	67.23%	265,207,409,281.00	71.23%	312,065,369,686.00	75.23%	359,355,800,334.00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.18	Program Penyelenggaraan Pembangunan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat	20456 Orang	20846 Orang	14,433,806,468.00	27846 Orang	17,110,155,437.00	32186 Orang	20,133,249,657.00	37086 Orang	23,184,245,183.00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.70	Program Penyelenggaraan Pemertan Ruang	Prosentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota	63.19%	64.87%	21,650,709,702.00	77.19%	25,665,233,156.00	90%	30,199,834,486.00	96.82%	34,776,367,774.00		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	85%	1,500,000,000.00	87%	1,600,000,000.00	88%	1,800,000,000.00	90%	2,000,000,000.00		UPTD Pemeliharaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	5,908,693,633.00	3 unit	2,500,000,000.00	3 unit	6,700,000,000.00	3 unit	3,500,000,000.00	3 unit	4,700,000,000.00	3 unit	4,700,000,000.00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	849,375,000.00	60%	920,000,000.00	65%	1,030,000,000.00	70%	1,150,000,000.00	75%	1,180,000,000.00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I			
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah I	52%	41,736,700,000.00	58%	45,080,000,000.00	63%	55,670,000,000.00	68%	63,550,000,000.00	72%	64,120,000,000.00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I			
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82.34%	1,018,914,000.00	86%	1,200,000,000.00	87%	867,000,000.00	88%	867,000,000.00	90%	867,000,000.00	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	5,551,901,400.00	3 unit	6,350,200,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	3 unit	3,781,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	905,000,000.00	60%	1,000,000,000.00	65%	1,265,000,000.00	70%	1,265,000,000.00	75%	1,265,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II			
1.03.20	Program Rehabilitasi/Perbaikan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah II	52%	43,448,426,580.00	58%	43,449,800,000.00	63%	49,087,000,000.00	68%	54,087,000,000.00	72%	57,087,000,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II			
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,34%	1,535,560,000.00	86%	1,725,452,000.00	87%	1,721,227,500.00	88%	1,998,102,000.00	90%	1,798,102,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III			
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	1,173,650,000.00	3 unit	2,745,450,000.00	3 unit	6,952,800,000.00	3 unit	4,214,300,000.00	3 unit	3,432,300,000.00	UPTD Peneliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	838,750,000.00	60%	938,750,000.00	65%	953,750,000.00	70%	2,000,000,000.00	75%	1,200,000,000.00		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III		
1.03.21	Program Rehabilitasi/Peeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik di wilayah III	52%	32,500,000,000.00	58%	31,590,348,000.00	63%	30,372,222,500.00	68%	36,787,598,000.00	72%	40,569,598,000.00		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III		
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			47,055,350,000.00		209,290,193,784.00		248,097,253,843.00		291,932,120,029.00		336,171,555,151.00				
1.04.15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni	51722 unit	47,055,350,000.00	41722 unit	209,290,193,784.00	36722 unit	248,097,253,843.00	31722 unit	291,932,120,029.00	26722 unit	336,171,555,151.00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Ruang dan Perumahan Rakyat		
1.05	Ketentraman dan Keamanan Umum Serta Perindungan Masyarakat			21,077,652,500.00		28,660,000,000.00		30,000,000,000.00		30,251,000,000.00		30,889,000,000.00				
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	3,772,852,200.00	85%	3,769,712,200.00	90%	3,769,712,200.00	95%	3,769,712,200.00	100%	3,781,712,200.00		Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	1,781,566,000.00	3 unit	1,320,966,000.00	4 unit	1,108,866,000.00	5 unit	687,416,000.00	5 unit	1,083,455,150.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)			
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	25,64%	1,148,092,500.00	40%	1,755,770,000.00	50%	1,400,510,800.00	60%	2,077,078,300.00	70%	1,572,509,150.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)			
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77,69%	192,747,500.00	78,50%	219,082,500.00	79%	266,860,000.00	80%	241,102,500.00	81%	428,642,500.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)			
1.05.60	Program Pengakkan Produk Hukum Daerah	Pencapaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	1,219,514,000.00	%	1,227,480,000.00	%	1,449,830,000.00	%	1,429,780,000.00	%	1,475,930,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.05.63	Program Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan masyarakat	Persentase pengamanan Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Keterlibatan masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli	0%	1.057.411.800.000	83%	1.052.251.000.000	86%	1.252.251.000.000	90%	1.252.251.000.000	92%	1.252.251.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)			
1.05.64	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	kapasitas satlinmas daerah	persen	80 persen	940.440.500.000	83 persen	1.487.850.000.000	86 persen	1.668.030.000.000	90 persen	1.707.000.000.000	92 persen	1.710.350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)		
1.05.65	Program Peningkatan Kesigapan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase masyarakat tanggap darurat bencana kebakaran	%	60%	812.625.000.000	70%	741.888.300.000	80%	1.083.840.000.000	90%	960.660.000.000	95%	1.045.150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)		
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	58%	59%	865.806.000.000	60%	400.000.000.000	61%	520.000.000.000	62%	550.000.000.000	63%	570.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 Unit	194.500.000.00	5 Unit	160.000.000.00	5 Unit	160.000.000.00	5 Unit	180.000.000.00	5 Unit	190.000.000.00	5 Unit	190.000.000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Penerimaan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60%	985.458.000.00	60%	700.000.000.00	60%	770.000.000.00	60%	790.000.000.00	60%	840.000.000.00	60%	840.000.000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	54,03%	243.836.000.00	58%	500.000.000.00	60%	500.000.000.00	62%	500.000.000.00	64%	500.000.000.00	64%	500.000.000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.15	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur	102 Konflik 507 Konflik	721.900.000.00	102 Konflik	1.845.000.000.00	102 Konflik	1.920.000.000.00	100 Konflik	1.960.000.000.00	101 Konflik	2.010.000.000.00	101 Konflik	2.010.000.000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA yang Memahami Wawasan dan Karakter Bangsa (%)	25%	535.800.000.00	5%	2.350.000.000.00	5%	2.350.000.000.00	5%	2.310.000.000.00	5%	2.269.000.000.00	5%	2.269.000.000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat	72,86%	2,492,300,000.00	74,50%	1,000,000,000.00	75,50%	1,075,000,000.00	76,50%	1,140,000,000.00	77,50%	1,260,000,000.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.05.62	Program Pembinaan dan Pengembangan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Penguatan Peran Ormas	Ormas yang berperan aktif dalam kegiatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	587 Ormas	596,800,000.00	120 Ormas	1,680,000,000.00	120 Ormas	1,705,000,000.00	120 Ormas	1,620,000,000.00	127 Ormas	1,650,000,000.00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1,749,810,000.00	85%	2,594,080,000.00	90%	3,139,330,000.00	95%	3,391,330,000.00	100%	3,391,330,000.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja PD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	4 Unit	240,820,000.00	4 Unit	600,000,000.00	4 Unit	425,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	4 Unit	425,000,000.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	369,950,000.00	17,39%	750,000,000.00	17,39%	790,950,000.00	17,39%	744,950,000.00	17,39%	744,950,000.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 Nilai	399,800,000.00	68 Nilai	450,000,000.00	70 Nilai	418,800,000.00	72 Nilai	418,800,000.00	75 Nilai	418,800,000.00	418,800,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.49	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	85 Persen	355,020,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	85 Persen	1,785,920,000.00	100 Persen	1,785,920,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.51	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah desa/keurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini bencana	12 Desa / Kelurahan	225,000,000.00	8 Desa / Kelurahan	1,225,000,000.00	7 Desa / Kelurahan	1,325,000,000.00	8 Desa / Kelurahan	1,275,000,000.00	7 Desa / Kelurahan	1,274,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.55	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Paska Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Relatif/Insidi dan Rekonstruksi Paska Bencana	0 Persen	175,000,000.00	40 Persen	1,045,000,000.00	60 Persen	1,115,000,000.00	80 Persen	1,210,000,000.00	100 Persen	1,210,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1.06	Sosial			19,150,000,000.00		34,000,000,000.00		31,000,000,000.00		32,000,000,000.00		32,000,000,000.00				
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	12%	2,651,383,800.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	12%	2,900,000,000.00	Dinas Sosial			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1,100,450,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	12 unit	1,680,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,509,627,200.00	12%	2,500,000,000.00	12%	2,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	12%	3,500,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	233,800,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	11%	420,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Keschjahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang dibina, ditayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	340,950,000.00	45 Orang	80 Orang	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	80 Orang	400,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS yang dibina, ditayani, dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	0 Orang	123,000,000.00	1275 Orang	300,000,000.00	1320 Orang	300,000,000.00	1350 Orang	300,000,000.00	1365 Orang	300,000,000.00	1365 Orang	300,000,000.00	Dinas Sosial	
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	0 Orang	212,200,000.00	32 Orang	435 Orang	454 Orang	950,000,000.00	466 Orang	950,000,000.00	480 Orang	950,000,000.00	480 Orang	950,000,000.00	Dinas Sosial	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang (eks narapidana, ODHA, Korban NAPZA, Tuhla Susida, Waria dan Gepeng) dan penyakit sosial lainnya)	0 Orang	45 Orang	401,000,000.00	120 Orang	450,000,000.00	135 Orang	450,000,000.00	165 Orang	450,000,000.00	175 Orang	450,000,000.00	Dinas Sosial			
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelayakan Kesijahteraan Sosial	0 Lembaga	5 Lembaga	344,960,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	5 Lembaga	1,000,000,000.00	Dinas Sosial			
1.06.23	Program Peningkatan Kemiskinan dan Kesijahteraan Sosial	0 Orang	520 Orang	1,380,185,000.00	2250 Orang	2,700,000,000.00	2325 Orang	2,700,000,000.00	2395 Orang	2,700,000,000.00	2505 Orang	2,700,000,000.00	Dinas Sosial			
1.06.24	Program Peningkatan dan Penanggulangan Bencana	0 Orang	1518 Orang	274,165,000.00	1618 Orang	1,000,000,000.00	1700 Orang	1,000,000,000.00	1800 Orang	1,000,000,000.00	2000 Orang	1,000,000,000.00	Dinas Sosial			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1.06.25	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin	0 unit	100%	1 unit	700,000,000.00	1 unit	700,000,000.00	1 unit	700,000,000.00	1 unit	700,000,000.00	1 unit	700,000,000.00	1 unit	700,000,000.00	Dimas Sosial	
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	100%	950,000,000.00	100%	950,000,000.00	100%	950,000,000.00	100%	950,000,000.00	100%	950,000,000.00	100%	950,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Wardha Nirwana Puri	
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	80 unit	85 unit	87 unit	903,300,000.00	90 unit	903,300,000.00	92 unit	903,300,000.00	95 unit	903,300,000.00	95 unit	903,300,000.00	95 unit	903,300,000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Wardha Nirwana Puri	
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	100%	166,000,000.00	100%	166,000,000.00	100%	166,000,000.00	100%	166,000,000.00	100%	166,000,000.00	100%	166,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Tresna Wardha Nirwana Puri	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1.06.19	Program pembinaan/panti asuhan /panti jompo	Terpenuhiya sarana dan prasarana serta pelayanan/perawatan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,980,700,000.00	1 Panti	3,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	1 Panti	2,980,700,000.00	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Putri
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85%	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	100%	843,797,400.00	UPTD Panti Sosial Perhindungan Anak Dharma
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	unit	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	80 unit	454,800,000.00	UPTD Panti Sosial Perhindungan Anak Dharma
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	100%	66,000,000.00	UPTD Panti Sosial Perhindungan Anak Dharma
1.06.19	Program pembinaan/panti asuhan /panti jompo	Terpenuhiya sarana dan prasarana serta pelayanan/perawatan bagi panti asuhan/jompo	0 Panti	1 Panti	1,280,264,600.00	1 Panti	3,135,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	1 Panti	2,635,402,600.00	UPTD Panti Sosial Perhindungan Anak Dharma

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	100%	833,201,000.00	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	80 unit	471,294,000.00	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	90,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.19	Program pembinaan pantii asuhan/panti jompo	Terpenuhiya sarana dan prasarana serta pelayanan/pern binaan bagi pantii asuhan/jompo	0 Pantii	1,532,705,000.00	1 Pantii	3,105,505,000.00	1 Pantii	2,605,305,000.00	1 Pantii	2,605,505,000.00	1 Pantii	2,605,505,000.00	1 Pantii	2,605,505,000.00	1 Pantii	2,605,305,000.00	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	721,075,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	850,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Bria Remaja

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	67,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	80 unit	300,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Bina Remaja
1.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	0%	69,150,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Bina Remaja
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	0%	721,650,000.00	100%	2,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	100%	1,750,000,000.00	UPTD Pantii Sosial Bina Remaja
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			212,257,896,100.00		316,207,055,260.00		342,189,947,580.00		335,899,051,000.00		349,579,977,000.00		349,579,977,000.00		349,579,977,000.00	
2.01	Tenaga Kerja			19,337,500,000.00		27,387,500,000.00		26,461,500,000.00		27,989,375,000.00		27,989,375,000.00		27,989,375,000.00		27,989,375,000.00	
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	86.70%	3,954,400,000.00	88%	4,404,400,000.00	88.10%	4,404,400,000.00	88.50%	4,598,940,000.00	88.70%	4,598,940,000.00	88.70%	4,598,940,000.00	88.70%	4,598,940,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	1,584,750,000.00	5 unit	1,734,750,000.00	5 unit	1,734,750,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	5 unit	1,908,225,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	1,585,800,000.00	85%	1,985,800,000.00	87%	1,985,800,000.00	90%	2,184,380,000.00	95%	2,184,380,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	50,28%	573,640,000.00	70%	747,640,000.00	72,15%	889,040,000.00	74,25%	977,944,000.00	80%	977,944,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang terserap dipasar kerja	80%	6,957,500,000.00	80%	8,007,500,000.00	80%	7,007,500,000.00	80%	7,357,875,000.00	80%	7,357,875,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	2,063,500,000.00	31%	2,063,500,000.00	31%	2,063,500,000.00	31%	2,166,675,000.00	31%	2,166,675,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketengakerjaan	UMP Sama Dengan KHL	100%	1,805,960,000.00	100%	3,055,960,000.00	100%	2,205,960,000.00	100%	2,316,258,000.00	100%	2,316,258,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Persentase Wirausahaan Baru dan Pencari Kerja	0%	-	30%	950,000,000.00	35%	950,000,000.00	40%	997,500,000.00	45%	997,500,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketengakerjaan	Jumlah perusahaan yang Dthina dan Diawasi	120 Perusahaan	190 Perusahaan	325 Perusahaan	2,561,950,000.00	475 Perusahaan	2,561,950,000.00	675 Perusahaan	2,480,048,000.00	875 Perusahaan	2,480,048,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.29	Program Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan yang Meningkatkan Produktivitasnya	80%	80%	80%	326,000,000.00	80%	358,600,000.00	80%	376,530,000.00	80%	376,530,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan	70%	0%	80%	1,750,000,000.00	85%	2,500,000,000.00	90%	2,625,000,000.00	95%	2,625,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			8,349,372,000.00	10,050,000,000.00	9,500,000,000.00	9,735,000,000.00	10,200,000,000.00								Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	1,675,214,000.00	1,700,000,000.00	1,800,000,000.00	1,900,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,000,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100 unit	1,539,826,000.00	3,990,000,000.00	2,980,000,000.00	2,495,000,000.00	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	2,840,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100%	594,000,000.00	710,000,000.00	720,000,000.00	740,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	750,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100%	248,360,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	700,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	500,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.02.15	Program Keresahan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	395.480.000.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.02.16	Program Penguatan Kelengkapan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	82.650.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	peneguhan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	%	111.000.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan ekonomi perempuan dalam pembangunan	meningkatnya pelaksanaan PUG bidang ekonomi perempuan	%	658.425.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.02.20	Program Penguatan dan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase pelaku ekonomi perempuan	34%	158.900.000.00	62%	150.000.000.00	76%	150.000.000.00	87%	350.000.000.00	100%	160.000.000.00	-	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.02.21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya peringkat kriteria Kab/Kota layak anak	70%	223.985.000.00	82%	300.000.000.00	88%	300.000.000.00	94%	300.000.000.00	100%	300.000.000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.02.22	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun ekonomi keluarga	%	47.500.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.02.23	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dan penanaman nilai-nilai luhur	kebijakan	87.390.000.00	kebijakan	-	kebijakan	-	kebijakan	-	kebijakan	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.02.26	Program Pengembangan Basis Data Gender dan Anak	tersedianya dokumen data gender dan anak	%	319.500.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.02.27	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan	1 Dokumen	2.187.142.000.00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
																Perlindungan Anak
2.02.35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0.06 Rasio	0.054 Rasio	200,000,000.00	0.048 Rasio	250,000,000.00	0.042 Rasio	400,000,000.00	0.038 Rasio	350,000,000.00					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.36	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan anak	50 persen	70 persen	900,000,000.00	80 persen	1,050,000,000.00	90 persen	1,050,000,000.00	100 persen	1,200,000,000.00					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.38	Program Kesetaraan Gender	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	50 persen	70 persen	900,000,000.00	80 persen	1,050,000,000.00	90 persen	1,050,000,000.00	100 persen	1,200,000,000.00					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.39	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemanfaatan data gender dan anak	50 persen	70 persen	750,000,000.00	80 persen	750,000,000.00	90 persen	750,000,000.00	100 persen	900,000,000.00					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03	Pangan				30,244,514,260.00		23,990,250,000.00		25,226,883,000.00		23,687,500,000.00					

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	2,068,756,600.00	85%	2,200,000,000.00	90%	2,100,000,000.00	95%	2,500,000,000.00	100%	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1,449,148,000.00	5 unit	2,250,000,000.00	5 unit	1,950,000,000.00	5 unit	2,250,000,000.00	5 unit	2,250,000,000.00		2,250,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	2,005,800,000.00	85%	2,200,000,000.00	90%	2,000,000,000.00	95%	2,200,000,000.00	100%	2,200,000,000.00		2,200,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	64 nilai AKIP	1,194,282,344.00	66 nilai AKIP	1,809,000,000.00	67 nilai AKIP	1,750,000,000.00	68 nilai AKIP	1,800,000,000.00	69 nilai AKIP	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	420 Desa	2,189,991,656.00	416 Desa	2,900,000,000.00	414 Desa	2,900,000,000.00	412 Desa	3,050,000,000.00	410 Desa	2,950,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.27	Program Peningkatan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.6 Skor	1,250,000,000.00	86.9 Skor	2,050,000,000.00	89.1 Skor	2,050,000,000.00	91.2 Skor	2,100,000,000.00	93.4 Skor	2,050,000,000.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	605,000,000.00	85%	800,000,000.00	90%	800,000,000.00	95%	800,000,000.00	100%	800,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2,585,600,000.00	3 unit	2,850,000,000.00	3 unit	1,550,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	3 unit	600,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	73,750,000.00	85%	100,000,000.00	90%	150,000,000.00	95%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	951,350,000.00	83%	1,100,000,000.00	90%	1,200,000,000.00	95%	1,300,000,000.00	100%	1,200,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	134,000,000.00	3 unit	1,025,159,620.00	3 unit	170,000,000.00	3 unit	190,000,000.00	3 unit	200,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	105,250,000.00	85%	244,840,380.00	90%	135,000,000.00	95%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	UPTD Proeksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	1,278,700,000.00	83%	1,400,000,000.00	90%	1,500,000,000.00	95%	1,500,000,000.00	100%	1,300,000,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura			
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	287,500,000.00	3 unit	2,099,325,260.00	3 unit	377,500,000.00	3 unit	377,500,000.00	3 unit	287,500,000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	187.000.000.00	85%	200.000.000.00	90%	220.000.000.00	95%	242.000.000.00	100%	200.000.000.00	UPTD Balai Benih Induk Hortikultura			
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	1.038.635.000.00	85%	1.500.000.000.00	90%	1.497.750.000.00	95%	1.500.000.000.00	100%	1.500.000.000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	196.260.000.00	3 unit	340.000.000.00	3 unit	290.000.000.00	3 unit	290.000.000.00	3 unit	305.000.000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	80%	156.750.000.00	85%	200.000.000.00	90%	200.000.000.00	95%	250.000.000.00	100%	250.000.000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
2.03.15	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Jumlah Desa yang dibina	693 Desa	4.985.800.000.00	711 Desa	4.975.189.000.00	726 Desa	3.150.000.000.00	741 Desa	3.927.383.000.00	756 Desa	2.945.000.000.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
2.05	Lingkungan Hidup			18.052.648.000.00		22.042.100.000.00		21.020.500.000.00		22.052.500.000.00		22.157.500.000.00				

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	3,794,827,500.00	85%	3,950,100,000.00	90%	3,500,000,000.00	95%	3,680,300,000.00	100%	3,200,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup			
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	989,700,000.00	5 unit	1,490,000,000.00	5 unit	1,400,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,100,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup			
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,314,600,000.00	85%	1,820,000,000.00	90%	1,350,000,000.00	95%	1,450,000,000.00	100%	1,450,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup			
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0 Nilai AKIP	1,406,350,000.00	60 Nilai AKIP	1,500,000,000.00	61 Nilai AKIP	1,600,000,000.00	62 Nilai AKIP	1,700,000,000.00	65 Nilai AKIP	1,800,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup			
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah yang dikelola	Persentase	1,451,850,000.00	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Dinas Lingkungan Hidup			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75 Indeks	2,113,818,000.00	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Indeks	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.27	Program Penyusunan dan inventarisasi kajian lingkungan dan inventarisasi	Jumlah Kajian LH yang disusun	Dokumen	7 Dokumen	1,601,180,000.00	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.28	Program Tata Laksana Pemeliharaan/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen LH	Persentase	100 Persentase	708,272,500.00	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Persentase	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.29	Program Pembinaan kinerja perusahaan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai	225	225 225	1,036,500,000.00	225	-	225	-	225	-	225	-	225	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.30	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran	0 Indeks (Tercemar Sedang)	0 Indeks (Tercemar Sedang)	-	8 Indeks (Tercemar Sedang)	4,237,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,600,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,800,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,950,000,000.00	8 Indeks (Tercemar Sedang)	3,950,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.05.31	Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Pehayanan penyelesaian kasus-kasus lingkungan	%	446.250.000,00	%	-	%	-	%	-	%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.32	Program Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan Hakam Lingkungan	Meningkatnya ketataan pelaku usaha/kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH	0 Perusahaan	421.000.000,00	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	0 Perusahaan	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima	Penghargaan	1.204.800.000,00	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Penghargaan	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	Juta Ton CO2eq	998.000.000,00	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Juta Ton CO2eq	-	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.57	Program Perlindungan Sumber Daya Alam	Luas Kawasan lindung yg dilindungi dikalam kawasan perijuan	Ribu Hektare	565.500.000,00	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Ribu Hektare	-	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.05.58	Program Pemetaan, Pemanganan Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase kerataan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	0%	-	100%	2.720,000,000.00	2.954,500,000.00	100%	100%	3.247,200,000.00	3.582,500,000.00	100%	3.582,500,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan	417 Kegiatan	0 Kegiatan	-	550 Kegiatan	4.400,000,000.00	4.491,000,000.00	600 Kegiatan	640 Kegiatan	4.650,000,000.00	4.550,000,000.00	670 Kegiatan	4.550,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
2.05.60	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase sampah dan limbah B3 yang dimanfaatkan	10%	0%	-	12%	1.925,000,000.00	2.125,000,000.00	13%	14%	2.325,000,000.00	2.525,000,000.00	15%	2.525,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup	
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				7,050,000,000.00	12,675,250,000.00	11,520,500,000.00	11,875,250,000.00				12,000,000,000.00				
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	1,866,120,000.00	75%	1,866,120,000.00	1,866,120,000.00	75%	80%	1,866,120,000.00	1,866,120,000.00	80%	1,866,120,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	525.900.000.00	5 unit	891.566.000.00	5 unit	844.816.000.00	5 unit	728.566.000.00	5 unit	679.316.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	20%	993.250.000.00	40%	993.250.000.00	45%	993.250.000.00	50%	993.250.000.00	55%	993.250.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65%	233.964.000.00	67%	233.964.000.00	68%	233.964.000.00	69%	233.964.000.00	70%	233.964.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan Desa	390.000.000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	1.100.000.000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	860.000.000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	885.000.000.00	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa	895.000.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Aktif	320 Bumdes	148.045.000.00	360 Bumdes	770.000.000.00	390 Bumdes	700.000.000.00	425 Bumdes	720.000.000.00	470 Bumdes	714.000.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	80%	80,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.21	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	1 Dokumen	260,350,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.22	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	0 Unit	252,811,000.00	18 Unit	605,440,000.00	18 Unit	455,440,000.00	18 Unit	485,440,000.00	18 Unit	479,440,000.00	18 Unit	479,440,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.26	Program Pemberdayaan Adat dan Kebudayaan Masyarakat Sosial Budaya	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/pembinaan masyarakat dan keluarga desa/keturahan	0 PKK	1,500,000,000.00	165 PKK	1,500,000,000.00	180 PKK	1,620,000,000.00	200 PKK	1,665,000,000.00	220 PKK	1,686,000,000.00	220 PKK	1,686,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2.07.27	Program Penguatungan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	24,560,000.00	1 Dokumen	24,560,000.00	1 Dokumen	34,560,000.00	1 Dokumen	44,560,000.00	1 Dokumen	42,560,000.00	1 Dokumen	42,560,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.07.28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	323 Desa	475.000.000.00	338 Desa	363 Desa	2.150.000.000.00	393 Desa	1.242.000.000.00	428 Desa	1.280.000.000.00	473 Desa	1.295.000.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
2.07.29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah Desa berkembang	289 Desa	300.000.000.00	304 Desa	329 Desa	1.200.000.000.00	359 Desa	1.080.000.000.00	394 Desa	1.130.000.000.00	439 Desa	1.125.000.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
2.07.30	Program Kampung Iklim +	Jumlah Kampung/Desa Iklim	0 Desa	-	15 Desa	40 Desa	1.000.000.000.00	70 Desa	1.250.000.000.00	105 Desa	1.500.000.000.00	150 Desa	1.650.000.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			321.700.000.00			1.500.000.000.00		1.500.000.000.00		1.500.000.000.00		1.800.000.000.00			
2.08.15	Program Keluarga Berencana	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	%	100%	225.800.000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	orang	100 orang	95.900.000.00	orang	-	orang	-	orang	-	orang	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.08.23	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya lembaga masyarakat yang aktif dalam bidang kesehatan, kemandirian dan ketahanan keluarga	50 lembaga masyarakat (LM)	60 lembaga masyarakat (LM)	-	70 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	80 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	90 lembaga masyarakat (LM)	750,000,000.00	100 lembaga masyarakat (LM)	900,000,000.00	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.24	Program Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	50 persen	60 persen	-	70 persen	750,000,000.00	80 persen	750,000,000.00	90 persen	750,000,000.00	100 persen	900,000,000.00	Dinas Kependudukan, Perencanaan Pembangunan dan Perlindungan Anak		
2.09	Perhubungan			41,780,446,500.00	78,000,000,000.00		121,000,000,000.00	98,000,000,000.00					98,000,000,000.00			
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	100%	2,894,520,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	100%	3,000,000,000.00	Dinas Perhubungan		
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	4 unit	4 unit	2,331,190,000.00	2,700,000,000.00	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	4 unit	3,700,000,000.00	Dinas Perhubungan		
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	55%	60%	2,476,400,000.00	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00	70%	4,000,000,000.00	75%	4,000,000,000.00	80%	4,000,000,000.00	Dinas Perhubungan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	69%	70,50%	710.832.000,00	71%	1.300.000.000,00	71,50%	1.400.000.000,00	72,50%	1.300.000.000,00	73,50%	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854 Kasus	683 Kasus	4.375.614.000,00	598 Kasus	21.800.000.000,00	512 Kasus	39.790.670.000,00	427 Kasus	29.590.670.000,00	342 Kasus	29.590.670.000,00	Dinas Perhubungan		
2.09.16	Program Pengembangan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	83 Unit%	83 Unit%	3.037.846.500,00	85 Unit%	30.200.000.000,00	88 Unit%	40.609.330.000,00	90 Unit%	27.909.330.000,00	90,42 Unit%	27.909.330.000,00	Dinas Perhubungan		
2.09.17	Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpedu	0 Simpul	1 Simpul	21.109.330.000,00	2 Simpul	11.000.000.000,00	3 Simpul	22.500.000.000,00	1 Simpul	22.500.000.000,00	0 Simpul	22.500.000.000,00	Dinas Perhubungan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangan kependidikan terhadap pelayanan PD (SKM)	100%	1,075,964,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	100%	1,100,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 unit	413,200,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	138,200,000.00	60%	200,000,000.00	65%	200,000,000.00	70%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	UPTD Terminal	
2.09.18	Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B	Jumlah penumpang terminal yang tertayani	50000 Penumpang	3,217,350,000.00	70000 Penumpang	3,250,000,000.00	75000 Penumpang	4,250,000,000.00	80000 Penumpang	4,250,000,000.00	100000 Penumpang	4,250,000,000.00	100000 Penumpang	4,250,000,000.00	UPTD Terminal	
2.1	Komunikasi dan Informatika			12,550,000,000.00		20,325,000,000.00		20,500,000,000.00		21,500,000,000.00		21,500,000,000.00		22,450,000,000.00		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	4.252.950.000.00	75%	4.500.000.000.00	80%	4.500.000.000.00	85%	4.600.000.000.00	90%	4.650.000.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1.196.720.000.00	3 unit	1.250.000.000.00	4 unit	1.250.000.000.00	5 unit	1.270.000.000.00	5 unit	1.300.000.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1.773.850.000.00	80%	1.850.000.000.00	85%	1.850.000.000.00	90%	1.900.000.000.00	95%	1.950.000.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	131.000.000.00	77%	500.000.000.00	80%	500.000.000.00	83%	500.000.000.00	85%	500.000.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.10.11	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	0 Persen	381,200,000.00	25 Persen	30 Persen	600,000,000.00	50 Persen	614,000,000.00	60 Persen	700,000,000.00	70 Persen	884,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.12	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Penguatan Komunikasi dan Informatika Daerah	Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	0 Lembaga	535,800,000.00	2 Lembaga	2 Lembaga	980,000,000.00	2 Lembaga	1,040,000,000.00	2 Lembaga	1,150,000,000.00	2 Lembaga	1,255,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.13	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	0%	462,000,000.00	80%	84%	820,000,000.00	86%	835,000,000.00	88%	865,000,000.00	90%	880,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.14	Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	0 Persen	353,800,000.00	80 Persen	84 Persen	369,000,000.00	86 Persen	350,000,000.00	88 Persen	360,000,000.00	90 Persen	370,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.4 Indeks	2.143,730,000.00	2.6 Indeks	5,101,000,000.00	2.8 Indeks	5,071,000,000.00	3 Indeks	5,231,000,000.00	3.2 Indeks	5,491,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	0 Persen	70 Persen	1,106,950,000.00	75 Persen	4,205,000,000.00	80 Persen	4,340,000,000.00	85 Persen	4,774,000,000.00	90 Persen	5,020,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10.18	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	0 Persen	100 Persen	212,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	100 Persen	150,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				21,704,081,000.00		44,239,952,000.00		21,598,786,000.00		21,466,444,000.00		21,120,203,000.00			
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	5,917,661,500.00	87%	3,756,945,500.00	88%	3,850,000,000.00	89%	3,928,806,000.00	90%	3,827,390,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2,011,298,500.00	5 unit	25,725,366,500.00	5 unit	2,455,018,000.00	5 unit	1,850,000,000.00	5 unit	1,333,000,000.00	5 unit	1,333,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,576,015,000.00	55%	2,444,600,000.00	60%	2,475,000,000.00	65%	2,235,000,000.00	70%	1,845,000,000.00	70%	1,845,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72.01 Nilai AKIP	1,066,200,000.00	76 Nilai AKIP	1,279,000,000.00	77 Nilai AKIP	1,427,460,000.00	78 Nilai AKIP	1,420,000,000.00	80 Nilai AKIP	1,108,585,000.00	80 Nilai AKIP	1,108,585,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM Naik Kelas	0 UKM	1,194,160,000.00	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah WUB Mandiri	0 Wirausaha Baru	100 Wirausaha Baru	571,570,000.00	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	0 Koperasi	100 Koperasi	4,441,790,000.00	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.20	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM	Jumlah UKM Naik Kelas dan koperasi berkualitas	0 UKM	0 UKM	-	200 UKM Koperasi	3,424,608,000.00	200 UKM Koperasi	3,733,608,000.00	200 UKM Koperasi	4,033,608,000.00	200 UKM Koperasi	4,333,608,000.00	200 UKM Koperasi	4,333,608,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,132,000,000.00	87%	1,444,780,000.00	88%	1,501,575,000.00	89%	1,633,750,000.00	90%	1,772,500,000.00	90%	1,772,500,000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	320.400.000.00	3 unit	510.184.000.00	3 unit	519.275.000.00	3 unit	553.560.000.00	3 unit	584.230.000.00	3 unit	584.230.000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	308.100.000.00	45%	654.468.000.00	50%	636.550.000.00	55%	664.220.000.00	60%	681.360.000.00	60%	681.360.000.00	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1.209.200.000.00	87%	1.584.930.000.00	88%	1.715.512.000.00	89%	1.886.767.000.00	90%	2.129.052.000.00	90%	2.129.052.000.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM	
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	622.650.000.00	3 unit	929.832.500.00	3 unit	1.056.153.000.00	3 unit	1.042.432.500.00	3 unit	1.117.333.000.00	3 unit	1.117.333.000.00	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Koperasi dan UKM	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	409.900.000.000	45%	860.085.000.000	50%	774.782.000.000	55%	718.866.500.000	60%	745.231.500.000	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Kerjasama dan UKM			
2.11.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah KUKM terlatih	300 Orang	923.136.000.000	300 Orang	1.625.152.500.000	300 Orang	1.453.553.000.000	300 Orang	1.499.434.000.000	300 Orang	1.642.883.500.000	UPTD Pusat Pelatihan, Pengembangan Kerjasama dan UKM			
2.12	Penanaman Modal			9.924.535.000.000		15.000.000.000.000		16.000.000.000.000		17.000.000.000.000		18.000.000.000.000				
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	2.991.264.800.000	72%	3.000.000.000.000	73%	3.200.000.000.000	74%	3.500.000.000.000	75%	3.700.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1.807.060.200.000	6 unit	1.700.000.000.000	6 unit	1.800.000.000.000	6 unit	1.700.000.000.000	6 unit	1.900.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	2,954,000,000.00	92%	3,000,000,000.00	93%	3,000,000,000.00	94%	3,000,000,000.00	95%	3,000,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	31.06 Nilai AKIP	311,500,000.00	61 Nilai AKIP	820,000,000.00	65 Nilai AKIP	890,000,000.00	71 Nilai AKIP	890,000,000.00	75 Nilai AKIP	1,100,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	0 Hari	221,000,000.00	13 Hari	1,500,000,000.00	12 Hari	1,520,000,000.00	11 Hari	1,600,000,000.00	10 Hari	1,600,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	0 perusahaan industri baru	509-400,000.00	7 perusahaan industri baru	1,590,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,000,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,250,000,000.00	7 perusahaan industri baru	2,570,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	1 Kebijakan	532,600,000.00	2 Kebijakan	1,700,000,000.00	2 Kebijakan	1,700,000,000.00	2 Kebijakan	1,880,000,000.00	2 Kebijakan	1,900,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	%	100%	131,910,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	100%	480,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	2 MoU	2 MoU	465,800,000.00	3 MoU	1,210,000,000.00	3 MoU	1,410,000,000.00	4 MoU	1,700,000,000.00	4 MoU	1,750,000,000.00	4 MoU	1,750,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				34,381,000,000.00		36,180,742,000.00		45,005,104,580.00		48,945,542,000.00		57,945,542,000.00			
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	80.26%	3,908,323,800.00	89.55%	4,308,901,000.00	89.35%	4,300,000,000.00	89.35%	4,300,000,000.00	89.35%	4,300,000,000.00	89.35%	4,300,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	5	1,458,750,000.00	5	1,431,191,000.00	5	4,000,000,000.00	5	3,440,542,000.00	5	5,000,000,000.00	5	5,000,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	2.810.338,450.00	92%	3.195.350.000.00	93%	4.000.000.000.00	94%	4.000.000.000.00	95%	4.880.000.000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
2.13.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	58,38%	494.292,000.00	58,60%	545.300.000.00	58,80%	565.000.000.00	59,20%	565.000.000.00	60%	565.000.000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	961.645,000.00	Orang	2.000.000.000.00	Orang	3.850.000,000.00	Orang	2.900.000.000.00	Orang	5.000.000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
2.13.31	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	1.394.900,750.00	Orang	2.021.800.000.00	Orang	1.900.000.000.00	Orang	2.000.000.000.00	Orang	2.100.000.000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga			
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga	3%	5.987.100.000.00	3%	1.700.000.000.00	3%	6.899.404,580.00	3%	3.800.000.000.00	3%	5.150.000.000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase masyarakat yang berolahraga	5%	3,911,650,000.00	5%	6,000,000,000.00	5%	3,585,700,000.00	5%	7,225,000,000.00	5%	7,830,542,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga					
2.13.35	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kemampuan Hidup Pemuda	Tercepainya pemuda Kalim dalam berwirausaha	0.03 Persen	0.09 Persen	0.15 Persen	1,478,200,000.00	1 Persen	2,405,000,000.00	1.5 Persen	7,215,000,000.00	2 Persen	9,620,000,000.00	Dinas Pemuda dan Olah Raga					
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	100%	8,784,490,000.00	100%	9,550,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	100%	10,000,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya					
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlayannya Administrasi Perkantoran	0%	1,719,760,000.00	100%	2,925,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya					
2.13.34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlayannya Administrasi Perkantoran	0%	2,949,750,000.00	100%	1,025,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya					
2.14	Statistik			-		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		550,000,000.00						
2.14.16	Program pengujian dan evaluasi data dan statistik	Jumlah Kajian yang diselesaikan	0 Buku	0 Buku	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	500,000,000.00	1 Buku	550,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika					
2.16	Kebudayaan			10,788,040,000.00		10,788,040,000.00		14,813,300,000.00		20,078,200,000.00		20,050,000,000.00						

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya loka	17 Sekolah	9,200,000,000.00	150 Sekolah	9,200,000,000.00	233 Sekolah	11,763,300,000.00	233 Sekolah	17,028,200,000.00	233 Sekolah	17,000,000,000.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kalimantan	100 Orang	1,588,040,000.00	130 Orang	1,588,040,000.00	150 Orang	3,050,000,000.00	280 Orang	3,050,000,000.00	220 Orang	3,050,000,000.00		UPTD Taman Budaya		
2.17	Perpustakaan			4,837,042,000.00		6,416,999,000.00		7,380,007,000.00		8,725,000,000.00		11,611,857,000.00				
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	76.80%	2,071,470,000.00	82.67%	2,356,350,000.00	86.30%	2,400,000,000.00	88.26%	2,750,000,000.00	88.63%	3,500,000,000.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	6 unit	513,064,100.00	6 unit	584,174,000.00	6 unit	925,000,000.00	6 unit	1,025,000,000.00	6 unit	1,150,000,000.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Pemertintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	806,000,000.00	92%	1,080,493,000.00	93%	975,000,000.00	95%	1,050,000,000.00	97%	1,575,000,000.00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
2.17.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	94%	85.765,900.00	95.50%	248,000,000.00	96%	172,732,000.00	97%	250,000,000.00	98%	500,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
2.17.23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan	0 Pemustaka	205700 Pemustaka	205700 Pemustaka	1,350,000,000.00	206600 Pemustaka	1,575,000,000.00	207200 Pemustaka	2,025,000,000.00	209100 Pemustaka	2,436,857,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
2.17.24	Program Depository, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah pengembangan koleksi bahan perpustakaan	0 Judul	320,300,000.00	3550 Judul	354,040,000.00	4100 Judul	832,275,000.00	4650 Judul	975,000,000.00	5200 Judul	1,500,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
2.17.26	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standar	20 Perpustakaan	243,942,000.00	20 Pemustaka	443,942,000.00	20 Perpustakaan	500,000,000.00	20 Perpustakaan	650,000,000.00	20 Perpustakaan	950,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			
2.18	Kearsipan			437,958,000.00		857,958,000.00		1,400,000,000.00		1,304,857,000.00		2,018,000,000.00				
2.18.19	Program pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip statis dan arsip hasil akuisisi yang dikelola dengan baik	1100 berkas	148,658,000.00	1100 berkas	358,658,000.00	1100 berkas	675,000,000.00	1100 berkas	628,857,000.00	1100 berkas	1,018,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
2.18.25	Program Pembinaan Kearsipan	Jumlah lembaga instansi yang dibangun	50 Lembaga/Instansi	289,300,000.00	50 Lembaga/Instansi	499,300,000.00	50 Lembaga/Instansi	725,000,000.00	50 Lembaga/Instansi	676,000,000.00	50 Lembaga/Instansi	1,000,000,000.00	Dinas Perpusustakaan dan Kearsipan Daerah					
3	Unsur Pilihan			471,263,756,150.00		618,543,241,490.00		594,790,031,750.00		595,277,165,700.00		598,164,989,750.00						
3.01	Kelautan dan Perikanan			44,630,495,000.00		56,877,500,000.00		57,437,250,000.00		58,350,975,000.00		55,960,862,620.00						
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	5,625,150,000.00	81%	6,325,000,000.00	82%	6,957,500,000.00	83%	7,653,250,000.00	84%	7,653,250,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan					
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2,850,630,950.00	5 unit	3,955,000,000.00	5 unit	4,290,500,000.00	5 unit	4,659,550,000.00	5 unit	4,659,550,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan					
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	2,276,150,000.00	20%	3,135,000,000.00	20%	3,448,500,000.00	20%	3,793,350,000.00	20%	3,793,350,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan					

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	55 Nilai	1,679,125,000.00	63 Nilai	1,980,000,000.00	65 Nilai	2,178,000,000.00	68 Nilai	2,395,800,000.00	70 Nilai	2,395,800,000.00		2,395,800,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	149039 Ton	15,396,907,000.00	155516 Ton	18,157,500,000.00	158938 Ton	16,121,500,000.00	162593 Ton	13,095,650,000.00	166170 Ton	11,279,213,620.00		11,279,213,620.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	151918 Ton	4,125,830,000.00	138055 Ton	5,555,000,000.00	161216 Ton	6,110,500,000.00	164441 Ton	6,721,550,000.00	167730 Ton	6,721,550,000.00		6,721,550,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0 Kawasan yang di restorasi	3,122,885,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	3,795,000,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,174,500,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,591,950,000.00	1 Kawasan yang di restorasi	4,591,950,000.00		4,591,950,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	33,6 Persen	1,932,570,050.00	37,07 Persen	3,265,000,000.00	40,74 Persen	3,719,000,000.00	44,82 Persen	4,090,900,000.00	47,6 Persen	4,090,900,000.00	Dinas Kelautan Dan Perikanan			
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	486,598,000.00	81%	554,200,000.00	82%	585,250,000.00	83%	586,475,000.00	84%	623,014,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	123,500,000.00	3 Unit	855,650,000.00	3 Unit	385,000,000.00	3 Unit	375,000,000.00	3 Unit	410,000,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kелеmbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	139,990,000.00	20%	373,100,000.00	20%	312,000,000.00	20%	312,000,000.00	20%	345,500,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang Dilakukan Pemeriksaan	253 Sampel	368,744,000.00	210 Sampel	217,050,000.00	220 Sampel	200,000,000.00	230 Sampel	357,000,000.00	240 Sampel	415,000,000.00	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangan kepentinngan terhadap pelayanan UPTD	0%	569.400.000.00	81%	632.500.000.00	82%	695.750.000.00	83%	765.325.000.00	84%	632.500.000.00	UPTD Bahai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	284.000.000.00	3 Unit	315.200.000.00	3 Unit	363.000.000.00	3 Unit	399.300.000.00	3 Unit	315.200.000.00	UPTD Bahai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	0%	167.005.000.00	20%	463.200.000.00	20%	485.500.000.00	20%	516.550.000.00	20%	463.200.000.00	UPTD Bahai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Benih Udang Windu/Ikan Air Laut	2500000000 Ekor	3.796.810.000.00	2700000000 Ekor	4.799.100.000.00	2800000000 Ekor	5.111.750.000.00	2900000000 Ekor	5.510.425.000.00	3000000000 Ekor	4.789.100.000.00	UPTD Bahai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD	0%	80%	584,600,000.00	81%	723,200,000.00	82%	730,800,000.00	83%	780,000,000.00	84%	795,000,000.00	84%	795,000,000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit Kerja UPTD yang Memiliki Kinerja Pelayanan Tepat Waktu	0 Unit	3 Unit	99,775,000.00	3 Unit	684,805,775.00	3 Unit	490,600,000.00	3 Unit	611,900,000.00	3 Unit	764,785,000.00	3 Unit	764,785,000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	147,650,000.00	20%	277,839,225.00	20%	269,100,000.00	20%	287,000,000.00	20%	294,000,000.00	20%	294,000,000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/ikan Air Tawar	6000 Ekor	6500 Ekor	853,175,000.00	0 Ekor	-	0 Ekor	-	0 Ekor	-	0 Ekor	0 Ekor	0 Ekor	-	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu
3.01.31	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau / Air Laut	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang Gajah/ikan Air Laut	0 Ekor	0 Ekor	-	70000 Ekor	814,155,000.00	75000 Ekor	808,500,000.00	80000 Ekor	850,000,000.00	85000 Ekor	928,000,000.00	85000 Ekor	928,000,000.00	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Muara Badak - Sebulu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
3.02	Parwisata			12,817,000,000.00	16,000,000,000.00		15,000,000,000.00	15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00		15,000,000,000.00			
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	2,231,698,000.00	4,750,000,000.00	90%		2,300,000,000.00	95%		2,300,000,000.00	95%		2,300,000,000.00	95%	2,300,000,000.00	Dinas Partwisata
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2,842,550,000.00	2,320,000,000.00	5 unit		2,400,000,000.00	5 unit		2,400,000,000.00	5 unit		2,400,000,000.00	5 unit	2,400,000,000.00	Dinas Partwisata
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,587,152,000.00	1,600,000,000.00	55%		1,600,000,000.00	60%		1,600,000,000.00	65%		1,600,000,000.00	70%	1,600,000,000.00	Dinas Partwisata
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65.18 nilai AKIP	900,000,000.00	930,000,000.00	75 nilai AKIP		950,000,000.00	80 nilai AKIP		950,000,000.00	80 nilai AKIP		950,000,000.00	80 nilai AKIP	950,000,000.00	Dinas Partwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Destinasi KPP Strategis yang di Promosikan	2 Destinasi	970.000.000.00	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	0 Destinasi	-	Dinas Pariwisata
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan	1.885.600.000.00	2 Kawasan	2.800.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	2 Kawasan	3.050.000.000.00	Dinas Pariwisata
3.02.17	Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Provinsi yang dipromosikan	0 Destinasi	-	8 Destinasi	1.200.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	10 Destinasi	1.550.000.000.00	Dinas Pariwisata
3.02.18	Program Pengembangan Industri dan Kembangan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dikembangkan	0 Orang	-	520 Orang	1.200.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	660 Orang	1.600.000.000.00	Dinas Pariwisata
3.02.19	Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	-	270 orang	1.200.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	350 orang	1.550.000.000.00	Dinas Pariwisata

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang dikembangkan pengembangannya	10 Jenis Usaha	1,000,000,000.00	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	0 Jenis Usaha	-	-	Dinas Pariwisata
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	0 orang	1,400,000,000.00	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	-	Dinas Pariwisata
3.03	Pertanian			88,017,803,400.00	133,105,485,740.00	106,647,500,000.00	104,372,141,950.00	109,152,087,380.00								
3.03.41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	226017 Ton	3,020,600,000.00	2,40245 Ton	3,700,000,000.00	2,47698 Ton	3,700,000,000.00	2,55387 Ton	3,950,000,000.00	263320 Ton	3,700,000,000.00	263320 Ton	3,700,000,000.00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.51	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi	383958 Ton	11,471,580,000.00	423000 Ton	13,550,000,000.00	444000 Ton	13,550,000,000.00	466000 Ton	15,150,000,000.00	495000 Ton	14,550,000,000.00	495000 Ton	14,550,000,000.00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.03.49	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang Menggunakan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat	150 Ha	655,550,000.00	165 Ha	2,298,990,000.00	180 Ha	2,000,000,000.00	195 Ha	1,400,000,000.00	210 Ha	1,400,000,000.00	210 Ha	1,400,000,000.00		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.48	Program Perindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Scrangan OPT	6192 Ha	6165 Ha	2,907,112,500.00	6139 Ha	2,705,590,000.00	6112 Ha	2,495,000,000.00	6086 Ha	3,360,000,000.00	6060 Ha	1,450,000,000.00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rate-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat	75%	80%	4,897,210,900.00	81%	3,523,500,740.00	82%	3,402,500,000.00	83%	3,880,500,000.00	84%	2,212,500,000.00	UPTD Baki Benih Induk Hortikultura		
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanganu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,680,265,900.00	83%	2,680,265,900.00	86%	3,503,900,000.00	89%	3,371,229,600.00	92%	3,500,000,000.00	Dinas Perkebunan		
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,156,565,000.00	5 unit	2,434,000,000.00	5 unit	2,581,500,000.00	5 unit	2,550,000,000.00	5 unit	3,000,000,000.00	Dinas Perkebunan		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	1,992,775,000.00	20%	2,291,605,000.00	20%	2,291,605,000.00	20%	2,000,000,000.00	20%	2,600,000,000.00	Dinas Perkebunan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akumulatif Kinerja PD	0 Nilai	62 Nilai	744,675,000.00	68 Nilai	762,823,000.00	70 Nilai	991,671,000.00	72 Nilai	1,289,172,000.00	74 Nilai	1,675,924,000.00	Dinas Perkebunan		
3.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	0 Ton	70533 Ton	74060 Ton	77763 Ton	81651 Ton	90000 Ton	16,717,791,000.00	18020894 ton	18197504 ton	18197504 ton	18,472,673,000.00	Dinas Perkebunan		
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	0 ton	16717254 ton	17036402 ton	21,805,111,250.00	16,717,791,000.00	16,717,791,000.00	16,717,791,000.00	16,717,791,000.00	16,717,791,000.00	16,717,791,000.00	16,717,791,000.00		16,717,791,000.00	
Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	0 ton		3307 ton	3771 ton			4368 ton	5000 ton								

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	0 ton	5317 ton		5849 ton		6434 ton		7077 ton		8517 ton				
				12105 Ton		12468 Ton		12479 Ton		12500 Ton		12853 Ton				
				1528846 5 Ton		1681293 8 Ton		1713684 9 Ton		18126490 Ton		1831387 4 Ton				
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	%	20%	148,450,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-			Dinas Perkebunan
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat	%	30%	903,760,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-			Dinas Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi	223.710.500.000	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	Dinas Perkebunan	
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi	395.800.000.000	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	0 Komoditi	-	Dinas Perkebunan	
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	Kelompok Tani	228.075.000.000	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Kelompok Tani	-	Dinas Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	1,87 Juta ton CO2eq	4,79 Juta ton CO2eq	275,800,000,000	4,08 Juta ton CO2eq	977,500,000,000	4,07 Juta ton CO2eq	977,500,000,000	4,06 Juta ton CO2eq	1,020,000,000,000	4,04 Juta ton CO2eq	1,490,000,000,000			Dinas Perkebunan		
3.03.77	Program Konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	%	50%	247,750,000,000	%	-	%	-	%	-	%	-			Dinas Perkebunan		
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pemimpin Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapangan dan teknis perkebunan	Orang	25 Orang	355,775,000,000	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-			Dinas Perkebunan		
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan kelompok tani	Gapoktan	5 Gapoktan	339,425,000,000	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Gapoktan	-	Gapoktan	-			Dinas Perkebunan		
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	98 Perusahaan	32 Perusahaan	542,400,000,000	35 Perusahaan	1,010,821,250,000	35 Perusahaan	1,010,821,000,000	35 Perusahaan	1,150,000,000,000	35 Perusahaan	1,537,331,000,000			Dinas Perkebunan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.81	Program Peningkatan Kinerja Mitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	Kelompok	20 Kelompok	276,675,000.00	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Kelompok	-	Dinas Perkebunan
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	Komoditi	5 Komoditi	347,250,000.00	Komoditi	-	Komoditi	-	Komoditi	-	Komoditi	-	Komoditi	-	Dinas Perkebunan
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	%	40%	271,500,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Perkebunan
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	0%	75%	1,495,388,000.00	85%	-	90%	-	95%	-	100%	-	100%	-	Dinas Perkebunan
3.03.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	0 Produk	0 Produk	-	2 Produk	2,251,383,750.00	2 Produk	2,251,383,000.00	3 Produk	2,400,000,000.00	3 Produk	3,424,072,000.00	3 Produk	3,424,072,000.00	Dinas Perkebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangan kepeminangan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	327,160,000.00	83%	526,234,000.00	86%	370,662,387.00	89%	497,570,650.00	92%	573,254,380.00	92%	573,254,380.00	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	505,925,000.00	3 unit	1,150,000,000.00	3 unit	300,108,313.00	3 unit	345,124,400.00	3 unit	405,000,000.00	3 unit	405,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	20%	379,280,000.00	20%	600,000,000.00	20%	501,597,800.00	20%	576,837,400.00	20%	710,000,000.00	20%	710,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih pekebunan	Jumlah penangan kasus peredaran benih ilegal	0 Kasus	6 Kasus	626,260,000.00	0 Kasus	-	0 Kasus	-	0 Kasus	-	-	0 Kasus	-	-	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	5000000 Benih	0 Benih	401,105,000.00	0 Benih	-	0 Benih	-	0 Benih	-	-	0 Benih	-	-	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar	2825176 Benih	0 Benih	-	2905176 Benih	1,729,171,000.00	2945176 Benih	1,327,631,500.00	2985176 Benih	1,526,776,500.00	3025176 Benih	1,700,000,000.00	3025176 Benih	1,700,000,000.00	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangan kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	506,853,600.00	83%	582,881,640.00	86%	626,345,850.00	89%	770,861,200.00	92%	901,333,000.00	92%	901,333,000.00	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	394,280,000.00	3 unit	1,713,958,830.00	3 unit	521,455,300.00	3 unit	599,650,500.00	3 unit	800,000,000.00	3 unit	800,000,000.00	UPTD Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	267,210,000.00	20%	400,000,000.00	20%	353,385,300.00	20%	406,392,900.00	20%	470,000,000.00	20%	470,000,000.00	UPTD Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	25 Kelompok	461,284,000.00	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	UPTD Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.87	Program Pengembangan Biot Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	500 Liter	425,060,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan	
3.03.95	Program Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah Taksasi Akibat Serangan OPT	208538000 Rupiah	-	1087534440 Rupiah	1,303,159,530.00	1,047,138,860 Rupiah	1,498,633,550.00	916,648,000 Rupiah	1,723,428,400.00	774,940,000 Rupiah	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00	UPTD Pengembangan Perindungan Tanaman Perkebunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	-	83%	371,049,300.00	86%	376,234,000.00	89%	300,000,000.00	92%	580,000,000.00	UPTD Produksi Benih Tanaman Perkebunan			
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	-	3 unit	260,963,750.00	3 unit	300,308,200.00	3 unit	270,720,600.00	3 unit	385,000,000.00	UPTD Produksi Benih Tanaman Perkebunan			
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	-	20%	436,172,000.00	20%	379,280,000.00	20%	312,780,000.00	20%	670,000,000.00	UPTD Produksi Benih Tanaman Perkebunan			
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	-	85%	1,618,306,800.00	90%	1,618,306,800.00	95%	1,618,306,800.00	100%	1,665,000,000.00	UPTD Produksi Benih Tanaman Perkebunan			
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	2,692,700,000.00	81%	2,700,000,000.00	82%	3,000,000,000.00	83%	3,100,000,000.00	84%	3,300,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1,491,778,814.00	5 unit	4,550,000,000.00	5 unit	3,470,000,000.00	5 unit	3,500,000,000.00	5 unit	3,530,000,000.00	5 unit	3,530,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	1,480,196,000.00	12%	1,830,000,000.00	13%	1,710,000,000.00	14%	1,790,000,000.00	14%	1,870,000,000.00	15%	1,870,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77.86 Nilai	1,075,000,000.00	78.86 Nilai	1,700,000,000.00	79.36 Nilai	1,300,000,000.00	79.86 Nilai	1,400,000,000.00	80.36 Nilai	1,500,000,000.00	80.36 Nilai	1,500,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.03.23	Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10%	1,112,468,000.00	11%	2,200,000,000.00	12%	1,300,000,000.00	13%	1,450,000,000.00	14%	1,600,000,000.00	14%	1,600,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.03.34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang terregistrer	Unit	5,800,000,000.00	35 Unit	10,250,000,000.00	40 Unit	11,670,000,000.00	35 Unit	7,400,000,000.00	35 Unit	7,600,000,000.00	35 Unit	7,600,000,000.00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.89	Program Pencegahan dan Penguatalangan Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana	0 Unit	5 Unit	1,115,150,000.00	35 Unit	2,600,000,000.00	40 Unit	2,450,000,000.00	35 Unit	2,600,000,000.00	35 Unit	2,750,000,000.00	35 Unit	2,750,000,000.00	Dinas Perernakan dan Kesehatan Hewan
3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Calving Interval	19 Bulan	18 Bulan	7,000,000,000.00	18 Bulan	24,100,000,000.00	17 Bulan	7,100,000,000.00	17 Bulan	7,700,000,000.00	16 Bulan	8,300,000,000.00	16 Bulan	8,300,000,000.00	Dinas Perernakan dan Kesehatan Hewan
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	80%	989,233,186.00	81%	1,200,000,000.00	82%	1,200,000,000.00	83%	1,300,000,000.00	84%	1,500,000,000.00	84%	1,500,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,193,400,000.00	3 unit	2,160,000,000.00	3 unit	1,960,000,000.00	3 unit	1,580,000,000.00	3 unit	1,590,000,000.00	3 unit	1,590,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	11%	267,620,000.00	12%	540,000,000.00	13%	540,000,000.00	14%	220,000,000.00	15%	230,000,000.00	15%	230,000,000.00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	10%	5.878.254.000,00	11%	3.100.000.000,00	12%	2.300.000.000,00	13%	1.700.000.000,00	14%	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak		
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	764.738.554,00	81%	870.000.000,00	82%	900.000.000,00	83%	1.100.000.000,00	84%	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	192.471.446,00	3 unit	1.022.000.000,00	3 unit	460.000.000,00	3 unit	470.000.000,00	3 unit	475.000.000,00	475.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10%	218.000.000,00	12%	385.000.000,00	13%	340.000.000,00	14%	375.000.000,00	15%	385.000.000,00	385.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan peryakit hewan dan produk asal hewan	11%	896.890.000,00	12%	2.615.000.000,00	13%	3.300.000.000,00	14%	1.500.000.000,00	15%	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
3.04	Kehutanan			297.205.957.750,00		328.215.057.750,00		328.215.057.750,00		328.215.057.750,00		328.215.057.750,00	328.215.057.750,00			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	50%	3,179,935,000.00	85%	3,376,435,000.00	90%	3,376,435,000.00	95%	3,376,435,000.00	100%	3,376,435,000.00		Dinas Kesehatan		
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	2,463,895,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00	5 unit	2,037,950,000.00		Dinas Kesehatan		
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	2,588,400,000.00	85%	2,606,000,000.00	90%	2,606,000,000.00	95%	2,606,000,000.00	100%	2,606,000,000.00		Dinas Kesehatan		
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70.73 Nilai AKIP	1,774,590,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00	70 Nilai AKIP	1,306,500,000.00		Dinas Kesehatan		
3.04.16	Program Perencanaan dan Pemantauan Hitan	Realisasi Penerimaan PNB/ Sektor Kesehatan	167 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	165 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	170 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	175 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00	180 Milyar Rupiah	3,471,960,000.00		Dinas Kesehatan		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	13,98%	1,194,850,000.00	13,98%	1,194,850,000.00	13,98%	1,194,850,000.00	13,98%	1,194,850,000.00	13,98%	1,194,850,000.00	13,98%	1,194,850,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.41	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	2%	782,100,000.00	1,75%	782,100,000.00	1,50%	782,100,000.00	1,25%	782,100,000.00	1%	782,100,000.00	Dinas Kehutanan			
3.04.42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	118000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	32000 Ha	2,330,970,000.00	Dinas Kehutanan			
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	11 Unit Usaha	1,729,390,425.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	5 Unit Usaha	2,572,000,000.00	Dinas Kehutanan			
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	1,540,886,800.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	35 Jumlah Usulan	3,428,000,000.00	Dinas Kehutanan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan (DBH SDA/DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0,25%	14,359,425,100,00	0,25%	5,500,000,000,00	0,25%	5,500,000,000,00	0,25%	5,500,000,000,00	0,25%	5,500,000,000,00	0,25%	5,500,000,000,00	Dinas Kehutanan	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	9 kasus Tindak Pidana	1,542,039,700,00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000,00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000,00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000,00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000,00	39 kasus Tindak Pidana	1,700,000,000,00	Dinas Kehutanan	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	5,764,634,750,00	350 Hektar	10,000,000,000,00	350 Hektar	10,000,000,000,00	350 Hektar	10,000,000,000,00	350 Hektar	10,000,000,000,00	350 Hektar	10,000,000,000,00	Dinas Kehutanan	
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	4 SK/Sertifikat	1,542,040,000,00	37 SK/Serti fikat	2,800,000,000,00	37 SK/Sertifikat	2,800,000,000,00	37 SK/Sertifikat	2,800,000,000,00	37 SK/Serti fikat	2,800,000,000,00	37 SK/Serti fikat	2,800,000,000,00	Dinas Kehutanan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.52	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DR)	Persentase Realisasi Keunggulan DBH SDA DR meningkat	0%	-	25%	978,416,775.00	27.50%	978,416,775.00	30%	978,416,775.00	32.50%	978,416,775.00		978,416,775.00	Dinas Kehutanan	
3.04.53	Program Pengelolaan KPH Lindung	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0 Ha	0 Ha	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00	50 Ha	179,936,000.00		179,936,000.00	Dinas Kehutanan	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	846,594,000.00	85%	846,594,000.00	90%	846,594,000.00	95%	846,594,000.00	100%	846,594,000.00		846,594,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00	3 Unit	731,906,000.00		731,906,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	229,100,000.00	85%	229,100,000.00	90%	229,100,000.00	95%	229,100,000.00	100%	229,100,000.00		229,100,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	Unit Usaha	432,800,000.00	4 Unit Usaha	800,000,000.00	4 Unit Usaha	850,000,000.00	4 Unit Usaha	900,000,000.00	4 Unit Usaha	900,000,000.00		900,000,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	5 Jumlah Usulan	1,550,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,550,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,550,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,550,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,550,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,550,000,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.45	Program Pencegahan dan Pemangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	0.25%	14,461,266,775.00	0.25%	12,475,166,775.00	0.25%	12,400,166,775.00	0.25%	12,475,166,775.00	0.25%	12,400,166,775.00	0.25%	12,375,166,775.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.46	Program Perfindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	2,050,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	2,050,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	2,050,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	2,050,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	2,050,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	2,050,000,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	86 Hektar	6,413,300,000.00	86 Hektar	8,349,400,000.00	86 Hektar	8,374,400,000.00	86 Hektar	8,349,400,000.00	86 Hektar	8,374,400,000.00	86 Hektar	8,399,400,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.48	Program Pengembangan Pelembaban (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	0 Bibit	-	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.50	Program Pengelolaan Tairura	Luas Kawasan Hutan Tairura yang dikelola	0 Hektar	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	150 Hektar	320,400,000.00	UPTD Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	616,850,000.00	85%	616,850,000.00	90%	616,850,000.00	95%	616,850,000.00	100%	616,850,000.00	100%	616,850,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Beranu Barat
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	3 Unit	640,930,000.00	0 Unit	640,930,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Beranu Barat
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	50%	80%	269,200,000.00	85%	269,200,000.00	90%	269,200,000.00	95%	269,200,000.00	100%	269,200,000.00	100%	269,200,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Beranu Barat
3.04.43	Program Penyubhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	5 Unit Usaha	200,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Beranu Barat
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	4 Jumlah Usulan	3,975,620,000.00	4 Jumlah Usulan	4,176,120,000.00	4 Jumlah Usulan	4,232,520,000.00	4 Jumlah Usulan	3,937,910,000.00	4 Jumlah Usulan	4,232,520,000.00	4 Jumlah Usulan	2,804,410,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Beranu Barat

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahab (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurut	0%	0,25%	4.601,306.775.000	0,25%	4.133,666.775.000	0,25%	3.381,936.775.000	0,25%	2.723,136.775.000	0,25%	2.723,136.775.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berbau Barot		
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	5 kasus Tindak Pidana	3.162,470.000.000	5 kasus Tindak Pidana	3.218,870.000.000	5 kasus Tindak Pidana	2.724,260.000.000	5 kasus Tindak Pidana	2.010,460.000.000	5 kasus Tindak Pidana	2.010,460.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berbau Barot		
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahab (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahab Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	200 Hektar	11.188.000.000.000	200 Hektar	11.386,500.000.000	200 Hektar	14.022.000.000.000	200 Hektar	16.657,500.000.000	200 Hektar	16.657,500.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berbau Barot		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	8 SK/Serti ikat	1.946,670.000.000	8 SK/Sertif ikat	2.103,070.000.000	8 SK/Sertif ikat	1.008,460.000.000	8 SK/Serti fikat	879,060.000.000	8 SK/Serti fikat	879,060.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berbau Barot		
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kehutanan oleh masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	6.665,700.000.000	8 Unit Usaha	6.665,700.000.000	8 Unit Usaha	6.665,700.000.000	8 Unit Usaha	6.665,700.000.000	8 Unit Usaha	6.665,700.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berbau Barot		
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	1.076,890.000.000	90%	1.076,890.000.000	95%	1.076,890.000.000	100%	1.076,890.000.000	100%	1.076,890.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongam		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	3 Unit	696,010,000.00	0 Unit	696,010,000.00	0 Unit	696,010,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bonggan	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	248,500,000.00	85%	248,500,000.00	90%	248,500,000.00	95%	248,500,000.00	100%	248,500,000.00	100%	248,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bonggan	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	309,450,000.00	2 Unit Usaha	1,120,000,000.00	2 Unit Usaha	1,250,000,000.00	2 Unit Usaha	1,275,000,000.00	2 Unit Usaha	1,300,000,000.00	2 Unit Usaha	1,300,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bonggan	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan kebakaran izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	1,206,900,000.00	3 Jumlah Usulan	1,090,000,000.00	3 Jumlah Usulan	950,000,000.00	3 Jumlah Usulan	800,000,000.00	3 Jumlah Usulan	850,000,000.00	3 Jumlah Usulan	850,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bonggan	
3.04.45	Program Pencegahan dan Pengurangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	20,838,650,000.00	0.25%	8,390,000,000.00	0.25%	8,250,000,000.00	0.25%	7,600,000,000.00	0.25%	7,475,000,000.00	0.25%	7,475,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bonggan	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kebencanaan yang ditangani	1 kasus Tindak Pidana	264,500,000.00	6 kasus Tindak Pidana	800,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	700,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,075,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,125,000,000.00	6 kasus Tindak Pidana	1,125,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bonggan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 hektar	2,655,066,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	13,824,566,775.00	100 hektar	100 hektar	13,824,566,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengada dan pengada benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	0 SK/Sertifikat	1 SK/Serti fikat	1 SK/Sertif ikat	1 SK/Sertif ikat	1 SK/Sertif ikat	1 SK/Sertif ikat	1 SK/Sertif ikat	1 SK/Sertif ikat	1 SK/Serti fikat	700,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kebutuhan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	1,056,600,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	6,665,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan pelayan UPTD (SKM)	50%	746,450,000.00	85%	746,450,000.00	90%	746,450,000.00	95%	746,450,000.00	100%	100%	746,450,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus		
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	642,000,000.00	3 Unit	3 Unit	642,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus		
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	590,800,000.00	85%	590,800,000.00	90%	590,800,000.00	95%	590,800,000.00	100%	100%	590,800,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	908,364,000.00	5 Unit Usaha	1,206,084,575.00	5 Unit Usaha	1,206,084,575.00	5 Unit Usaha	1,206,084,575.00	5 Unit Usaha	1,206,084,575.00	5 Unit Usaha	1,206,084,575.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	2,467,524,000.00	2 Jumlah Usulan	1,773,925,000.00	2 Jumlah Usulan	1,959,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	2 Jumlah Usulan	2,155,925,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahab (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	16,859,792,800.00	0.25%	7,937,450,000.00	0.25%	7,514,250,000.00	0.25%	7,318,250,000.00	0.25%	7,318,250,000.00	0.25%	7,454,525,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Keuhutan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	1,631,969,600.00	6 kasus Tindak Pidana	3,405,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,810,600,000.00	6 kasus Tindak Pidana	3,674,325,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahab (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahab Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	2,404,166,375.00	100 Hektar	10,744,895,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	100 Hektar	10,550,595,200.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah SK pengedar benih/bibit, Sertifikasi Sumber Benih	0 SK/Sertifikat	1,002,750,000.00	1 SK/Sertifikat	206,642,000.00	1 SK/Sertifikat	233,142,000.00	1 SK/Sertifikat	233,142,000.00	1 SK/Sertifikat	233,142,000.00	1 SK/Sertifikat	233,142,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kebutuhan oleh masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	948,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	2 Unit Usaha	2,548,750,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	721,297,000.00	85%	721,297,000.00	90%	721,297,000.00	95%	721,297,000.00	100%	721,297,000.00	100%	721,297,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	3 Unit	1,358,300,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	336,620,000.00	85%	336,620,000.00	90%	336,620,000.00	95%	336,620,000.00	100%	336,620,000.00	100%	336,620,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	343,700,000.00	4 Unit Usaha	499,600,000.00	4 Unit Usaha	490,000,000.00	4 Unit Usaha	510,300,000.00	4 Unit Usaha	510,300,000.00	4 Unit Usaha	563,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Satempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	7,530,100,000.00	10 Jumlah Usulan	4,260,300,000.00	10 Jumlah Usulan	3,523,776,000.00	10 Jumlah Usulan	4,039,000,000.00	10 Jumlah Usulan	3,947,600,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA/DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0%	14,043,725,000.00	0.25%	6,731,750,000.00	0.25%	7,506,530,000.00	0.25%	7,478,140,000.00	0.25%	7,322,250,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindakan Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2,046,716,775.00	1 kasus Tindak Pidana	1,910,565,000.00	1 kasus Tindak Pidana	2,047,508,800.00	1 kasus Tindak Pidana	1,932,760,000.00	1 kasus Tindak Pidana	1,954,100,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	1,124,800,000.00	100 Hektar	10,508,451,775.00	100 Hektar	10,869,000,000.00	100 Hektar	10,408,841,775.00	100 Hektar	10,566,091,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			
3.04.48	Program Pengembangan Perbibitan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	185,525,000.00	25000 Bibit	1,363,900,000.00	25000 Bibit	837,751,975.00	25000 Bibit	905,525,000.00	25000 Bibit	921,325,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kebutuhan oleh KPH dan masyarakat melaut pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	6 Unit Usaha	376,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	6 Unit Usaha	1,976,783,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	657,950,000.00	85%	657,950,000.00	90%	657,950,000.00	95%	657,950,000.00	100%	657,950,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	3 Unit	224,860,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	483,500,000.00	85%	483,500,000.00	90%	483,500,000.00	95%	483,500,000.00	100%	483,500,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3.04.43	Program Penyubhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	729,856,775.00	3 Unit Usaha	1,000,000,000.00	3 Unit Usaha	1,175,000,000.00	3 Unit Usaha	1,125,000,000.00	3 Unit Usaha	1,550,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	10 Jumlah Usulan	3.200,000,000.00	10 Jumlah Usulan	3.050,000,000.00	10 Jumlah Usulan	2.525,000,000.00	10 Jumlah Usulan	2.200,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				
3.04.45	Program Peneanganan dan Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurut	0%	0.25%	7.223,066,775.00	0.25%	7.566,066,775.00	0.25%	5.642,066,775.00	0.25%	4.659,409,275.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				
3.04.46	Program Perindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	2 kasus Tindak Pidana	1.220,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1.250,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1.290,000,000.00	2 kasus Tindak Pidana	1.315,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	350 Hektar	11,401,500,000.00	350 Hektar	11,358,500,000.00	350 Hektar	13,912,500,000.00	350 Hektar	14,840,157,500.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	0 Bibit	200000 Bibit	1,230,000,000.00	200000 Bibit	875,000,000.00	200000 Bibit	780,000,000.00	200000 Bibit	710,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.51	Program Pengelolaan KHP	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan	0%	2,073,649,000.00	1,95%	3,673,649,000.00	1,90%	3,673,649,000.00	1,85%	3,673,649,000.00	1,80%	3,673,649,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santia			
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	1,287,420,000.00	85%	1,287,420,000.00	90%	1,287,420,000.00	95%	1,287,420,000.00	100%	1,287,420,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	3 Unit	495,492,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelemagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	50%	291,100,000.00	85%	291,100,000.00	90%	291,100,000.00	95%	291,100,000.00	100%	291,100,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	2 Unit Usaha	1,146,185,000.00	2 Unit Usaha	1,573,100,000.00	2 Unit Usaha	1,730,410,000.00	2 Unit Usaha	1,903,451,000.00	2 Unit Usaha	2,093,796,100.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	4 Jumlah Usulan	2,740,840,000.00	5 Jumlah Usulan	2,428,750,000.00	5 Jumlah Usulan	2,481,625,000.00	5 Jumlah Usulan	2,549,787,500.00	5 Jumlah Usulan	2,634,766,250.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.45	Program Pencegahan dan Penguatan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	14,729,810,000.00	0.25%	8,679,135,000.00	0.25%	8,679,135,000.00	0.25%	8,679,135,000.00	0.25%	8,679,135,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	4 kasus Tindak Pidana	537,429,000.00	5 kasus Tindak Pidana	1,186,174,000.00	5 kasus Tindak Pidana	1,274,791,400.00	5 kasus Tindak Pidana	1,372,270,540.00	5 kasus Tindak Pidana	1,479,497,594.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	5,426,302,775.00	340 Hektar	10,807,407,775.00	340 Hektar	10,508,605,375.00	340 Hektar	10,169,922,735.00	340 Hektar	9,787,371,831.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			
3.04.48	Program Pengembangan Perbunan (DBH DR)	Jumlah Bibit	Bibit	694,000,000.00	100000 Bibit	600,000,000.00	100000 Bibit	600,000,000.00	100000 Bibit	600,000,000.00	100000 Bibit	600,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kebutuhan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	4 Unit Usaha	936,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	4 Unit Usaha	4,136,088,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	80%	800,125,000.00	85%	800,125,000.00	90%	800,125,000.00	95%	800,125,000.00	100%	800,125,000.00	100%	800,125,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	3 Unit	683,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	80%	465,075,000.00	85%	465,075,000.00	90%	465,075,000.00	95%	465,075,000.00	100%	465,075,000.00	100%	465,075,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu
3.04.43	Program Penyuluhan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	5 Unit Usaha	582,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	724,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	2 Jumlah Usulan	1,199,480,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	
3.04.45	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	10,244,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	0.25%	7,724,758,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	
3.04.46	Program Perfundungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kebutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	1,250,226,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	4 kasus Tindak Pidana	923,826,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	12,450,354,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	600 Hektar	14,229,754,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	
3.04.48	Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)	Jumlah Bibit	50000 Bibit	604,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	50000 Bibit	614,748,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.51	Program Pengelolaan KPH	Jumlah unit usaha produktif kebutuhan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	779,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	2 Unit Usaha	2,379,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengkulu	
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPTD (SKM)	50%	716,850,000.00	85%	716,850,000.00	90%	716,850,000.00	95%	716,850,000.00	100%	716,850,000.00	100%	716,850,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aayu	
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	3 Unit	763,700,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aayu	
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50%	613,400,000.00	85%	613,400,000.00	90%	613,400,000.00	95%	613,400,000.00	100%	613,400,000.00	100%	613,400,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Aayu	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.43	Program Penyisihan (DBH DR)	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Pada KTH	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	1,600,000,000.00	5 Unit Usaha	1,600,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	5 Unit Usaha	1,700,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.44	Program Pemberdayaan Masyarakat Seempat (DBH DR)	Jumlah usulan izin perhutanan sosial	0 Jumlah Usulan	3,804,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,928,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,928,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,728,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,728,000,000.00	5 Jumlah Usulan	1,328,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.45	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)	Persentase luas kebakaran hutan dan lahan menurun	0.25%	16,105,485,575.00	0.25%	7,246,566,775.00	0.25%	7,046,566,775.00	0.25%	6,446,566,775.00	0.25%	6,446,566,775.00	0.25%	5,946,566,775.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.46	Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	0 kasus Tindak Pidana	3,273,081,200.00	10 kasus Tindak Pidana	3,500,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,200,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,100,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,100,000,000.00	10 kasus Tindak Pidana	3,000,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.04.47	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	0 Hektar	2,092,000,000.00	250 Hektar	11,000,000,000.00	250 Hektar	11,500,000,000.00	250 Hektar	12,300,000,000.00	250 Hektar	12,300,000,000.00	250 Hektar	13,300,000,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.04.51	Program Pengelolaan KPHP	Jumlah unit usaha produktif kebutuhan oleh KPH dan masyarakat melalui pengelolaan hutan lestari	0 Unit Usaha	9 Unit Usaha	678,050,000.00	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	9 Unit Usaha	10,878,050,000.00	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				17,861,800,000.00	71,776,650,000.00		71,876,660,000.00		72,226,660,000.00		72,476,660,000.00				
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	2,998,790,000.00	3,149,990,000.00	85%	3,100,000,000.00	90%	3,100,000,000.00	95%	3,300,000,000.00	100%	3,500,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	2,319,453,000.00	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	5 unit	850,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	80%	1,365,125,000.00	1,550,000,000.00	85%	1,650,000,000.00	90%	1,650,000,000.00	95%	1,750,000,000.00	100%	1,800,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65,68 Nilai AKIP	67 Nilai AKIP	1,470,550,000.00	68,35 Nilai AKIP	1,750,000,000.00	67,67 Nilai AKIP	1,800,000,000.00	68,18 Nilai AKIP	1,850,000,000.00	68,68 Nilai AKIP	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3,81%	4,48%	2,200,700,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK berlistrik	945,607 KK	965,607 KK	1,723,350,000.00	989,607 KK	11,000,000,000.00	1,018,607 KK	11,000,000,000.00	1,041,607 KK	11,000,000,000.00	1,078,607 KK	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah	%	3%	1,272,592,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	Persentase rehabilitasi/ reklamasi lahan Pasca Tambang yang dirchabilitasi	%	30%	160,000,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas	Perusahaan	80 Perusahaan	3,129,970,000.00	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Perusahaan	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.43	Program Pengembangan Sumber Daya Geologi	Peningkatan nilai tambah data sumberdaya mineral dan batubara	%	95%	1,221,270,000.00	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.45	Program Pengembangan Sumberdaya Geologi dan Tata Lingkungan	Persentase perusahaan yang mengikuti kaidah perhitungan sumberdaya dan cadangan	60%	0%	2,493,862,000.00	67%	2,493,862,000.00	74%	2,493,862,000.00	80%	2,493,862,000.00	88%	2,493,862,000.00	88%	2,493,862,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.46	Program Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	38 Perusahaan	0 Perusahaan	3,289,970,000.00	45 Perusahaan	3,289,970,000.00	50 Perusahaan	3,289,970,000.00	55 Perusahaan	3,289,970,000.00	60 Perusahaan	3,289,970,000.00	60 Perusahaan	3,289,970,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05.47	Program Diversifikasi dan Konservasi Energi	% Pemanfaatan EBT	3.81%	0%	47,692,828,000.00	4.82%	47,692,828,000.00	6.08%	47,692,828,000.00	7.34%	47,692,828,000.00	8.40%	47,692,828,000.00	8.40%	47,692,828,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.06	Perdagangan				6,862,400,000.00		7,626,048,000.00		9,959,664,000.00		10,705,896,000.00		10,144,527,000.00		10,144,527,000.00	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi.	0%	2,150,000,000.00	5%	2,158,000,000.00	5%	4,000,000,000.00	5%	4,318,000,000.00	5%	3,300,000,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah			
3.06.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USDollar	737,000,000.00	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	0 milyar USDollar	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah			
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rentang waktu kecukupan stok barang pokok dan barang strategis	bulan	971,600,000.00	bulan	-	bulan	-	bulan	-	bulan	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah			
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah Pelaku usaha dan nilai transaksi dalam kerjasama pemasaran	0 milyar USDollar	1,079,400,000.00	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	0 Pelaku usaha/nilai transaksi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah			
3.06.34	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Nilai ekspor produk non migas dan non batubara	0 milyar USDollar	-	1.43 milyar USDollar	3,077,480,000.00	1.72 milyar USDollar	3,366,914,000.00	1.89 milyar USDollar	3,688,776,000.00	1.89 milyar USDollar	4,047,247,000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah			
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Presentasi peningkatan jumlah customer yang dilayani	0%	1,924,400,000.00	10%	2,390,568,000.00	10%	2,592,750,000.00	10%	2,699,120,000.00	10%	2,797,280,000.00	UPTD Baku Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			
3.07	Perindustrian			3,155,800,000.00		4,080,000,000.00		4,692,000,000.00		5,395,810,000.00		6,205,170,000.00				

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Volume usaha kawasan ekonomi khusus (KEK) MBTK	miliar rupiah	100 miliar rupiah	626.000.000.00	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	miliar rupiah	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
3.07.33	Program Peningkatan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan	0,23%	1%	2.529.800.000.00	1%	4.080.000.000.00	1%	4.692.000.000.00	1%	5.395.810.000.00	1,50%	6.205.170.000.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
3.08	Transmigrasi				712.500.000.00		862.500.000.00		962.500.000.00		1.010.625.000.00		1.010.625.000.00	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	0 Kimtrans	4 Kimtrans	712.500.000.00	4 Kimtrans	862.500.000.00	4 Kimtrans	962.500.000.00	4 Kimtrans	1.010.625.000.00	4 Kimtrans	1.010.625.000.00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang				492.081.656.000.00		502.235.701.000.00		504.690.402.000.00		507.521.437.000.00		509.434.829.000.00	
4.01	Kesekretariatan Daerah				279.907.504.000.00		281.232.504.000.00		282.342.504.000.00		283.457.504.000.00		283.857.504.000.00	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	23.600.770.000.00	75%	24.674.497.550.00	80%	23.600.770.000.00	85%	23.600.770.000.00	90%	23.600.770.000.00	Biro Umum

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	56,505,510,000.00	2 unit	55,014,414,000.00	3 unit	55,687,535,177.00	4 unit	55,266,880,037.00	4 unit	54,825,201,588.00		Biro Umum		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kellengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%	21,617,718,500.00	65%	21,554,506,000.00	70%	21,554,506,000.00	75%	21,554,506,000.00	80%	21,554,506,000.00		Biro Umum		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	770,575,000.00	73%	770,575,000.00	74%	770,575,000.00	77%	770,575,000.00	80%	770,575,000.00		Biro Umum		
4.01.30	Program Pelayanan Tata Usaha Umum	jumlah bulan pelaksanaan administrasi tata usaha umum	bulan	1,881,005,000.00	bulan	1,975,055,250.00	bulan	2,073,799,013.00	bulan	2,177,498,413.00	bulan	2,286,373,334.00		Biro Umum		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.40	Program Pelayanan Sarana Prasarana Rumah Tangga Sedia	Jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan rumah tangga	0 buah	5,650,701,500.00	200 buah	6,037,252,200.00	220 buah	6,339,114,810.00	240 buah	6,656,070,550.00	250 buah	6,988,874,078.00		Biro Umum		
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	1,407,700,000.00	90%	1,548,470,000.00	95%	1,703,317,000.00	100%	1,873,648,700.00	100%	2,061,013,570.00		Biro Hubungan Masyarakat		
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	478,800,000.00	3 unit	526,680,000.00	3 unit	579,348,000.00	3 unit	637,282,800.00	3 unit	701,011,080.00		Biro Hubungan Masyarakat		
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	1,207,050,000.00	83%	1,327,755,000.00	90%	1,460,530,500.00	95%	1,606,583,550.00	95%	1,767,241,905.00		Biro Hubungan Masyarakat		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70%	60,000,000.00	74%	66,000,000.00	75%	72,600,000.00	77%	79,860,000.00	80%	87,846,000.00	Biro Hubungan Masyarakat			
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Jumlah kerjasama Pemerintah Provinsi dengan pihak Pemerintah lainnya dan non Pemerintah yang di fasilitasi	0 laporan	1,244,100,000.00	25 laporan	1,368,510,000.00	27 laporan	1,505,361,000.00	30 laporan	1,655,897,100.00	35 laporan	1,821,486,810.00	Biro Hubungan Masyarakat			
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kehumasan (SKM)	0 skor	9,821,620,000.00	75 skor	9,229,280,800.00	80 skor	8,577,707,680.00	85 skor	7,860,977,248.00	90 skor	7,072,573,773.00	Biro Hubungan Masyarakat			
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolalan	Persentase pelayanan Keprotokolalan sesuai dengan SOP Keprotokolalan	0%	1,525,742,000.00	90%	1,678,316,200.00	95%	1,846,147,820.00	97%	2,030,762,602.00	100%	2,233,838,862.00	Biro Hubungan Masyarakat			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	475.400.000.00	80%	475.400.000.00	83%	475.400.000.00	85%	475.400.000.00	90%	475.400.000.00	90%	475.400.000.00	Biro Hukum	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	255.400.000.00	3 unit	255.400.000.00	3 unit	305.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	3 unit	355.400.000.00	Biro Hukum	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi Daerah	0%	571.500.000.00	60%	571.500.000.00	70%	671.500.000.00	80%	671.500.000.00	90%	671.500.000.00	90%	671.500.000.00	Biro Hukum	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	55.400.000.00	73%	55.400.000.00	75%	55.400.000.00	78%	55.400.000.00	80%	55.400.000.00	80%	55.400.000.00	Biro Hukum	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan perekonomian daerah (Perda)	0 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	691,000,000.00	10 perda	741,000,000.00	10 perda	741,000,000.00	Biro Hukum	
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur yang Diterapkan (Pegub)	0 pergub	347,000,000.00	7 pergub	522,000,000.00	9 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	10 pergub	522,000,000.00	Biro Hukum	
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh akses informasi hukum (%)	0%	200,000,000.00	65%	200,000,000.00	70%	200,000,000.00	75%	200,000,000.00	80%	200,000,000.00	80%	200,000,000.00	Biro Hukum	
4.01.32	Program Pembinaan dan Penguasaan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum Kabupaten/Kotaya yang ditetapkan	0 peraturan	1,244,300,000.00	255 peraturan	1,064,300,000.00	260 peraturan	1,064,300,000.00	265 peraturan	1,064,300,000.00	270 peraturan	1,064,300,000.00	270 peraturan	1,064,300,000.00	Biro Hukum	
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase kasus hukum yang diselesaikan	0%	1,840,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	90%	1,660,000,000.00	Biro Hukum	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Persentase lembaga di Kabupaten/Kota Peduli HAM	0%	370,000,000.00	85%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	90%	370,000,000.00	Biro Hukum	
4.01.45	Program Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum	Peraturan Daerah yang diterapkan (Perda)	0 perda	-	15 perda	185,000,000.00	20 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	25 perda	185,000,000.00	Biro Hukum	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	80%	454,032,000.00	90%	476,733,600.00	95%	500,570,280.00	100%	525,598,794.00	100%	551,878,734.00	100%	551,878,734.00	Biro Organisasi	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	251,450,000.00	3 unit	364,022,500.00	3 unit	382,223,625.00	3 unit	401,334,806.00	3 unit	421,401,547.00	3 unit	421,401,547.00	Biro Organisasi	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	75%	744,785,000.00	85%	782,024,250.00	90%	821,125,463.00	95%	862,181,736.00	95%	905,290,822.00	95%	905,290,822.00	Biro Organisasi	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0%	906.920.000.000	61%	952.266.000.000	71%	999.879.300.000	79%	1.049.873.265.000	89%	1.102.366.929.000		Biro Organisasi		
4.01.51	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Setda	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan sesuai aturan	100%	127.960.000.000	100%	134.358.000.000	100%	141.075.900.000	100%	148.129.695.000	100%	155.556.180.000		Biro Organisasi		
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	68,93 Skor	2.691.105.000.000	70,5 Skor	2.825.660.250.000	71,5 Skor	2.966.943.263.000	72,5 Skor	3.115.290.426.000	74 Skor	3.271.054.947.000		Biro Organisasi		
4.01.60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	71,05%	2.974.660.000.000	75%	2.547.303.400.000	77%	2.198.578.969.000	79%	1.832.418.318.000	81%	1.447.949.632.000		Biro Organisasi		
4.01.80	Program Penguatan Kelenyangan	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	0%	1.145.920.000.000	90%	1.203.216.000.000	92%	1.263.376.800.000	95%	1.326.545.640.000	97%	1.392.872.923.000		Biro Organisasi		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	52,63%	224.960.000,00	236.208.000,00	78,95%	248.018.400,00	89,47%	260.419.320,00	100%	273.440.286,00				Biro Organisasi	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1.205.300.000,00	1.265.565.000,00	80%	1.028.843.250,00	90%	1.031.650.618,00	95%	1.063.698.751,00				Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	233.000.000,00	244.650.000,00	2 unit	409.087.500,00	3 unit	422.041.875,00	3 unit	435.643.969,00				Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	869.450.000,00	951.395.000,00	55%	690.050.625,00	60%	1.140.687.950,00	65%	1.149.756.745,00				Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	3.000.000,00	3.150.000,00	75%	101.102.500,00	77%	101.157.625,00	80%	101.215.506,00				Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.16	Program peningkatan pelayanan yang diselenggarakan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Laporan Kedinasan yang diselesaikan secara tertib dan tepat waktu (Dokumen)	0 dokumen	409,000,000.00	2 dokumen	481,950,000.00	2 dokumen	506,047,500.00	3 dokumen	531,349,875.00	4 dokumen	557,917,369.00	Biro Perencanaan dan Otonomi Daerah			
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Batas Administrasi Wilayah yang diselesaikan	0%	1,192,500,000.00	68%	1,284,270,000.00	72%	1,166,999,250.00	76%	1,435,349,213.00	80%	1,507,116,673.00	Biro Perencanaan dan Otonomi Daerah			
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Persentase kasus administrasi perantaraan yang ditindaklanjuti (%)	0%	1,076,250,000.00	85%	1,130,062,500.00	90%	1,186,365,625.00	95%	1,245,893,906.00	100%	1,308,188,602.00	Biro Perencanaan dan Otonomi Daerah			
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks Kinerja Daerah dengan peringkat predikat tinggi (Kab/Kota)	3 kab/kota	919,800,000.00	4 kab/kota	520,172,500.00	5 kab/kota	1,014,079,500.00	6 kab/kota	864,783,475.00	7 kab/kota	518,022,649.00	Biro Perencanaan dan Otonomi Daerah			
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	Nilai Kinerja LPPD	skor	541,700,000.00	3.153 skor	568,785,000.00	3.172 skor	597,224,250.00	3.172 skor	427,085,463.00	3.172 skor	708,439,736.00	Biro Perencanaan dan Otonomi Daerah			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	678.650.000.000	75%	746.515.000.000	80%	821.166.500.000	85%	903.283.150.000	90%	993.611.465.000	Biro Kesjahteraan Rakyat			
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	348.630.000.000	2 unit	260.000.000.000	3 unit	260.000.000.000	3 unit	160.000.000.000	3 unit	160.000.000.000	Biro Kesjahteraan Rakyat			
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenjaran Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	702.500.000.000	45%	700.500.000.000	50%	767.050.000.000	55%	840.255.000.000	60%	920.780.500.000	Biro Kesjahteraan Rakyat			
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	104.000.000.000	73%	110.000.000.000	75%	110.000.000.000	77%	110.000.000.000	80%	110.000.000.000	Biro Kesjahteraan Rakyat			
4.01.17	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Prosentase Hasil Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti	0%	2.351.000.000.000	90%	2.586.100.000.000	90%	2.844.710.000.000	90%	1.958.733.170.000	90%	1.942.099.100.000	Biro Kesjahteraan Rakyat			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.18	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kependidikan dan Olahraga dan Olahrag	Prosentase Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kependidikan dan Olahraga yang ditindaklanjuti	0%	90%	1,213,000,000.00	90%	1,334,300,000.00	90%	1,467,730,000.00	90%	1,614,503,000.00	90%	1,775,953,300.00	90%	1,775,953,300.00	Biro Kesjahteraan Rakyat
4.01.19	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Prosentase Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Bidang Sosial, Kependidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditindaklanjuti	0%	90%	1,007,000,000.00	90%	1,107,700,000.00	90%	1,218,470,000.00	90%	1,340,317,000.00	90%	1,474,348,700.00	90%	1,474,348,700.00	Biro Kesjahteraan Rakyat
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat	0%	90%	3,434,420,000.00	90%	2,994,085,000.00	90%	2,350,073,500.00	90%	2,912,108,680.00	90%	2,462,406,935.00	90%	2,462,406,935.00	Biro Kesjahteraan Rakyat
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	463,700,000.00	80%	510,000,000.00	85%	510,000,000.00	90%	560,000,000.00	95%	560,000,000.00	95%	560,000,000.00	Biro Perekonomian

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	193,305,000.00	2 unit	352,500,000.00	3 unit	302,500,000.00	3 unit	502,500,000.00	3 unit	450,000,000.00	3 unit	800,000,000.00	Biro Perencanaan	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelayakan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	710,000,000.00	55%	800,000,000.00	60%	800,000,000.00	65%	800,000,000.00	70%	800,000,000.00	70%	800,000,000.00	Biro Perencanaan	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	61,195,000.00	73%	125,000,000.00	75%	125,000,000.00	77%	225,000,000.00	80%	225,000,000.00	80%	225,000,000.00	Biro Perencanaan	
4.01.48	Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Produksi Daerah	0 Kebijakan	452,500,000.00	3 Kebijakan	780,000,000.00	3 Kebijakan	887,500,000.00	4 Kebijakan	770,000,000.00	5 Kebijakan	721,000,000.00	5 Kebijakan	721,000,000.00	Biro Perencanaan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.49	Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah	0 kebijakan	1 kebijakan	2 kebijakan	3 kebijakan	1,110,000,000.00	1,000,000,000.00	932,500,000.00	670,000,000.00	699,300,000.00	1,130,000,000.00	1,119,000,000.00	3 kebijakan	3 kebijakan	Biro Perencanaan
4.01.50	Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa	Jumlah Fasilitasi dan Kebijakan Bidang Industri dan Jasa	0 Kebijakan	6 Kebijakan	7 Kebijakan	7 Kebijakan	765,000,000.00	932,500,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	862,500,000.00	925,000,000.00	9 Kebijakan	8 Kebijakan	Biro Perencanaan
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	85%	90%	880,000,000.00	880,000,000.00	880,000,000.00	1,137,539,000.00	1,137,539,000.00	880,000,000.00	880,000,000.00	100%	95%	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	2 unit	3 unit	350,000,000.00	350,000,000.00	542,300,000.00	542,300,000.00	542,300,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	3 unit	3 unit	Biro Administrasi Pembangunan
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	75%	80%	85%	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	779,000,000.00	779,000,000.00	779,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	90%	95%	Biro Administrasi Pembangunan

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	627,998,000.00	73%	120,000,000.00	75%	120,000,000.00	77%	120,000,000.00	80%	120,000,000.00	80%	120,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan	
4.01.25	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa yang selesai sebelum akhir maret	0%	1,199,470,000.00	60%	950,000,000.00	70%	950,000,000.00	75%	950,000,000.00	80%	950,000,000.00	80%	950,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan	
4.01.46	Program Koordinasi dan Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Pembangunan	Persentase Paket Pekerjaan Pembangunan yang mengalami keterlambatan yang ditindaklanjuti	0%	1,821,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	80%	1,200,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan	
4.01.47	Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Pengendalian Program	Persentase program/kegiatan yang diendalikannya sesuai target perencanaan	0%	1,992,693,000.00	75%	2,450,000,000.00	80%	2,450,000,000.00	85%	2,450,000,000.00	90%	2,450,000,000.00	90%	2,450,000,000.00	Biro Administrasi Pembangunan	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan peningkat kepinginan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	75%	451.696,000.00	80%	600,000,000.00	85%	600,000,000.00	90%	600,000,000.00	95%	600,000,000.00	95%	600,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	84.400,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	3 unit	550,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	803.645,000.00	60%	900,000,000.00	70%	900,000,000.00	80%	900,000,000.00	90%	900,000,000.00	90%	900,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Persentasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang ditindaklanjuti/erlaksana	90%	75%	653.000,000.00	80%	760,000,000.00	85%	860,000,000.00	90%	960,000,000.00	95%	960,000,000.00	95%	960,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Persentase Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan yang ditindaklanjuti/terlaksana	100%	75%	583.500,000.00	80%	820,000,000.00	85%	920,000,000.00	90%	920,000,000.00	95%	920,000,000.00	95%	920,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang ditindaklanjuti terlaksana	90%	473,759,000.00	80%	670,000,000.00	85%	670,000,000.00	90%	670,000,000.00	95%	670,000,000.00		670,000,000.00	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	12,491,377,750.00	76%	12,491,377,750.00	77%	12,491,377,750.00	78%	12,491,377,750.00	80%	12,491,377,750.00		12,491,377,750.00	Sekretariat DPRD Provinsi	
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00	1 unit	20,874,503,280.00		20,874,503,280.00	Sekretariat DPRD Provinsi	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenyangan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	17,413,760,000.00	72%	17,413,760,000.00	75%	17,413,760,000.00	77%	17,413,760,000.00	80%	17,413,760,000.00		17,413,760,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	70%	1,444,864,970.00	72%	1,444,864,970.00	75%	1,444,864,970.00	77%	1,444,864,970.00	80%	1,444,864,970.00	80%	1,444,864,970.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan terhadap kegiatan Anggota DPRD yang sesuai SOP	%	75%	43,800,494,000.00	77%	43,800,494,000.00	78%	43,800,494,000.00	79%	43,800,494,000.00	80%	43,800,494,000.00	80%	43,800,494,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	70%	2,985,200,000.00	75%	2,985,200,000.00	80%	2,985,200,000.00	85%	2,985,200,000.00	90%	2,985,200,000.00	90%	2,985,200,000.00	Badan Penghubung Provinsi
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1 unit	2,755,000,000.00	2 unit	2,314,995,000.00	3 unit	2,245,995,000.00	4 unit	2,288,045,000.00	4 unit	2,245,995,000.00	4 unit	2,243,995,000.00	Badan Penghubung Provinsi

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,145,981,000.00	50%	1,195,546,000.00	55%	1,195,546,000.00	60%	1,202,000,000.00	65%	1,202,000,000.00	1,202,000,000.00	Badan Penghubung Provinsi		
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	91,750,000.00	73%	93,750,000.00	75%	93,750,000.00	77%	93,750,000.00	80%	93,750,000.00	93,750,000.00	Badan Penghubung Provinsi		
4.01.38	Program Peningkatan informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Ajangannya Kalimantan	0 Orang	1,421,769,000.00	24500 Orang	1,658,039,000.00	25000 Orang	1,658,039,000.00	25250 Orang	1,695,635,000.00	25500 Orang	1,695,635,000.00	1,695,635,000.00	Badan Penghubung Provinsi		
4.01.39	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Badan Penghubung	0%	800,500,000.00	85%	952,670,000.00	90%	979,620,000.00	95%	979,620,000.00	100%	979,620,000.00	979,620,000.00	Badan Penghubung Provinsi		
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	300,000,000.00	2 unit	350,000,000.00	3 unit	350,000,000.00	3 unit	300,000,000.00	4 unit	250,000,000.00	250,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengrus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	550,000,000.00	40%	450,000,000.00	45%	450,000,000.00	50%	450,000,000.00	55%	450,000,000.00		450,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	50,000,000.00	73%	50,000,000.00	75%	50,000,000.00	77%	50,000,000.00	80%	50,000,000.00		50,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	
4.01.41	Program Peningkatan Ekonomi dan Sosial Bagi ASN/Anggota KORPRI dan Keluarga	Persentase ASN Kesejahteraan ASN / Anggota KORPRI dan Keluarganya	5%	1,750,000,000.00	15%	1,925,000,000.00	15%	2,235,000,000.00	15%	2,400,000,000.00	2.5%	2,650,000,000.00		2,650,000,000.00	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	
4.02	Pengawasan			15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		15,012,840,000.00		
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanngu kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1,516,600,000.00	85%	1,516,600,000.00	90%	1,516,600,000.00	95%	1,516,600,000.00	100%	1,516,600,000.00		1,516,600,000.00	Inspektorat	
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	853,800,000.00	2 unit	853,800,000.00	3 unit	853,800,000.00	4 unit	853,800,000.00	5 unit	853,800,000.00		853,800,000.00	Inspektorat	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,769,700,000.00	85%	1,769,700,000.00	90%	1,769,700,000.00	95%	1,769,700,000.00	100%	1,769,700,000.00		Inspektorat		
4.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75.39 Skor	410,100,000.00	78 Skor	410,100,000.00	80 Skor	410,100,000.00	81 Skor	410,100,000.00	82 Skor	410,100,000.00		Inspektorat		
4.02.97	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja baik	27 PD	1,597,510,000.00	30 PD	1,117,510,000.00	32 PD	1,117,510,000.00	34 PD	1,117,510,000.00	36 PD	1,117,510,000.00		Inspektorat		
4.02.98	Program Penjaminan Mutu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	0 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	17 PD	226,500,000.00	20 PD	226,500,000.00		Inspektorat		
4.02.99	Program pencegahan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60 Nilai	2,467,205,000.00	70 Nilai	2,667,205,000.00	75 Nilai	2,667,205,000.00	80 Nilai	2,667,205,000.00	85 Nilai	2,667,205,000.00		Inspektorat		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.02.10 0	Program Peningkatan Kapabilitas AP/PP	Meningkatkan profesional tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	35 orang	2,767,000,000.00	40 orang	2,827,000,000.00	45 orang	2,827,000,000.00	50 orang	2,827,000,000.00	60 orang	2,827,000,000.00	Inspektorat			
4.02.10 1	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan dan Pengendalian Kab/Kota	0 Kegiatan	3,404,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	10 Kegiatan	3,544,425,000.00	Inspektorat			
4.02.10 2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	10 Kegiatan	-	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	10 Kegiatan	80,000,000.00	Inspektorat			
4.03	Perencanaan			48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00		48,050,000,000.00				
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penanggung kepengantingan terhadap pelayanan PD (SKM)	82,30%	8,450,375,000.00	86%	8,450,375,000.00	87%	8,450,375,000.00	88%	8,450,375,000.00	90%	8,450,375,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	1 unit	8,061,650,000.00	3 unit	6,561,650,000.00	4 unit	6,561,650,000.00	5 unit	6,561,650,000.00	5 unit	6,561,650,000.00	5 unit	6,561,650,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi perencanaan	13,8%	3,407,400,000.00	17%	3,407,400,000.00	20%	3,407,400,000.00	23%	3,407,400,000.00	23%	3,407,400,000.00	23%	3,407,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77,69%	3,621,425,000.00	78,30%	3,621,425,000.00	79%	3,621,425,000.00	80%	3,621,425,000.00	81%	3,621,425,000.00	81%	3,621,425,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	53,23 Persen	4,824,900,000.00	65 Persen	5,324,900,000.00	75 Persen	5,324,900,000.00	80 Persen	5,324,900,000.00	90 Persen	5,324,900,000.00	90 Persen	5,324,900,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan	45,68%	3.772.160.000,00	60%	3.772.160.000,00	70%	3.972.160.000,00	80%	3.772.160.000,00	90%	3.772.160.000,00	90%	3.772.160.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	38,6 Persen	2.564.300.000,00	60 Persen	3.064.300.000,00	70 Persen	3.064.300.000,00	80 Persen	3.064.300.000,00	90 Persen	3.064.300.000,00	90 Persen	3.064.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarama Wilayah	Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarama Wilayah	45,2 Persen	2.850.000.000,00	65 Persen	3.350.000.000,00	75 Persen	3.350.000.000,00	85 Persen	3.350.000.000,00	90 Persen	3.350.000.000,00	90 Persen	3.350.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melebihi dokumen anggaran	78,53%	7.085.850.000,00	85%	8.585.850.000,00	90%	7.385.850.000,00	95%	8.585.850.000,00	100%	8.585.850.000,00	100%	8.585.850.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.03.49	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota	82,30%	85%	87%	-	91%	-	94%	-	96%	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.50	Program Pengembangan Data dan Analisis Pembangunan Daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan	74%	76%	78%	1,911,940,000.00	81%	85%	1,911,940,000.00	87%	1,911,940,000.00	87%	1,911,940,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.04	Kuangan			93,308,212,000.00	101,636,919,000.00	102,991,620,000.00	104,422,655,000.00	105,736,047,000.00								
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	87%	9,181,053,000.00	88%	89%	9,478,005,000.00	90%	9,912,176,000.00	90%	10,182,432,000.00	Badan Pendapatan Daerah		
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	5 unit	5 unit	2,439,066,000.00	5 unit	5 unit	3,080,839,000.00	5 unit	2,591,183,000.00	5 unit	2,591,769,000.00	Badan Pendapatan Daerah		
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	61%	63%	3,336,539,000.00	68%	71%	3,382,420,000.00	73%	3,432,890,000.00	73%	3,488,407,000.00	Badan Pendapatan Daerah		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	65 nilai AKIP	767.421.000.000	68 nilai AKIP	844.164.000.000	70 nilai AKIP	928.381.000.000	70 nilai AKIP	1.021.440.000.000	72 nilai AKIP	1.123.385.000.000	Badan Pendapatan Daerah			
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Persentase kualitas perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	%	3.588.180.000.000	%	-	%	-	%	-	%	-	Badan Pendapatan Daerah			
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	0%	4.529.713.000.000	100%	4.982.685.000.000	100%	5.480.953.000.000	100%	6.029.051.000.000	100%	6.344.095.000.000	Badan Pendapatan Daerah			
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	0%	2.217.120.000.000	100%	2.716.493.000.000	100%	2.682.717.000.000	100%	2.950.990.000.000	100%	3.148.664.000.000	Badan Pendapatan Daerah			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	0 Dokumen	18 Dokumen	1,500,000,000.00	18 Dokumen	926,485,000.00	18 Dokumen	1,019,134,000.00	18 Dokumen	1,121,048,000.00	18 Dokumen	1,121,048,000.00	Badan Pendapatan Daerah		
4.04.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	0 Obyek	4 Obyek	3,946,999,000.00	6 Obyek	4,341,700,000.00	8 Obyek	4,775,871,000.00	10 Obyek	5,046,127,000.00	10 Obyek	5,046,127,000.00	Badan Pendapatan Daerah		
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	87%	2,806,969,988.00	88%	2,806,969,988.00	89%	2,806,969,988.00	90%	2,806,969,988.00	90%	2,806,969,988.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda		
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	3 unit	1,045,466,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	174,380,000.00	45%	177,224,012.00	50%	177,224,012.00	55%	177,224,012.00	60%	177,224,012.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda		
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTD Samarinda	0%	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	100%	220,340,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Samarinda		
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,572,450,000.00	87%	2,590,066,613.00	88%	2,590,066,613.00	89%	2,590,066,613.00	90%	2,590,066,613.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara		
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	3 unit	725,387,387.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	217,046,000.00	45%	217,046,000.00	50%	217,046,000.00	55%	217,046,000.00	60%	217,046,000.00	60%	217,046,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengiriman Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Persentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTD Kukar	0%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Kartanegara	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1,216,005,000.00	87%	1,216,005,000.00	88%	1,216,005,000.00	89%	1,216,005,000.00	90%	1,216,005,000.00	90%	1,216,005,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	782,192,136.00	3 unit	762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	3 unit	762,212,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	221,300,000.00	45%	243,430,000.00	50%	243,430,000.00	55%	243,430,000.00	60%	243,430,000.00	60%	243,430,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Kutai Timur	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemenerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTD Kutim	0%	525,775,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	100%	578,353,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Timur	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pengguna kepentingan terhadp pelayanan PD (SKM)	0%	1,647,606,000.00	87%	1,647,606,000.00	88%	1,647,606,000.00	89%	1,647,606,000.00	90%	1,647,606,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat			
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	106,000,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	3 unit	116,600,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat			
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persertase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	254,200,000.00	45%	246,994,000.00	50%	246,994,000.00	55%	246,994,000.00	60%	246,994,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan Barat			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemenerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB se-Kaltim	0%	100%	308,000,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	100%	338,800,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	2,315,399,650.00	87%	2,479,428,000.00	88%	2,479,428,000.00	89%	2,479,428,000.00	90%	2,479,428,000.00	90%	2,479,428,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	577,072,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	3 unit	634,780,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Penerimaan Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	306,740,000.00	45%	337,414,000.00	50%	337,414,000.00	55%	337,414,000.00	60%	337,414,000.00	60%	337,414,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemenerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	0%	100%	498,525,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	100%	548,378,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		PD
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	1,194,580,000.00	87%	1,194,580,000.00	88%	1,194,580,000.00	89%	1,194,580,000.00	90%	1,194,580,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	3 unit	282,200,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	3 unit	310,420,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	40%	251,800,000.00	45%	276,980,000.00	50%	276,980,000.00	55%	276,980,000.00	60%	276,980,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	0%	80%	198,200,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	80%	218,020,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Bontang
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	86%	958,550,000.00	87%	958,550,000.00	88%	958,550,000.00	89%	958,550,000.00	90%	958,550,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	740,450,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	3 unit	718,630,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara	
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	240,200,000.00	45%	264,220,000.00	50%	264,220,000.00	55%	264,220,000.00	60%	264,220,000.00	60%	264,220,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara	
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengiriman Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	0%	326,000,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	100%	358,600,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Penajam Paser Utara	
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	918,212,250.00	87%	918,212,250.00	88%	918,212,250.00	89%	918,212,250.00	90%	918,212,250.00	90%	918,212,250.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser	
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	1,103,727,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	3 unit	1,137,844,750.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	387.160.000.00	425.876.000.00	425.876.000.00	425.876.000.00	425.876.000.00	425.876.000.00	425.876.000.00	425.876.000.00	60%	425.876.000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser		
4.04.34	Program Intensifikasi dan Efektivitas Pelaksanaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Persentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTD Paser	0%	470.970.000.00	518.067.000.00	518.067.000.00	518.067.000.00	518.067.000.00	518.067.000.00	518.067.000.00	518.067.000.00	100%	518.067.000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Paser		
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1.082.141.000.00	1.474.259.000.00	1.474.259.000.00	1.474.259.000.00	1.474.259.000.00	1.474.259.000.00	1.474.259.000.00	1.474.259.000.00	88%	1.474.259.000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau		
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	457.102.440.00	502.814.000.00	502.814.000.00	502.814.000.00	502.814.000.00	502.814.000.00	502.814.000.00	502.814.000.00	3 unit	502.814.000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau		
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	236.550.000.00	260.205.000.00	260.205.000.00	260.205.000.00	260.205.000.00	260.205.000.00	260.205.000.00	260.205.000.00	45%	260.205.000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemerataan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Persentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	0%	100%	238,837,500.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	100%	262,722,000.00	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kalimantan di Berau
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	80%	6,676,777,500.00	100%	6,676,777,500.00	100%	6,676,777,500.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	15 unit	1,780,136,000.00	20 unit	1,780,136,000.00	25 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	27 unit	1,780,136,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	50%	153,450,000.00	60%	153,450,000.00	65%	153,450,000.00	70%	153,450,000.00	75%	153,450,000.00	75%	153,450,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran belanja Program/Kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah	%	80%	18,359,169,000.00	85%	18,359,169,000.00	90%	18,359,169,000.00	95%	18,359,169,000.00	100%	18,359,169,000.00	100%	18,359,169,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/kota	Persentase belanja program/kegiatan dalam Dokumen APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi	0%	2,345,587,500.00	85%	2,345,587,500.00	90%	2,345,587,500.00	95%	2,345,587,500.00	100%	2,345,587,500.00	Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah			
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase aset tetap (Tanah dan Bangunan) Daerah yang diamankan dan dimanfaatkan	0%	16,074,800,000.00	85%	16,074,800,000.00	90%	16,074,800,000.00	95%	16,074,800,000.00	100%	16,074,800,000.00	Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah			
4.05	Kepegawaian			21,950,000,000.00		22,133,647,000.00		21,923,647,000.00		21,908,647,000.00		21,808,647,000.00				
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	2,060,751,499.00	85%	2,075,000,000.00	86%	2,075,000,000.00	87%	2,138,647,000.00	88%	2,075,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah			
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	1,460,225,230.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	5 unit	1,200,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah			

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	1,272,025,000.00	11%	1,903,647,000.00	12%	2,208,647,000.00	13%	2,110,000,000.00	14%	2,295,000,000.00	14%	2,295,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	77 Nilai	299,925,000.00	81 Nilai	350,000,000.00	82 Nilai	375,000,000.00	83 Nilai	400,000,000.00	84 Nilai	425,000,000.00	84 Nilai	425,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
4.05.15	Program Peningkatan Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang di mutasi sesuai dengan job description	0%	-	89%	2,220,000,000.00	91%	2,275,000,000.00	93%	2,285,000,000.00	95%	2,285,000,000.00	95%	2,285,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
4.05.16	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Jabatan	Persentase SDM Aparatur yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	0%	-	83%	9,225,000,000.00	85%	9,375,000,000.00	87%	9,375,000,000.00	90%	9,203,647,000.00	90%	9,203,647,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	
4.05.17	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Persentase PNS Berkinerja Baik	0%	-	82%	3,250,000,000.00	84%	2,700,000,000.00	86%	2,700,000,000.00	88%	2,700,000,000.00	88%	2,700,000,000.00	Badan Kepegawaian Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.05.18	Program Pengembangan Data dan Informasi ASN	Persentase Data Kepegawaian yang digunakan dalam proses penempatan pegawai, mutasi dan promosi jabatan	0%	-	94%	585,000,000.00	95%	600,000,000.00	96%	600,000,000.00	97%	625,000,000.00		Badan Kepegawaian Daerah		
4.05.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang menduduki dalam jabatan struktural	0%	15,457,073,271.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		Badan Kepegawaian Daerah		
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1,400,000,000.00	80%	1,325,000,000.00	85%	1,115,000,000.00	90%	1,100,000,000.00	100%	1,000,000,000.00		Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur		
4.06	Pendidikan dan Pelatihan			30,050,000,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00		29,969,791,000.00				

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	5.095.750,000.00	85%	5.067.632,000.00	90%	5.067.632,000.00	95%	5.067.632,000.00	100%	5.067.632,000.00	5.067.632,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5 unit	4.030.153,000.00	5 unit	3.974.049,000.00	5 unit	3.974.049,000.00	5 unit	3.974.049,000.00	5 unit	3.974.049,000.00	3.974.049,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	90%	763.000,000.00	92%	734.948,000.00	93%	734.948,000.00	94%	734.948,000.00	95%	734.948,000.00	734.948,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.06.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	59	443.120,000.00	65	487.686,000.00	70	487.686,000.00	73	487.686,000.00	75	487.686,000.00	487.686,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	%	1,823,831,000.00	90%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	%	1,739,675,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis	%	5,739,122,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	90%	4,214,000,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter	%	12,155,024,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	100%	13,751,801,000.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.07	Penelitian dan Pengembangan			3,803,100,000.00		4,200,000,000.00		4,400,000,000.00		4,700,000,000.00		5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan penangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	1,299,575,000.00	80%	1,140,000,000.00	85%	1,042,500,000.00	90%	1,026,750,000.00	95%	1,029,425,000.00	100%	1,029,425,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	446,450,000.00	3 unit	765,000,000.00	4 unit	891,500,000.00	5 unit	930,650,000.00	5 unit	935,780,000.00	5 unit	935,780,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0%	789,785,000.00	81%	550,000,000.00	82%	515,000,000.00	83%	596,500,000.00	83%	632,750,000.00	85%	632,750,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	0%	174,620,000.00	79%	195,000,000.00	79%	211,000,000.00	80%	213,100,000.00	80%	272,745,000.00	81%	272,745,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.07.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	80%	129,420,000.00	80%	250,000,000.00	80%	330,000,000.00	80%	363,000,000.00	80%	399,300,000.00	80%	399,300,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.07.41	Program Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan bidang ekonomi dan pembangunan	0%	356,750,000.00	80%	450,000,000.00	90%	550,000,000.00	95%	500,000,000.00	95%	550,000,000.00	100%	550,000,000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Kode	Perangkat Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.07.47	Program Libang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	270.000.000.00	80%	450.000.000.00	90%	450.000.000.00	95%	650.000.000.00	100%	750.000.000.00	100%	750.000.000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.07.48	Program Libang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Persentase rekomendasi yang dihasilkan libang bidang sosial dan pemerintahan	0%	70%	336.500.000.00	80%	400.000.000.00	90%	410.000.000.00	95%	420.000.000.00	100%	430.000.000.00	100%	430.000.000.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH						4.143.013.021.925.00		5.007.817.248.925.00		5.620.444.031.925.00		6.719.503.508.925.00		7.674.495.039.425.00		

BAB 8

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambar dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*, indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Disamping itu, penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

- 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
 - a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
 - b. Kesejahteraan sosial
- 2. Aspek Pelayanan Umum**
 - a. Pelayanan Urusan Wajib
 - b. Pelayanan Urusan Pilihan

- c. Pelayanan urusan penunjang

3. Aspek Daya Saing Daerah

- a. Kemampuan Ekonomi;
- b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

8.1. Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator	Target Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
4	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	75.85	75.95	76.05	76.15
6	Indeks Persepsi Korupsi	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	12.18	12.83	12.87	12.92	12.98	13.53	13.53
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0.93	0.95	0.97	0.99	1.01	1.03	1.03
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	18,33	20	20	20	21	21	21
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.57

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0.3	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4.49	5.1	5.4	5.7	6	6.3	6.3
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.46	1.45	1.5	1.55	1.6	1.65	1.65
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,15	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.2
2	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,36	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80	9,80
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96	14,96
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,7	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8	73,8

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal (%)	17	90	150	233	233	233	233
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0,36	24,15	35	40	55	60	60
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	72	90	150	233	233	233	233
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	30	40	55	70	86	86	86

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	68,23	70	73	77	82	85	85
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	95	96	98	99	100	100	100
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	791	6500	13000	19500	26000	31709	31709
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	635	2500	2500	2500	2500	2500	2500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0	85	90	95	97	100	100
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	60	65	70	75	80	85	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Kesehatan							
2.1	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	34	45	55	75	85	100	100
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	76	80	85	90	95	100	100
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	16	43	68	91	100	100
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87,50	95	97	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Kapasitas Air Baku	7.922	7.922	8.322	8.622	8.622	8.982	8.982

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(L/detik)							
3.2	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	60,23	62,23	65,23	67,23	71,23	75,23	75,23
3.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51.722	46.722	41.722	36.722	31.722	26.722	26.722
3.4	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	63,19	64,87	75,34	77,19	90	96,82	96,82
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat							
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	67,18	68	69	70	71	72	72
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	60	25	50	75	100	100
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	85	87	88	89	90	91	91

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sosial							
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	300	1000	1500	2500	3000	3500	3500
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.55
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	80	80	80	80	80	80
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	NA	20	30	35	40	45	45
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,64	56.7	56.71	56.72	56.73	56.75	56.75
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	76	82	88	94	100	100
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	34	48	62	76	87	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.4	Rasio KDRT	0,066	0.06	0,054	0,048	0,042	0,038	0,038
2.5	Kampung KB	154	160	175	180	185	190	190
3	Lingkungan Hidup							
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	417	500	550	600	640	670	670
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	sedang (8)	sedang (8)	sedang (8)	sedang (8)	sedang (8)	sedang (8)	sedang (8)
3.3	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)	25	30	35	40	45	50	50
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	518	503	478	448	413	368	368
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	302	20	25	30	35	40	40
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	289	20	25	30	35	40	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	63	10	30	35	35	40	40
4.5	Jumlah kampung/desa Iklim +	28	20	22	25	27	28	28
5	Perhubungan							
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.392.536	10.705.000	11.026.000	11.536.200	11.700.000	12.050.000	12.050.000
5.2	Jumlah barang (ton)	325.051.663	334.805.000	344.850.000	355.200.000	365.900.000	376.900.000	376.900.000
5.3	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	11 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (88%)	11 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (90%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (90,42%)
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	864 Kasus	660 Kasus	598 Kasus	512 Kasus	472 Kasus	342 Kasus	342 Kasus
6	Komunikasi dan Informatika							
6.1	Indeks Sistem	0	2,6	2,8	3	3,2	3,5	3,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)							
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	0	200	200	200	200	200	200
8	Kepemudaan dan Olahraga							
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	56,33	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86	58,86
9	Kebudayaan	17	90	150	233	0	0	0
10	Perpustakaan							
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	244.7	366.2	455.9	577.1	639.3	703.23	703.23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan							
1	Pariwisata							
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Pertanian							
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	383958	422354	464589	511048	562153	618368	618368
2.2	Jumlah Miniranch yang beroperasi (unit)	0	5	35	40	35	35	35
2.3	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	20	20	20.5	21	22	22
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	226017	233020	240245	247698	255387	263320	263320
2.5	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	13249959	15288465	16812938	17136849	18126358	18313874	18313874

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Kehutanan							
3.1	Realisasi penerimaan PNBPN sektor kehutanan (Rp. Miliar)	167	160	165	170	175	180	180
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤2	≤2	≤1,75	≤1,5	≤1,25	≤1	≤1
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	2.18	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98	13.98
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	118000	32000	32000	32000	32000	32000	32000
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	3,38	3,63	4,13	4,63	5,13	5,13
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945.607	965.607	989.607	1.018.607	1.041.607	1.078.607	1.078.607
5	Perdagangan							
5.1	Jumlah perusahaan yang	98	35	35	35	35	35	35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)							
5.2	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	0	2	2	2	3	3	3
6	Perindustrian							
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	0,23	1	1	1	1	1.5	1.5
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)	0	7	7	7	7	7	7
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	119.096	120.882	122.695	124.535	126.403	128.299	128.299
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	149.039	152.466	155.516	158.938	162.593	166.17	166.17

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2.5 Milyar	3 Milyar	3 Milyar	3 Milyar	3 Milyar	3 Milyar	3 Milyar
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	2	1	1	1	1	1	1
d	Fokus : Urusan Penunjang							
1	Perencanaan							
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82.3	85	87	91	94	96	96
2	Keuangan							
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	0	2	4	6	8	10	10
3	Pengawasan							
3.1	Hasil Penilaian Integritas	60	65	70	75	80	85	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2	Level kapasitas APIP	2	3	3	3	3	4	4
4	Umum/Sekretariat							
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71,05	73	75	77	79	81	81
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	86	87	90	92	95	97	97
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	50	61	71	79	89	89
6.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52,63	60,53	68,42	78,95	89,47	92	92
C	ASPEK DAYA SAING							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	54,30	58,88	63,46	68,04	72,62	72,62
1.2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	2	3	3	3	6	6
1.3	Cakupan layanan air minum (%)	71,83	73,33	75	77	81	85	85
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618,5	14.008,5	14.808,5	15.558,5	16.258,5	16.925,5	16.925,5
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	730	664	575	505	435	365	365
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	673,42	620,06	533,56	459,59	409,56	359,56	359,56
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	73,18	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09	83,09
1.10	Rasio elektrifikasi (%)	84,21	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00	95,00
2	Fokus iklim berinvestasi							
2.1	Nilai realisasi investasi	25,53	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29	38,29

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(Rp Triliun)							
2.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	-8.16	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	15	14	13	12	11	10	10
2.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	7.2	26.3	26.89	27.75	28.5	29.33	29.33
2.5	Indeks Resiko Bencana	0	145	140	135	130	125	125
2.6	Indeks Demokrasi Indonesia	72.86	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	77.5
3	Fokus Sumber Daya Manusia							
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,49	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00	80,00
3.2	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,56	81	81,50	82	82,50	83	83
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4

BAB 9

Penutup

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kalimantan Timur lima tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur Yang Berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi gubernur serta wakil gubernur "**Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat**" yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan dengan pendekatan Teknokratis, *Top Down*, *Bottom Up* dan Politis.

Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pada tahapan meso makro selanjutnya tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Guna memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan 2020;
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
4. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. RPJMD ini merupakan pedoman bagi Perangkat daerah/Dinas/Instansi dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur Periode 2018-2023
8. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk

selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 tiap tahunnya;

9. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Samarinda, Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si